MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88/KMK.01/2022

TENTANG

IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025, telah ditetapkan 87 (delapan puluh tujuh) Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan 20 (dua puluh) Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2017, 26 (dua puluh enam) Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang mulai diimplementasikan sejak 2019, dan 7 (tujuh) Inisiatif Strategis pendukung 87 (delapan puluh tujuh) Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.01/2021 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/KMK.01/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.01/2021 Tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;

c. bahwa sehubungan dengan dilakukannya penyesuaian arah Inisiatif Strategis dalam rangka Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan kembali ketentuan mengenai implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.01/2020 tentang Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN.

KESATU : Menetapkan Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut IS Kemenkeu, yang terdiri atas:

a. 41 (empat puluh satu) IS Kemenkeu yang mulai diimplementasikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

b. 20 (dua puluh) IS Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan

c. 7 (tujuh) IS Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan pendukung 87 (delapan puluh tujuh) IS RBTK sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Implementasi atas 41 (empat puluh satu) IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh:

a. unit Eselon I; dan

b. unit Non Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan,

dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi berdasarkan arahan Menteri Keuangan.

KETIGA : Dalam membantu penyelesaian implementasi atas 41 (empat puluh satu) IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU huruf a, Ketua Tim Pengelola pada Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) dapat membentuk tim teknis penyelesaian berkenaan dengan Inisiatif Strategis.

KEEMPAT : Pemantauan atas implementasi IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) melalui koordinasi dengan:

a. Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*); dan

b. masing-masing unit Eselon I dan unit non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan sebagai penanggung jawab IS Kemenkeu.

KELIMA : Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a ditetapkan oleh Pimpinan Unit Eselon I dan Pimpinan Unit non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.

KEENAM : Pengelolaan dan pemantauan atas implementasi IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b dan huruf c dilakukan oleh masing-masing unit Eselon I dan unit non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan, melalui Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*).

KETUJUH : Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*) pada masing-masing unit Eselon I dan unit non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KEENAM, dapat menyerahkan pengelolaan dan pemantauan atas IS Kemenkeu yang dikelola kepada unit Eselon II di lingkungan unit Eselon I berkenaan dan unit yang setara pada unit Non Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi unit Eselon II yang bersangkutan.

KEDELAPAN : Dalam hal diperlukan, Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) dapat melakukan pemantauan secara langsung atas implementasi IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b dan huruf c.

KESEMBILAN : IS Kemenkeu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diimplementasikan berdasarkan tata kelola IS Kemenkeu yang terdiri atas:

a. manual implementasi dan mekanisme perubahan manual implementasi (*change request*);

b. mekanisme penyelesaian inisiatif strategis (*initiative closing*);

c. pedoman penyusunan Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan; dan

d. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan,

yang dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

a. ketentuan mengenai manual implementasi inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan; dan

b. ketentuan mengenai tata kelola implementasi IS RBTK,

yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.01/2021 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/KMK.01/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.01/2021 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Keputusan Menteri ini.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.01/2021 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan; dan

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/KMK.01/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.01/2021 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Kepala Lembaga *National Single Window*;
5. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
7. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
8. Para *Chief* Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (*Central Transformation Office*); dan
9. Para Ketua *Project Management Office* unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan unit non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 /KMK.01/2022
TENTANG
IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

41 (EMPAT PULUH SATU) INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

1. Kementerian Keuangan sebagai salah satu organisasi yang sangat penting di Indonesia, memiliki *policy*, instrumen, kinerja, dan pengaruh kuat untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.
2. Kementerian Keuangan dituntut dapat menyikapi dinamika politik, makro nasional dan dampak dari *digital disruption*. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Kementerian Keuangan adalah merebaknya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia.
3. Untuk menjalankan fungsinya sebagai pengemban amanah dalam merespon dinamika tersebut, Kementerian Keuangan merumuskan Inisiatif Strategis dalam rangka percepatan transformasi digital.
4. Untuk mewujudkan arah rencana percepatan transformasi digital Kementerian Keuangan, dan untuk menjawab tantangan dan dinamika perubahan eksternal maupun internal, telah ditetapkan visi dan misi Kementerian Keuangan sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024.
5. Visi dan misi Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

   Visi:

   Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

   Misi:

   Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

   a. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
   b. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
   c. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
   d. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.

e. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

6. Untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan, perlu diimplementasikan Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan sesuai peta sebagai berikut:

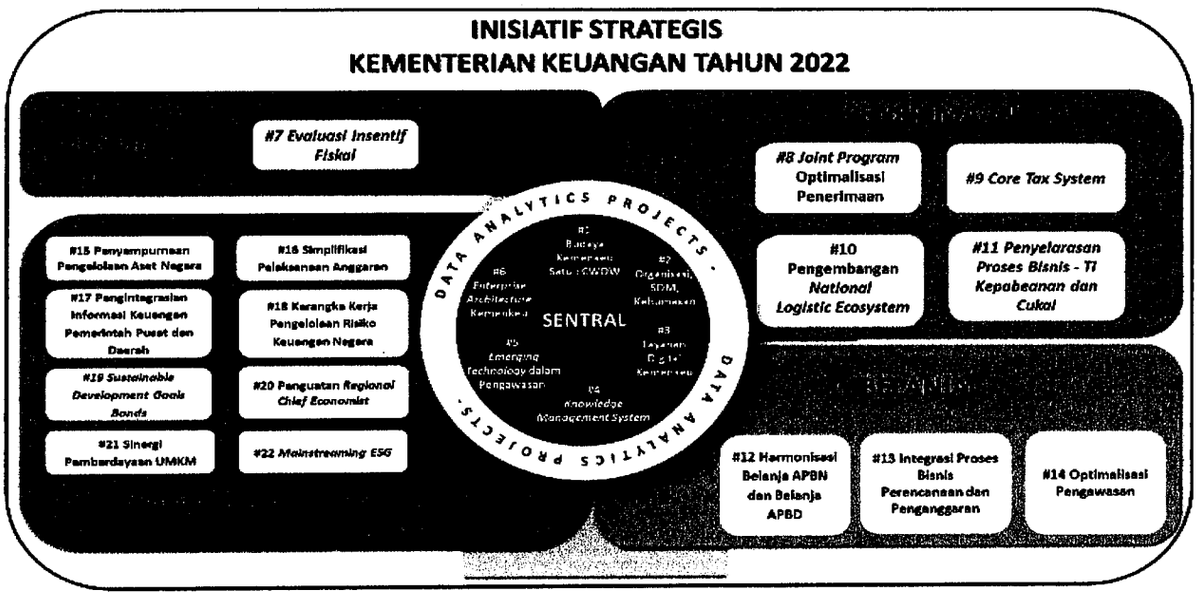

B. IS Tema Sentral

IS Tema Sentral terdiri atas 6 (enam) Inisiatif Strategis, sebagai berikut:

1. Penguatan Budaya Kemenkeu Satu: *Collaborative Ways of Working*;

2. Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Kehumasan Kementerian Keuangan;
3. Layanan Digital Kementerian Keuangan;
4. Penguatan Implementasi Pembelajaran Terintegrasi dan Manajemen Pengetahuan Kementerian Keuangan untuk Mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai *Learning Organization*;
5. Pemanfaatan *Emerging Technologies* dalam Kegiatan Pengawasan Inspektorat Jenderal;
6. Optimalisasi *Enterprise Architecture* Kementerian Keuangan.

C. IS Tema Fiskal

IS Tema Fiskal terdiri dari satu Inisiatif, sebagai berikut:

1. Evaluasi Insentif Fiskal untuk Mewujudkan Kebijakan yang Efektif dan Tepat Sasaran.

D. IS Tema Penerimaan

IS Tema Penerimaan terdiri atas 4 (empat) Inisiatif, sebagai berikut:

1. *Joint Program* Optimalisasi Penerimaan;
2. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax System*);
3. Pengembangan *National Logistic Ecosystem* (NLE); dan
4. Penyelarasan Proses Bisnis–Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai.

E. IS Tema Belanja

IS Tema Belanja terdiri atas 3 (tiga) Inisiatif, sebagai berikut:

1. Harmonisasi belanja APBN dengan belanja APBD untuk mendukung Peningkatan Kualitas Keuangan Nasional;
2. Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran; dan
3. Optimalisasi Pengawasan dalam rangka Peran Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan.

F. IS Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

IS Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan terdiri atas 8 (delapan) Inisiatif, sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Pengelolaan Aset Negara;

2. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (Platform Pembayaran Pemerintah);
3. Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Keuangan Negara;
5. *Sustainable Development Goals Bond*;
6. Penguatan *Regional Chief Economist* dalam rangka Kesinambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan;
7. Sinergi Pemberdayaan UMKM; dan
8. Kerangka Kerja *Mainstreaming Environmental, Social, and Governance* dalam Pemberian Dukungan Pemerintah Proyek KPBU.

G. IS Data Analitik

IS Data Analitik terdiri atas 19 (sembilan belas) inisiatif/proyek data analitik, sebagai berikut:

1. *Platform* Media Analitik- Data Analitik Tema Sentral;
2. Optimalisasi BMN Kemenkeu Versi 2 - Data Analitik Tema Sentral;
3. Pengembangan Dasbor *Profiling* Kemenkeu Untuk Meningkatkan Kapasitas Pengawasan Internal - Data Analitik Tema Sentral;
4. Data Analitik Rekomendasi *Expert Locator*/Penyusun Aset Intelektual - Data Analitik Tema Sentral;
5. Data Analitik Dana Desa - Data Analitik Tema Fiskal;
6. Data Analitik Pengembangan Dasbor Makro Finansial - Data Analitik Tema Fiskal;
7. Peta Risiko Kepatuhan Wajib Pajak Terintegrasi Berdasarkan Empat Pilar Kepatuhan - Data Analitik Tema Penerimaan;
8. Data Analitik Atas Seluruh Jenis Data Keuangan pada Aplikasi Profil WP Berbasis Web (*Approweb*) - Data Analitik Tema Penerimaan;
9. Analitik Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Pajak dan Otomasi Distribusi Rencana Penerimaan Pajak - Data Analitik Tema Penerimaan;
10. Manajemen Risiko Surat Keterangan Asal (SKA) dan Deklarasi Asal Barang (DAB) - Data Analitik Tema Penerimaan;
11. *Smart PCC* (Sistem Manajemen Analisis dan Risiko *Targeting Post Clearance*) - Data Analitik Tema Penerimaan;

12. Pengawasan Berbasis Data Analitik untuk Optimalisasi PNPB Minerba - Data Analitik Tema Penerimaan;
13. Pengawasan PNBP Tematik K/L - Data Analitik Tema Penerimaan;
14. Model *Financial Advisor* bagi Pemerintah Daerah berdasarkan Data Transaksi - Data Analitik Tema Belanja;
15. Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Data Analitik untuk Peningkatan Belanja Berkualitas - Data Analitik Tema Belanja;
16. Analisis Trajektori Penarikan Pinjaman Pemerintah – Data Analitik Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan;
17. Analisis Kinerja Keuangan atas Penambahan PMN pada BUMN - Data Analitik Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan;
18. Penyusunan Alat Bantu Penilaian Pemanfaatan Barang Milik Negara - Data Analitik Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan; dan
19. Pengembangan *Business Intelligence* Pengelolaan Likuiditas - Data Analitik Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan.

H. Piagam (*charter*) IS Kementerian Keuangan

Gambaran detail 41 (empat puluh satu) IS Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf G tercantum pada masing-masing piagam (*charter*) IS Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. Penguatan Budaya Kemenkeu Satu: *Collaborative Ways of Working – Tema Sentral*

Tujuan Inisiatif	Terwujudnya budaya kerja Kemenkeu Satu yang kolaboratif dan berbasis digital guna meningkatkan produktivitas dan kinerja Kementerian Keuangan		
Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
a. Mewujudkan organisasi Kemenkeu yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. b. Mewujudkan SDM Kemenkeu yang berkualitas dan berintegritas. c. Perlu penyesuaian cara kerja baru yang lebih dinamis dan kolaboratif untuk memperkaya kompetensi dan pengalaman PNS Kementerian Keuangan agar dapat berkinerja secara optimal dan efisien (al. kebijakan terkait dengan *delayering* dan squad team) d. Perlunya standardisasi dalam pembentukan *squad team* e. Perlunya mengimplementasikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan	a. Terwujudnya mekanisme pengelolaan kinerja baru yang selaras dengan kebijakan delayering dan terbentuknya *squad team* Kemenkeu berdasarkan *Project* b. Penguatan mental/karakter/budaya pegawai Kemenkeu. c. Percepatan implementasi aplikasi terkait penjatuhan hukuman disiplin (e-hukdis)	a. Laporan pelaksanaan program internalisasi dan penguatan budaya serta sikap dasar pegawai Kemenkeu. b. Laporan implementasi *squad team.* c. Terbangunnya modul kolaborasi cara bekerja d. Penyempurnaan Platform Automasi perkantoran (*Office Automation).* e. aplikasi terkait penjatuhan hukuman disiplin (e-hukdis)	a. Meningkatnya produktivitas organisasi dan SDM Kemenkeu. b. Meningkatnya kualitas layanan dan kepercayaan publik terhadap Kemenkeu c. meningkatnya integrasi data dalam pendokumentasian proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan penjatuhan hukuman disiplin (hukdis) di lingkungan Kementerian Keuangan
	Periode	**Risiko**	
	2022	a. Kompetensi SDM kurang sesuai dengan kebutuhan. b. Keterbatasan pola komunikasi virtual yang mempengaruhi *belief* serta mekanisme kolaborasi pegawai. c. Potensi resistensi dari UE I atas kebijakan dan penugasan pegawai dalam *squad teams*	
Pendukung Kesuksesan	**Key Milestones**	**Unit Pengelola**	
a. Dukungan dan Komitmen Pimpinan untuk: 1) Penguatan mental/karakter/budaya pegawai. 2) Keterbukaan terhadap aspirasi pegawai. b. Keseragaman pemahaman pegawai Kemenkeu terhadap Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural. c. *Change Management* terkait penguatan budaya dan sistem di Kemenkeu. d. *Internal Control* untuk memonitor produktivitas dan integritas pegawai. e. Dukungan infrastruktur teknologi informasi dan anggaran	a. Program internalisasi dan penguatan budaya serta sikap dasar pegawai Kemenkeu b. Implementasi Cara Kerja Kolaboratif (*squad team*) c. Penyempurnaan Automasi perkantoran (Office Automation) sebagai basis SuperApps Kemenkeu d. Pemanfaatan aplikasi E-hukdis untuk efektivitas monitoring proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan evaluasi penjatuhan hukdis	**Initiative Champion**: Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal **Initiative Owner**: Sekretaris Jenderal, , Inspektorat Jenderal **Anggota Tim:** 1. SETJEN (Karo Cankeu, Karo Organta, Karo SDM, Karo KLI, Karo Hukum, KaPusintek, Karo Umum); 2. Itjen (IBI) 3. Kepala BPPK 3. Unit Eselon I (Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan cq Pengelola Organisasi, SDM, IT, dan UKI, dan pemilik probis)	

2. Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Kehumasan (OSDMK) Kementerian Keuangan – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	a. Mewujudkan Birokrasi dan Layanan Publik Kementerian Keuangan yang agile, efektif, dan efisien. b. Penguatan enabling factors untuk percepatan implementasi ekosistem kehumasan kemenkeu satu.

Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
a. JF saat ini jumlahnya cukup banyak dan kurang mendukung proses pengembangan karir lintas unit b. Adanya penataan organisasi dan penerapan teknologi secara masif menuntut SDM Kemenkeu yang lebih berkualitas, profesional dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. c. Kebutuhan untuk mengkomunikasikan kebijakan publik kementerian keuangan pada masyarakat luas / stakeholders secara kolaboratif agar lebih impactful d. Potensi sinergi dan kolaborasi kehumasan melalui penguatan tata kelola dan sumber daya manusia dan anggaran.	a. Konsolidasi JF di lingkungan Kemenkeu b. Manajemen program efisisensi SDM dan integrasi sistem pengelolaan SDM Kemenkeu c. Manajemen program efisisensi SDM dan integrasi sistem pengelolaan SDM Kemenkeu d. Penguatan Common Application Kemenkeu e. Penguatan organisasi kehumasan (Unit Eselon I dan Biro KLI) f. Pelaksanaan employee advocacy g. Penyelenggaraan akademi kehumasan Kemenkeu Satu h. Kolaborasi kehumasan instansi vertikal i. RSPP bidang kehumasan	a. Roadmap pengelolaan Organisasi dan Pengelolaan SDM b. Simplifikasi Jabatan Fungsional c. Penguatan fungsi pengelolaan Data d. Efisiensi jumlah dan peningkatan kualitas SDM e. Sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi f. Organisasi kehumasan yang fit for purpose g. Peningkatan engagement pegawai atas implementasi strakom kolaboratif h. Aktivasi kehumasan kemenkeu-satu di daerah i. Grand Design Common Application Kemenkeu j. Pengembangan Common Application Kemenkeu	a. Organisasi Kemenkeu yang semakin efisien, efektif, produktif, berbasis digital. b. SDM yang berkualitas, profesional dan adaptif dengan perkembangan teknologi c. Pengelolaan kehumasan kolaboratif yang masif, efektif dan efisien

Risiko	a. Potensi resistensi dari UE I atas kebijakan integrasi fungsi, *minus growth*, dan *flatter organization* b. *Gap* kompetensi pegawai yang berasal dari fu yang berbeda.	c. *Deadlock* kebijakan dari Kemenpan RB. d. Potensi penurunan kinerja pada masa transisi.	e. Potensi kurang optimalnya pemenuhan kapasitas PKN STAN (infrastruktur, dosen) dan ketidaksesuaian kompetensi dan kualifikasi lulusan PKN STAN dengan kebutuhan *job owner* non-Kemenkeu. f. Perubahan kebijakan dari Kementerian PANRB terkait JF. g. Pejabat dan pegawai tidak buy in.

Periode	2019-2023

Pendukung Kesuksesan	**Key Milestones**	**Unit Pengelola**
a. Implementasi Enterprise Architecture Kemenkeu. b. Komunikasi yang intens dengan Kemenpan RB terkait rencana penyesuaian fungsi, SDM, organisasi yang progresif. c. Validitas Analisis Beban Kerja. d. Dukungan infrastruktur teknologi informasi dan anggaran. e. Komitmen dari seluruh pimpinan UE I, BLU, dan SMV f. Komitmen yang kuat, penyamaan terminologi, dan kejelasan panduan (BPG) untuk implementasi RSPP bidang kehumasan	a. Roadmap Pengelolaan Organisasi b. Roadmap Pengelolaan SDM c. Konsolidasi JF di lingkungan Kemenkeu d. Pengendalian growth dan penataan komposisi pegawai e. Integrasi sistem kepegawaian Kemenkeu f. Penguatan Common Application Kemenkeu g. Kajian penguatan organisasi kehumasan h. Implementasi re-organisasi Biro KLI i. Penyelenggaraan akademi kehumasan Kemenkeu Satu j. Kolaborasi kehumasan instansi vertikal k. Pelaksanaan Resource forum dan standarisasi anggaran kehumasan	**a. Initiative Champion**: Sekretaris Jenderal **b. Initiative Owner**: Sekretaris Jenderal **c. Anggota Tim:** 1. Setjen (Karo Cankeu, Karo Organta, Karo SDM, Karo KLI, Karo Umum, Kapusintek, Kapushaka) 2. BPPK (Kapusdiklat dan Direktur PKN STAN) 3. DJPK (Sekditjen) 4. UE1 dan Non Eselon: Sekretariat UE1 dan Non Eselon (termasuk instansi vertikal) d. BLU dan SMV di lingkungan Kemenkeu

3. Layanan Digital Kementerian Keuangan – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Mewujudkan Layanan Kemenkeu yang efektif, efisien, dan andal melalui integrasi layanan digital untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan stakeholder

Latar belakang

a. Proses bisnis layanan Kemenkeu masih tersebar di berbagai system UE I
b. Belum optimalnya saluran informasi kepada stakeholder
c. Potensi untuk mewujudkan e-government yang lebih baik khususnya di Kemenkeu.

Pendukung Kesuksesan

a. Komitmen dan Dukungan pimpinan untuk mengintegrasikan berbagai *platform* layanannya.
b. Adanya SLA antar UE I untuk memastikan penanganan secepatnya jika terjadi kendala dalam *platform* layanan.
c. Adanya *task force/ dedicated unit* yang khusus menangani *platform* layanan Kemenkeu.
d. Ketersediaan infrastruktur yang mendukung portal layanan digital.
e. Pemahaman proses bisnis layanan Kemenkeu secara holistik.

Terobosan

a. Harmonisasi layanan dari tiap UE I, yang mencakup: *Government to Citizen, Government to Business, Government to Employee*, dan *Government to Government.*
b. Penyusunan layanan digital Kemenkeu.
c. Implementasi portal Layanan Digital terintegrasi yang mengedepankan *user centric approach.*
d. Implementasi *omnichannel* terintegrasi.
e. Penguatan single identity login melalui user management system yang terintegrasi
f. Penyediaan data yang dapat diakses oleh publik melalui sumber data yang terintegrasi

Periode

2020-2023

Key Milestones

a. Penyusunan desain *high level Layanan Digital* Kemenkeu.
b. Penyusunan desain detail Layanan Digital Kemenkeu untuk tahap I (sesuai roadmap).
c. Integrasi *contact center* Kementerian Keuangan (*quick wins* LDK).
d. Penyusunan regulasi yang mengatur integrasi/harmonisasi seluruh layanan Kemenkeu.
e. Pengembangan Layanan Digital Kemenkeu
f. Implementasi Layanan Digital Kemenkeu
g. Pengembangan Kemenkeu PRIME: Fase Fondasi dan Standarisasi.
h. Pengembangan Kemenkeu PRIME: Fase Stabilisasi.
i. Penguatan tata kelola data
j. Pengembangan Kemenkeu PRIME: Fase Optimalisasi.

Output

a. Portal layanan digital Kemenkeu dan contact center Kemenkeu terintegrasi
b. Tata kelola data yang baik di lingkungan Kemenkeu.

Outcomes

a. Meningkatnya kepuasan *stakeholder* terhadap layanan digital Kemenkeu di tahun 2024 (dibandingkan tahun 2023).
b. Meningkatkan transparansi dan kepercayaan *stakeholder.*
c. Tersedianya SLA layanan digital Kemenkeu di tahun 2021
d. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kemenkeu secara keseluruhan.
e. Penyederhanaan bisnis proses layanan Kemenkeu.
f. Penyediaan data yang berkualitas

Risiko

a. Resistensi unit untuk mengintegrasikan *platform* layanannya.
b. Keengganan UE I untuk menutup *platform* layanannya setelah layanan tersebut diintegrasikan di *platform* layanan Kemenkeu.
c. Kegagalan interkoneksi *platform* layanan UE I dengan *platform* layanan Kemenkeu.
d. Kegagalan *help desk/* pusat bantuan layanan dalam memahami proses bisnis lintas unit eselon I.
e. Perbedaan platform sistem layanan UE I.

Unit Pengelola

a. *Initiative Champion*: Sekretaris Jenderal
b. *Initiative Owner*: Sekretaris Jenderal
c. Anggota Tim:
   1. SETJEN (Karo Organta, Karo KLI, Kapusintek, Karo Hukum, Karo Umum, Karo SDM, Chief CTO);
   2. DJPB (Dir. SITP);
   3. Sekretaris UE I/Non Eselon;
   4. Kepala Unit Kehumasan UE I/Non Eselon;
   5. Kepala Unit TIK dan Data UE I/Non Eselon;
   6. Kepala UE I/Non Eselon Pemilik Layanan.

4. Penguatan Implementasi Pembelajaran Terintegrasi dan Manajemen Pengetahuan Kementerian Keuangan untuk Mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai *Learning Organization – Tema Sentral*

Tujuan Inisiatif	*Mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai learning organization melalui penguatan implementasi pembelajaran terintegrasi dan manajemen pengetahuan. untuk meningkatkan budaya belajar, penciptaan pengetahuan, dan berbagi pengetahuan di Kementerian Keuangan.*

Latar belakang

a. Arahan Menteri Keuangan agar Kementerian Keuangan terwujud menjadi *knowledge institution*;
b. Pembelajaran terintegrasi belum berjalan secara optimal dan perlu didukung dengan manajemen pengetahuan;
c. *Knowledge Management Implementation* menjadi salah satu dari 10 komponen penting dalam mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai *learning organization* (KMK 283/KMK.011/2021). Namun, hasil survei implementasi LO di tahun 2021 menunjukkan bahwa penerapan KM termasuk dalam 3 (tiga) terendah dari 15 (lima belas) subkomponen yang dinilai;
d. Proses manajemen pengetahuan yang meliputi identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan (sesuai PMK 226/PMK.011/2019) belum berjalan secara optimal;
e. Implementasi manajemen pengetahuan, pembelajaran terintegrasi, dan *learning organization* perlu diintegrasikan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pendukung Kesuksesan

a. Komitmen dan dukungan Pimpinan UE I dalam mendorong implementasi manajemen pengetahuan dan pembelajaran terintegrasi;
b. Komitmen setiap pegawai Kementerian Keuangan untuk meningkatkan pengetahuan dan menerapkan budaya belajar secara berkesinambungan;
c. Dukungan seluruh UE I dalam proses analisis, desain, implementasi, dan evaluasi pembelajaran;
d. SDM pengelola pengetahuan (a.l. Penyusun Aset Intelektual, Panitia Penjamin Mutu) yang kompeten;
e. *Software* KMS yang andal.

Terobosan

a. Penguatan implementasi pembelajaran terintegrasi secara kolaboratif antara BPPK dengan unit-unit eselon I untuk memaksimalkan *impact* pembelajaran terhadap pencapaian kinerja organisasi;
b. Pengelolaan manajemen pengetahuan yang koordinatif yang didukung dengan *software Knowledge Management System* yang andal untuk mendukung budaya belajar dan budaya berbagi pengetahuan;
c. Penguatan budaya belajar, penciptaan pengetahuan, dan berbagi pengetahuan di tempat kerja baik di tingkat individu, kelompok, maupun di tingkat organisasi.

Periode

2022 s.d. 2023

Key Milestones

a. Cetak Biru Manajemen Pengetahuan;
b. Terciptanya pengetahuan baru dan kebiasaan berbagi pengetahuan;
c. Tingkat implementasi LO sesuai target;
d. Implementasi Pembelajaran Terintegrasi secara lebih luas;
e. Integrasi KMS di Kemenkeu.

Output

a. Tersedianya aset intelektual yang mudah diakses oleh seluruh pegawai dengan dukungan *Knowledge Management System* yang andal;
b. Terciptanya pengetahuan baru dan kebiasaan berbagi pengetahuan dalam kerangka pembelajaran terintegrasi.

Outcomes

Terwujudnya Kementerian Keuangan sebagai *learning organization* dengan tingkat implementasi tinggi (sebesar 95%) sebagai indikator menguatnya budaya belajar di Kemenkeu.

Risiko

a. Hambatan koordinasi dalam mengimplementasikan pembelajaran terintegrasi;
b. Hambatan koordinasi untuk menggunakan *platform* yang sama dalam pengelolaan pengetahuan;
c. Kendala akses akibat keterbatasan infrastruktur KMS yang memadai;
d. Resistensi untuk berbagi pengetahuan.

Unit Pengelola

a. *Initiative Champion*: Kepala BPPK
b. *Initiative Owner*: Kepala BPPK
c. Anggota Tim:
   1. BPPK (Sekretaris Badan, Kepala Pusdiklat)
   2. SETJEN (Kero SDM, Karo Organta, Kapusintek)
   3. Sekretaris UE I/Karo Umum

5. Pemanfaatan *Emerging Technologies* dalam Kegiatan Pengawasan Itjen – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Mewujudkan *data-driven organization* melalui penyampaian informasi kondisi GRC secara *real-time* berdasarkan hasil pengawasan berbasis pemanfaatan *emerging technologies*.

Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
a. Tantangan peningkatan jumlah, kecepatan, kejelasan, dan variasi (*4Vs of data*) sebagai implikasi digitalisasi proses bisnis internal Kemenkeu maupun mitra ekstern Kemenkeu sebagai peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan Kemenkeu sebagai *data-driven organization* dalam mendukung kebijakan strategis maupun keputusan operasional. b. Belum terimplementasikannya *emerging technologies* untuk memfasilitasi peran Itjen dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan peran Kemenkeu	a. Penerapan *data analytics* dalam kegiatan pengawasan Itjen dengan melibatkan Unit Eselon I. b. Optimalisasi teknik dan metode berbasis *emerging technologies* (ET) lainnya dalam analisis dan pengujian data. c. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi Kemenkeu.	a. 6 *project* CACM (2021) b. 6 *project* CACM (2022) c. 1 kajian pemanfaatan ET lainnya untuk kegiatan pengawasan (2022) d. 3 *project* pemanfaatan ET berupa analisis prediktif dan/atau pemanfaatan ET lainnya untuk menunjang kegiatan pengawasan (2023)	Hasil pengawasan intern yang memberi nilai tambah baik *insight* maupun *foresight* melalui kegiatan tepat waktu dan komprehensif (pada area proses bisnis yang menjadi obyek *project*)

Pendukung Kesuksesan
a. Partisipasi dan dukungan *stakeholder*. b. Ketersediaan dukungan sumber daya, termasuk infrastruktur dan pembiayaan yang dibutuhkan. c. Keberhasilan *Change Management*. d. Kapasitas struktur organisasi dan SDM yang terlibat.

Periode
2021 s.d. 2023.

Key Milestones
a. Risk control matrix b. Use case project CA/CM c. Bootcamp d. Perolehan dan Finalisasi Data f. Penyelesaian 12 project CA/CM di 2021 dan 2022 g. Kajian pemanfaatan ET Lainnya dalam kegiatan pengawasan. *h. Finalisasi Projecct ET*

Risiko
a. Hambatan koordinasi antar UE I b. Pemahaman dan *awareness* tim pengawasan dan/atau klien pengawasan dalam pemanfaatan aplikasi c. Adanya isu kerahasiaan data d. Skala prioritas kegiatan dengan IS lainnya

Unit Pengelola
a. Initiative Champion: Inspektorat Jenderal b. Initiative Owner: Inspektur Jenderal c. Anggota Tim: • Itjen (seluruh Inspektur dan Ses Itjen) • Seluruh unit eselon II Kementerian Keuangan yang terlibat

6. Pengembangan *Enterprise Architecture* Kementerian Keuangan – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Memperkuat pengelolaan *Enterprise Architecture* (EA) dalam mengorkestrasi transformasi Kementerian Keuangan sebagai organisasi digital yang *agile*, adaptif, dan berfokus pada nilai tambah.

Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
a. Belum meratanya kapasitas serta peran optimal dari tim arsitek masing-masing Eselon I Kemenkeu. b. Pendekatan *Enterprise Architecture* belum dimanfaatkan optimal dalam mendukung transisi transformasi digital Kemenkeu yang kompleks. c. Partisipasi dan bentuk peran aktif para pihak dalam *Enterprise Architecture* belum didukung dengan operasionalisasi tata kelola EA Kemenkeu yang terpadu dan konsisten. d. Belum ada pengukuran atas kematangan pengelolaan EA Kemenkeu serta realisasi obyektif atas arsitektur yang dirancang dengan implementasinya (*deliverables management*).	a. Terbentuknya tim arsitek melalui mekanisme rekrutmen yang selektif. b. Pelibatan pimpinan tinggi Kemenkeu dalam proses pengelolaan EA. c. Pelaksanaan secara berkala EA *Maturity Assessment* untuk mengukur level kematangan pengelolaan EA Kemenkeu. d. Pelaksanaan secara berkala *Architecture Compliance Review* untuk mengukur level kepatuhan pengembangan dan implementasi dengan obyektif dan arsitektur yang dirancang, serta kesesuaian arsitektur dengan standar arsitektur yang telah ditentukan. e. Terbangunnya peran/fungsi konsultatif EA dalam proses implementasi transformasi digital.	Operasionalisasi Tim EA Kemenkeu sesuai pedoman Tata Kelola EA Kemenkeu yang komprehensif.	a. Peningkatan kualitas pengelolaan EA Kemenkeu berdasarkan pengukuran level maturitas yang dilakukan pada tahun 2022. b. Peningkatan kapabilitas dan peran tim arsitek pada proses perencanaan, perancangan, pengembangan, dan evaluasi program transformasi digital di Kemenkeu. c. Peningkatan kualitas artefak pada *repository* sehingga dapat dimanfaatkan lebih lanjut seperti analisis *continuous improvement*.
	Periode	**Risiko**	
	2021-2022	a. Kontinuitas peran arsitek pada unit sehubungan dengan proses mutasi/rotasi pegawai. b. Peran arsitek belum merupakan tusi utama yang bersangkutan. c. Persepsi yang berbeda mengenai EA sehingga ekspektasi *stakeholder* sulit dikelola. d. Dinamika transformasi digital.	
Pendukung Kesuksesan	**Key Milestones**	**Unit Pengelola**	
a. Komitmen internal Kemenkeu. b. *Change Management* dan Sosialisasi yang intensif ke UE I. c. Kualitas SDM/arsitek terkait EA termasuk strategi regenerasi/suksesi. d. Pola pikir digital termasuk *innovativeness*.	a. Penyempurnaan Tata Kelola EA Kemenkeu yang berfokus pada penguatan tata kelola yang *agile* serta *value realization* b. Penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan kapabilitas SDM dalam mengelola EA Kemenkeu c. Pengembangan arsitektur d. Monitoring dan evaluasi.	***Initiative Champion***: Sekretaris Jenderal ***Initiative Owner***: Sekretaris Jenderal **Anggota Tim**: 1. SETJEN (Karo Organta, Kapusintek, Karo SDM, Chief CTO); 2. Seluruh Kepala Unit Pengelola Proses Bisnis pada UE I/Non Eselon; 3. Seluruh Kepala Unit Pengelola TIK dan Data UE I/Non; 4.BPPK (Kapusdiklat KU)	

7. Evaluasi Insentif Fiskal untuk Mewujudkan Kebijakan yang Efektif dan Tepat Sasaran – Tema Fiskal

Tujuan Inisiatif	Peningkatan efektivitas insentif fiskal bagi perekonomian melalui penyediaan data monitoring dan analisis evaluasi insentif fiskal.

Latar belakang

a. Banyaknya insentif fiskal yang telah disediakan oleh pemerintah dan telah dipublikasikannya laporan belanja perpajakan.
b. *Tax ratio* menunjukkan tren yang menurun sehingga upaya perbaikan perlu dilaksanakan dari berbagai sisi.
c. Evaluasi insentif fiskal, baik dalam aspek kebijakan maupun tata kelola, perlu untuk dilakukan secara sistematis dan komprehensif dan perlu didokumentasikan dengan baik.
d. Instrumen pengawasan dan monitoring evaluasi insentif fiskal perlu dioptimalkan sebagai bahan pendukung untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan.

Pendukung Kesuksesan

a. Peningkatan pemahaman teori evaluasi insentif fiskal.
b. Komitmen pimpinan Unit Eselon I Kemenkeu dan K/L terkait.
c. Dukungan dari *expert* terkait.

Terobosan

a. Peningkatan kualitas evaluasi terkait pemberian insentif fiskal, termasuk dampaknya.
b. Perbaikan tata kelola insentif fiskal.
c. Penyediaan *dashboard* insentif fiskal.
d. Mendorong intregasi data untuk kebutuhan evaluasi insentif fiskal.
e. Peningkatan kualitas monitoring/pengawasan atas insentif fiskal yang telah diberikan.

Output

a. Evaluasi insentif fiskal yang komprehensif dan terdokumentasi dengan baik.
b. Rekomendasi perbaikan regulasi atau prosedur terkait pengelolaan insentif fiskal.
c. Adanya payung hukum dan sistem *(dashboard)* monitoring insentif fiskal yang valid dan handal.

Outcomes

a. Belanja perpajakan tepat sasaran sesuai indikator yang diakui.
b. Peningkatan *tax ratio* dalam jangka panjang.
c. Peningkatan kepatuhan perpajakan.

Periode

2021-2023

Risiko

a. Evaluasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidaktersediaan data.
b. Data yang tersedia bukan merupakan data yang valid dan terkini.

Key Milestones

a. Grand Design Evaluasi Insentif
b. Evaluasi sesuai dengan identifikasi prioritas kebijakan tahap I
c. Evaluasi sesuai dengan identifikasi prioritas kebijakan tahap II
d. Evaluasi sesuai dengan identifikasi prioritas kebijakan tahap III
e. *Dashboard monitoring* insentif fiskal

Unit Pengelola

a. *Initiative Champion*: Kepala BKF
b. *Initiative Owner*: Kepala BKF
c. Anggota Tim: 1. DJP, 2.DJBC (Dir Fasilitas Kepabeanan, Dir Teknis dan Fasilitas Cukai), 3. DJPK (Dir Dana Transfer Khusus), 4.DJA, 5.DJPB, 6.DJPPR, 7.LNSW, 8. SETJEN (Kapusintek), 9. SA OBTI selaku CIO, 10.SA Kepatuhan Pajak, 11. SA Penerimaan Negara

8. *Joint Program* Optimalisasi Penerimaan – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Mengoptimalkan penerimaan negara melalui perbaikan proses bisnis dan penegakan hukum di bidang pajak, kepabeanan cukai, dan PNBP

Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
a. Optimalisasi penerimaan menjadi kunci utama pemenuhan sumber anggaran dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional. b. Terdapat irisan proses bisnis dan informasi antara UE I Kemenkeu yang dapat disinergikan dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pengawasan terkait penerimaan negara. c. Potensi peningkatan penerimaan negara melalui sinergi antara UE I Kemenkeu – Kementerian/Lembaga (K/L) – pemerintah daerah (Pemda) - Pihak Lain. d. Potensi peningkatan penerimaan perpajakan atas belanja pemerintah: 1. Kepatuhan perpajakan Bendahara belum optimal; 2. Data keuangan pemerintah pusat dan Daerah belum terintegrasi.	a. Kolaborasi dan *compatibility business process* antar unit melalui *scaling up* program sinergi DJP-DJBC, menjadi sinergi antar UE I Kemenkeu (penerimaan pajak, bea, cukai, PNBP, dan pajak belanja pemerintah pusat dan daerah), mencakup *joint analysis-joint audit-joint collection-joint investigation-joint intelligence-joint* proses bisnis-*secondment* b. Sinergi data, pemanfaatan *data analytics,* penegakan hukum Bersama antara UE I Kemenkeu-K/L-Pemda-Pihak Lain terhadap Wajib Pajak, Pengguna Jasa, dan Wajib Bayar untuk optimalisasi penerimaan negara. c. Harmonisasi proses bisnis antar unit eselon I Kementerian Keuangan yang dapat memperbaiki pelayanan, meningkatkan kepatuhan, dan optimalisasi penerimaaan.	a. Pemilihan Wajib Pajak, Wajib Bayar, dan Pengguna Jasa Kepabeanan & Cukai yang ditetapkan dalam Daftar Sasaran Besar (DSB) yang tepat sasaran dan akuntabel sesuai dengan pendalaman analisis dari hasil pemanfaatan pertukaran dan kolaborasi data. b. Penerbitan produk hukum dalam rangka penagihan penerimaan negara yang akurat. c. Terciptanya harmonisasi dan sinergi tata kelola terkait pelayanan serta pengawasan di bidang penerimaan perpajakan dan PNBP. d. Penyempurnaan regulasi, proses bisnis, dan teknologi informasi untuk kemudahan pelayanan dan efektivitas pengawasan.	a.Peningkatan tata kelola penerimaan negara dalam rangka mendukung peningkatan *tax ratio* & *men*gurangi kebocoran penerimaan negara. b.Peningkatan tata kelola pemberian insentif fiskal. c.Meningkatnya penerimaan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, Wajib Bayar, & Pengguna Jasa Kepabeanan & Cukai

Pendukung Kesuksesan	**Periode**	**Risiko**
a. Perlu *alignment* antara tujuan peningkatan penerimaan negara dengan tata kelola tugas dan fungsi UE I Kemenkeu, K/L dan Pemda. b. KMK yang mengatur pelaksanaan program sinergi. c. Komitmen pimpinan di UE I Kemenkeu, K/L, dan Pemda dalam implementasi sinergi *scale up joint program.* d. Penyelerasan peraturan terkait *scale up Joint Program.* e. Alokasi Anggaran dan SDM *dedicated* unit. f. Dukungan IT di masing-masing UE I Kemenkeu. g. Dukungan *Data Analytics* di Unit Eselon I Kemenkeu.	2019-2024	Tingginya kompleksitas koordinasi lintas Unit Eselon I Kemenkeu, K/L dan Pemda.
	Key Milestones	**Unit Pengelola**
	a. Joint Analysis b. Joint Audit c. Joint Investigation d. Joint Collection e. Joint Intelligence *f. Joint* Proses Bisnis & Teknologi Informasi g. Secondment	*a. Initiative Champion*: Wakil Menteri Keuangan *b. Initiative Owner :* Dirjen Pajak, Dirjen BC, Dirjen Anggaran, Kepala LNSW c. Anggota Tim: 1.Sahli (OBTI, PN, PPHP, Pengawasan Pajak, dan Kepatuhan Pajak), SETJEN (Kepala Pusintek), 2.DJP (SesdITJEN, Dir. PKP, Dir. Intelijen Perpajakan, Dir. Pemeriksaan dan Penagihan, Dir. Penegakan Hukum, Dir. DIP, Dir. Peraturan Perpajakan I, Dir. TPB, Dir. TIK, Dir. KITSDA), 3.DJBC (SesdITJEN, Dir. Audit KC, Dir. Teknis Kepabeanan, Dir. Fasilitas Kepabeanan, Dir. Teknis dan Fasilitas Cukai, Dir. Penindakan dan Penyidikan, Dir. PPS, Dir. IKC, Tenaga Pengkaji PKKO, Tenaga Pengkaji PPHKC), 4.DJA (Dir. PNBP SDA-KND, Dir. PNBP K/L, Dir. SP, Tenaga Pengkaji PNBP), 5.LNSW (Dir. EPB, Dir. PM, dan Dir. TI), 6.DJPb (Dir. SITP), 7.DJPK (Dir. ESI, Dir. KPT); 8.DJKN (Dir. PNKNL, Dir. PKNSI), 9.ITJEN (Inspektur I, II,III, IV, dan V), 10.BPPK (Ses. BPPK, Ka. Pusdiklat Pajak, Ka. Pusdiklat BC, Kapusdiklat Anggaran)

9. *Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax System)* – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Tersedianya Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan platform teknologi baru, yang mencakup keseluruhan fungsi inti administrasi perpajakan (*Core Tax Administration System*) yang terintegrasi, dan memiliki interoperabilitas dengan sistem penerimaan negara.

Latar belakang

a. Pesatnya kemajuan teknologi menyebabkan tingginya ekspektasi Wajib Pajak terhadap penyediaan layanan perpajakan berbasis teknologi;
b. Ekspektasi para pemangku kepentingan terhadap sistem informasi dengan teknologi terbaru, terintegrasi, mencakup seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mempermudah pelaksanaan pekerjaan (*decision support system*), andal, dan memiliki interoperabilitas dengan sistem penerimaan negara;
c. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Direktorat Jenderal Pajak belum berfokus kepada pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*core tax administration system*).

Pendukung Kesuksesan

a. Komitmen pimpinan, pegawai, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya;
b. Kesiapan regulasi;
c. Basis data yang handal dan terintegrasi.

Terobosan

Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas dengan sistem penerimaan negara.

Periode

2019-2023

Key Milestones

a. Pengadaan Agen Pengadaan
b. Pengadaan *System Integrator*
c. Pengadaan Jasa Konsultansi *Project Management and Quality Assurance*
d. Pengadaan Jasa Konsultansi *Change Management*
e. Penyelesaian seluruh arsitektur BDAT sesuai framework EA ke dalam ORBUS iServer
f. *Planning and Scoping*
g. *High Level Design*
h. *Detailed Design*
i. *Build*
j. *Test and Quality Assurance*
k. *Deploy and Support*

Output

Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan platform teknologi baru yang handal dan terintegrasi dengan proses bisnis inti administrasi perpajakan, serta memiliki interoperabilitas dengan sistem penerimaan negara.

Outcomes

a. Proses bisnis inti administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
b. Mendukung peningkatan kepatuhanWajib Pajak secara bertahap;
c. Mendukung peningkatan *tax ratio* secara bertahap.

Risiko

a. Kegagalan migrasi data dari sistem lama ke sistem yang baru;
b. Tidak terjaminnya ketersediaan anggaran selama proses Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*core tax administration system*);
c. Kegagalan proses lelang;
d. Kegagalan proses interoperabilitas dengan sistem penerimaan negara.

Unit Pengelola

Initiative Champion: Menteri Keuangan
Initiative Owner: Dirjen Pajak
Anggota Tim:
1. Sahli OBTI;
2. DJP (Dir TIK, Dir TPB, Sesditjen, Dir P2 Humas);
3. SETJEN (Karo Manajemen BMN dan Pengadaan, Pusintek, Karo Advokasi, Karo Perencanaan dan Keuangan , Karo Hukum, CTO, Karo SDM);
4. ITJEN (Inspektorat 1, Inspektorat 5, Inspektorat 7);
5. DJBC (Dir. IKC, Dir. Teknis dan Fasilitas, Dir. Teknis Kepabeanan, Dir. Fasilitas Kepabeanan);
6. DJPB (Dir. SITP, Dir. PKN, Dir. PA, Dir. SP, Dir. APK, Kepala KPPN KP (Khusus Penerimaan)).

10. Pengembangan *National Logistic Ecosystem* – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Membangun ekosistem logistik nasional guna memperbaiki performa logistik Indonesia dan membantu kebutuhan entitas bisnis logistik yang transparan, cepat, serta berbiaya rendah.

Latar belakang

a. Kinerja logistik Indonesia masih berada di peringkat 5 (lingkup ASEAN).
b. Tingkat kemudahan berusaha (EODB) khususnya pada indikator *Trading Across Border (TAB)* belum ada peningkatan signifikan dalam 2 tahun terakhir.
c. Biaya logistik Indonesia masih tinggi (2016/2017).
d. Proses perizinan impor ekspor masih membebani pelaku usaha.

Pendukung Kesuksesan

a. Kapasitas IT dan anggaran yang memadai
b. Partisipasi dan dukungan stakeholder (K/L, pengguna jasa, dan pelaku/penyedia jasa logistik)
c. Penyelesaian integrasi probis dan peraturan terkait (K/L)
d. Keberhasilan Change Management dan Strategi Komunikasi yang tepat kepada K/L, pengguna jasa, dan pelaku/penyedia jasa logistic.

Risiko

a. Hambatan koordinasi lintas sektor (antar-K/L).
b. Resistensi pelaku usaha.
c. Ketersediaan anggaran dan SDM.

Terobosan

a. Pengembangan Sistem NLE untuk mengolaborasi platform *logistics* berbasis ekosistem.
b. Penyusunan Transformasi Probis Logistik, misal dengan SSm untuk mengurangi redudansi.
c. Penyusunan regulasi dan aturan terkait NLE.
d. Pendekatan intensif dan strakom yang tepat.
e. Pembentukan tim kerja lintas sektor (K/L dan private

Periode

2020-2024

Key Milestones

a. *Single submission* (SSm) & *Joint Inspection* Pabean-Karantina.
b. Kolaborasi sistem-sistem pemerintah di bidang kegiatan logistic.
c. Kolaborasi platform *trucking*.
d. Kolaborasi platform *delivery order* (D/O) *online*.
e. Kolaborasi platform pemesanan tempat di kapal online.
f. Kolaborasi platform layanan penyerahan peti kemas (SP2) *online*.
g. Kolaborasi platform layanan pergudangan.
h. Kolaborasi platform layanan depo penimbunan peti kemas.
i. Kolaborasi platform pembayaran online.
j. Penyederhanaan proses bisnis pembayaran penerimaan negara.
k. 11. Sistem pembayaran dan pengoperasian tunggal operator terminal peti kemas.
l. 12. Penerapan satu siklus *outbound* dan *inbound* melalui platform kolaborasi.
m. 13. Zonasi terminal peti kemas berdasarkan jenis kegiatan dan fungsi.
n. 14. Sinkronisasi jalur kereta api peti kemas.

Output

a. Terhubungnya seluruh siklus logistik nasional (Pelayaran, *Kepelabuhanan, Trucking, Warehousing*, dan pembayaran) melalui kolaborasi platform-platform pemerintah dan swasta.
b. Terciptanya sistem dan tata ruang kepelabuhanan yang mendorong efisiensi proses bisnis logistik di Pelabuhan.
c. Terciptanya kemudahan akses ke sistem pemerintah melalui:
   1. Tersedianya sistem SSm (Single Submission) Pengangkutan, sistem SSm Perizinan.
   2. Tersedianya sistem SSm Pabean-Karantina dan berjalannya probis pemeriksaan bersama pabean-karantina.
   3. Tersedianya API di NLE yang dapat dimanfaatkan oleh platform logistics.

Outcomes

a. Terciptanya transparansi sistem logistik dengan bergabungnya platform pembayaran dengan NLE.
b. Peningkatan kemudahan akses layanan logistik oleh pengguna jasa.
c. Peningkatan kepuasan pengguna jasa layanan logistic.
d. Peningkatan peringkat EODB di Indonesia.

Unit Pengelola

a. *Initiative Champion:* Menteri Keuangan
b. *Initiative Owner:* Dirjen Bea dan Cukai dan Ka. LNSW
c. Anggota Tim: 1.DJBC (Dir. Teknis Kepabeanan, Dir. Informasi Kepabeanan dan Cukai, Dir. PPS, TP PPKC); 2.LNSW (Dir. Efisiensi Proses Bisnis, Dir Penjaminan Mutu, Dir. Teknologi Informasi). 3. DJPb (Dir.PKN, Dir. SITP, Dir. DSP). 4. DJA (Dir. PNBP K/L, Dir. SP)

11. Penyelarasan Proses Bisnis–Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai - Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Terciptanya keselarasan antara proses bisnis dengan Teknologi Informasi (TI) kepabeanan dan cukai dari hulu sampai hilir sehingga pelayanan dan pengawasan lebih optimal dan berkualitas.

Latar belakang

a. Kompleksnya proses bisnis pelayanan dan pengawasan DJBC.
b. Ekspektasi pengguna jasa terhadap layanan DJBC.
c. Sistem dan database terpisah-pisah dan terdapat beberapa probis yang belum didukung dengan IT.
d. Keluaran sistem DJBC diperlukan dalam rangka kolaborasi dengan unit-unit Eselon I Kementerian Keuangan.

Pendukung Kesuksesan

a. Dukungan pimpinan, pegawai, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.
b. Kesiapan aturan pendukung
c. TI dan basis data yang andal dan terintegrasi.
d. Sumber daya yang memadai

Risiko

a. Kegagalan integrasi sistem-sistem eksisting
b. Aturan yang tetap mengharuskan kondisi existing
c. Tidak tersedianya anggaran, SDM, dan sarpras yang memadai

Terobosan

a. Penyelarasan proses bisnis dan teknologi informasi secara menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai.
b. Implementasi teknologi informasi terbaru yang *smart*, *user friendly* dan *adaptive*.
c. Kolaborasi sistem untuk mengoptimalkan proses bisnis

Periode

2022-2023

Key Milestones

a. Pembentukan Tim Penyelarasan Probis-TI Kepabeanan & Cukai
b. Penetapan Area Perbaikan Probis-TI Kepabeanan & Cukai yang akan dilakukan
c. Penyempurnaan Regulasi terkait Probis Kepabeanan & Cukai
d. Penyempurnaan TI Kepabeanan & Cukai
e. Change Management dan Monev

Output

a. Proses bisnis inti DJBC yang pasti dan simple
b. CEISA yang:
   1. Single core dan single database
   2. Andal dan terintegrasi
   3. Memiliki dashboard yang informatif
   4. Terkolaborasi dengan sistem lain.

Outcomes

a. Proses bisnis DJBC yang efektif, efisien, & akuntabel.
b. Meningkatkan kepatuhan pengguna jasa Kepabeanan dan Cukai
c. Optimalisasi penerimaan negara

Unit Pengelola

a. Initiative Champion: Direktur Jenderal Bea dan Cukai
b. Initiative Owner: Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
c. Anggota Tim:
1. DJBC (Dir. PPS, Dir. IKC, Dir. Teknis Pabean; Dir. Fasilitas Kepabeanan, Dir. Teknis dan Fasilitas Cukai, Dir. Penindakan dan Penyidikan, Dir. Audit KC, Dir. KBP, Dir. Interdiksi Narkotika, Dir. KSIKC, Sesditjen, Dir. KBPJ, Dir. KI),
2. UE1 terkait sebagai pendukung.

12. Harmonisasi belanja APBN dengan belanja APBD untuk mendukung Peningkatan Kualitas Keuangan Nasional – Tema Perbendaharaan

Tujuan Inisiatif	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dengan mendorong belanja Pemda yang efisien dan produktif serta penyediaan data Pemerintah Daerah hingga level data transaksi yang lengkap, andal dan tepat waktu untuk mendukung penyusunan, pelaksanaan , monitoring, dan evaluasi kebijakan fiskal secara nasional.

Latar belakang	Terobosan	Output	Outcomes
a. Pemanfaatan alokasi TKDD belum dapat dipantau secara optimal; b. Terdapat kebutuhan data Pemda hingga level transaksi untuk mengetahui penggunaan dana alokasi yang disalurkan Pemerintah Pusat dan untuk penyusunan konsolidasi informasi keuangan Pusat dan Daerah serta statistik keuangan pemerintah dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal secara nasional; c. Banyaknya variasi aplikasi sistem keuangan Pemda yang belum terintegrasi dan belum menggunakan standar referensi data; d. Peningkatan Pengawasan kewajiban pemotongan dan pemungutan Perpajakan oleh Pemda.	a. Penyediaan data Pemda pada level transaksi dengan mengedepankan kualitas data; b. Menyelaraskan Standar Referensi Data Pemerintah Pusat dengan Daerah; c. Mewujudkan konsolidasi informasi keuangan pusat dan di daerah pada level data transaksi berdasarkan Standar Referensi Data; d. Menjadikan SIKD sebagai *Single Source of Truth* data keuangan daerah di level Nasional, yang juga menjadi sumber data bagi GFS-SIKRI. e. Menyusun Simplifikasi Pelaporan Pemda	a. Penetapan regulasi dalam rangka peningkatan kualitas belanja Pemda (SHSR, sistem insentif berbasis kinerja) – 2020 b. Ketersediaan data transaksi Pemda (70%) – 2020 c. Ketersediaan data Transaksi Pemda (91,7%) – 2021 d. Ketersediaan data Transaksi Pemda (100%) – 2022 e. SIKD sebagai *Single Regional Report* - 2021 f. Laporan konsolidasi data keuangan Pemda – 2022 g. Simplifikasi Pelaporan Pemda - 2022	a. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan daerah. b. Peningkatan sinergi kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah

Pendukung Kesuksesan	Periode	Risiko
a. Komitmen Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan dalam meningkatkan disiplin pelaporan Pemda; b. Tersedianya peraturan yang mendorong Pemda menyediakan data hingga level transaksi; c. Tersedianya aplikasi yang dapat mengintegrasikan data di level transaksi dari Pemda dengan standar referensi data; d. SDM Pemda yang memadai dan kompeten;	2019 - 2022	a. Kualitas data dari Pemda bervariasi. b. Hambatan SDM dan dinamika regulasi Pemda dalam mengadopsi transformasi digital.

Key Milestones

a. Pengembangan SIKD Tahap I
b. Penetapan SIKD sebagai *Single Source of Truth data*
c. Peningkatan kualitas belanja Pemda
d. Pengembangan SIKD dalam rangka penguatan evaluasi desentralisasi fiskal dan simplifikasi pelaporan
e. Konsolidasi data keuangan Pemerintah Daerah
f. Simplifikasi Pelaporan Pemda

Unit Pengelola

a. Initiative Champion: Menteri Keuangan.
b. Initiative Owner: Dirjen Perimbangan Keuangan
c. Anggota Tim:
1) DJPK (Seluruh Direktur dan Sesditjen)
2) SETJEN (Ka. Pusintek)
3) DJPb (Dir. APK, Dir. SITP, Dir PKN)
4) DJP (Dir PKP, Dir, TIP, Dir TPB, Dir DIP)
5) DJA (Dir HPP, Dir APBB, Dir DSP)

13. Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran – Tema Belanja

Tujuan Inisiatif	Meningkatkan efektivitas serta efisiensi perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan negara.		
Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
a. Masih terdapat siklus perencanaan dan penganggaran APBN yang dilakukan secara manual, tidak efisien, dan tidak terintegrasi. b. Terdapat beberapa aplikasi dalam proses pengelolaan keuangan negara (KRISNA, RKA KL, SPAN Custom Web, SAKTI, Satu DJA). c. PP Nomor 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pasal 34.	a. untuk menajamkan fokus program yang lebih koheren antar UE I dengan impact yang masif. b. Integrasi antara perencanaan dan sistem anggaran untuk memastikan data dari sistem penganggaran memberikan umpan balik ke sistem perencanaan dan sebaliknya. c. Memperkuat SAKTI sebagai sistem anggaran tunggal di Kemenkeu. d. Perampingan aplikasi untuk pemantauan realisasi anggaran. e. Reformasi proses anggaran melalui pembentukan program tata kelola COA dan kementerian lintas lini dalam rangka meningkatkan proses peninjauan belanja.	Sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi	a. Reformasi belanja dan penganggaran untuk menciptakan perilaku belanja yang lebih baik dan efisien di antara K/L dan Pemda. b. APBN dapat dimaksimalkan dalam mendukung upaya perbaikan dan reformasi struktural , termasuk dalam upaya peningkatan produktivitas.
Pendukung Kesuksesan	**Periode**	**Risiko**	
a. Komitmen internal Kemenkeu. b. Change management dan sosialisasi yang intensif ke K/L. c. Kualitas SDM secara nasional untuk mendukung implementasi PBK (Perencanaan-Penganggaran, Pelaksanaan, dan Monev). d. Dukungan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi. e. MoU antara Kementerian Keuangan dan Bappenas.	2019-2023	a. Kurangnya kesiapan dan pemahaman K/L dalam proses redesain dan proses penerapan SAKTI. b. Perbedaan pandang atas simplifikasi struktur di Unit Kemenkeu yang saat ini menangani revisi anggaran. c. Ketidaksepakatan Bappenas dan KemenPAN-RB.	
	Key Milestones	**Unit Pengelola**	
	a. Implementasi Kerangka Anggaran Jangka Menengah TA 2023-2025 b. Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pusat (K/L) c. Penguatan sinkronisasi Belanja pusat (K/L) dan Belanja daerah (TKDD-DAK Fisik) dalam sistem perencanaan dan penganggaran d. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja anggaran pusat (K/L) dan anggaran BUN	a. *Initiative Champion:* Menteri & Wakil Menteri Keuangan b. *Initiative Owner:* Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Kepala BKF c. *Anggota Tim:* 1.DJA (Dir. Anggaran Bid Ekontim, Dir. Anggaran Bid PMK, Dir. Anggaran Bid Polhukam dan BA BUN, Dir. Sistem Penganggaran, dan Dir. Penyusunan APBN); 2.DJPK (Dir. Dana Transfer Khusus dan Dir. Evaluasi & Sistem Informasi); 3.DJPB (Dir. SITP dan Dir. Pelaksanaan Anggaran); 4.BKF (Kapus APBN dan Kapus KEM); 5.SETJEN (Kapusintek).	

14. Optimalisasi Pengawasan dalam rangka Peran Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan- Tema Belanja

Tujuan Inisiatif	Untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan fiskal dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) dalam rangka menghasilkan dampak dan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat dan kesinambungan fiskal nasional

Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
a. Menkeu (pengelola fiskal) melaksanakan fungsi BUN, **berwenang melakukan pengendalian atas pelaksanaan anggaran negara**. (UU 17/2003 Psl 8 huruf f dan UU 1/2004 Psl 7 ayat (2) huruf c). b. Menkeu selaku PA atas BA BUN **berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN** agar pelaksanaan anggaran BA BUN efisien, efektif, dan akuntabel. **c. Anggaran BUN yang signifikan 65,15% (2022) dari APBN dengan peningkatan sbb:** 1) Anggaran non-KL dari Rp568,4 T (2017) menjadi Rp998.79 T (2022) 2) Anggaran TKDD dari Rp741,99 T (2017) menjadi Rp769,61 T (2022) **d. Pelaksanaan pengawasan BA BUN berdasarkan PMK 204/2015 tidak efektif karena hanya bersifat koordinatif. Perlu pengaturan kembali terkait pengawasan Bagian Anggaran BUN dalam bentuk PMK.** **e. Perlu penguatan peran PPA BUN dalam pengawasan BA BUN**	a. Penyusunan Regulasi terkait Penguatan Peran Itjen dalam melakukan pengawasan pengelolaan anggaran BA BUN oleh Kementerian/Lembaga/BUMN/Pemda/Badan Lainnya dan pengawasan atas Kekayaan Negara Dipisahkan yang berada dibawah Kemenkeu. b. Sinergi dan koordinasi dengan UE-1 lain, SPI BUMN, APIP dan/atau unit pada K/L/Pemda terkait. c. Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Pengawasan Pengelolaan anggaran BA BUN oleh Menkeu cq. Itjen. d. Interkoneksi *database* pengawasan APIP K/L, UE-1 lain, dengan pengawasan Menkeu cq. Itjen. e. Penyusunan mekanisme pengawasan PPA BUN atas BA BUN.	a. PMK mengenai pengawasan pengelolaan anggaran BA BUN oleh Kementerian/ Lembaga/BUMN/Pemda/Lembaga Lainnya dan pengawasan atas BUMN/Lembaga non BUMN di bawah Kemenkeu b. Rekomendasi perbaikan terkait pengelolaan BA BUN PMN, Subsidi, dan TKDD serta BUMN/Lembaga dibawah Menkeu yang optimal c. *Dashboard* Pengawasan Pengelolaan Anggaran BUN d. Aplikasi pengawasan PPA atas BA BUN	Peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan BA BUN dan KND

Periode	**Risiko**
2022-2023.	a. Resistensi APIP/SPI pada K/L /Pemda dan/atau BUMN/Lembaga/Badan Lainnya atas pengawasan Menkeu b. Informasi yang dilaporkan APIP/SPI pada K/L /Pemda dan/atau BUMN/Lembaga/Badan Lainnya kurang lengkap untuk analisis c. Permasalahan pada BUMN/Lembaga/Pemda/Badan Lainnya yang cukup kompleks *d. Gap* Kompetensi SDM (terkait *corporate finance, investment, Project Management*)

Pendukung Kesuksesan	**Key Milestones**	**Unit Pengelola**
a. Komitmen, partisipasi dan dukungan stakeholder. b. Ketersediaan resources Itjen yang memadai (organisasi, jumlah dan kompetensi SDM, Penganggaran dan lainnya) c. Sistem informasi pengawasan yang terintegrasi	**2022-2023** a.Penyusunan regulasi mengenai pengawasan pengelolaan BA BUN oleh Kementerian/ Lembaga/BUMN/Pemda/Lembaga Lainnya dan pengawasan atas BUMN/Lembaga non BUMN di bawah Kemenkeu b.Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengawasan terhadap BA BUN PMN, Subsidi, dan TKDD serta BUMN/Lembaga dibawah Menkeu c.Penataan Organisasi dan SDM Itjen d.Optimalisasi Peran PPA BUN dalam Pengawasan BA BUN e.Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pengawasan pengelolaan BA BUN oleh Menkeu cq. Itjen f. Interkoneksi aplikasi pengawasan pengelolaan BA BUN dengan aplikasi BUN terkait g.Pembentukan *dashboard* pengawasan pengelolaan BA BUN	*a. Initiative Champion*: Menteri Keuangan *b. Initiative Owner*: Inspektur Jenderal (co) , Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Kekayaan Negara, Dirjen Anggaran (co) , Dirjen Perimbangan Keuangan. c. Anggota Tim: 1. ITJEN (Ir III, IV, V, VII, Ses Itjen) 2. DJKN (Dir KND) 3. DJA (Dir. PNBP SDA dan KND, Dir Angbid Polhukhankam & BA BUN) 4. DJPB (Dir PA) 5. DJPK (Dir ESI, Dir DTK, Dir DTU, Dir KPT) 6. SETJEN (Kapusintek)

15. Penyempurnaan Pengelolaan Aset Negara – Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

Tujuan Inisiatif	Penguatan pengelolaan aset negara untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial melalui peningkatan PNBP dan *cost saving*

Latar belakang

a. Kebijakan pemindahan ibukota membutuhkan kebijakan pengelolaan asset.
b. Aplikasi yang ada belum dapat berperan sebagai *single source of truth* yang mampu menyajikan informasi *up to date* terkait aset negara dan mendukung pengelolaan aset negara secara *end to end*..
c. Belum optimalnya proses pada pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan aset negara.
d. Masih terdapat aset negara yang status kepemilikannya belum jelas.
e. Kurangnya insentif bagi pengguna barang untuk mendorong optimalisasi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara
f. Adanya PP 46 yang menetapkan tugas penyusunan neraca SDA dilakukan oleh BPS dengan berkoordinasi dengan Kemenkeu (cq. DJKN) untuk penilaian aset SDA.

Pendukung Kesuksesan

a. Komitmen dan dukungan pimpinan untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi yang terkait dengan pengelolaan aset negara.
b. Dukungan K/L lain dalam penyediaan data aset dan data aset sumber daya alam yang akurat serta dukungan dalam pengambilalihan kembali aset negara yang masih dikuasai pihak lain.
c. Sarana dan prasarana TIK.
d. Implementasi SAKTI oleh seluruh K/L yang memigrasikan penggunaan SIMAK.

Terobosan

a. Percepatan penyusunan portofolio aset negara untuk mendukung penerapan *capital charge mechanism.*
b. Penguatan SIMAN agar dapat mengakomodasi pengelolaan aset negara secara *end to end* meliputi penyediaan *data master* aset, perencanaan aset, persediaan dan revaluasi, *underlying* aset pada SBSN, dan portofolio aset negara.
c. Perbaikan tata kelola pengelolaan aset negara dalam lingkup pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan aset
d. Sentralisasi pengelolaan aset di Kemenkeu sebagai Pengguna Barang.
e. Penguatan standarisasi biaya pemeliharaan aset negara secara nasional.
f. Utilisasi aset Kemenkeu meliputi efektifitas penggunaan ruang kerja dan komersialisasi ruang untuk meningkatkan PNBP.
g. Penilaian aset sumber daya alam dalam rangka mendukung penyusunan neraca SDA.
h. Pemberian insentif bagi pengguna barang untuk mendorong optimalisasi aset.
i. Pembentukan platform e-commerce dalam rangka mendorong pemanfaatan aset, khususnya aset kelolaan LMAN

Periode

2020-2024

Key Milestones

a. Kajian kebijakan pengelolaan aset di Ibu Kota Negara lama
b. Perbaikan tata kelola pengelolaan aset negara dalam lingkup pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan asset.
c. Kajian dan regulasi kebijakan pemberian insentif bagi pengguna barang untuk mendorong optimalisasi asset
d. Pengembangan SIMAN V.2.0
e. Penyesuaian struktur portofolio/penilaian kinerja sesuai hasil evaluasi

Output

SIMAN versi 2 yang mendukung penguatan proses bisnis pengelolaan aset negara.

Outcomes

a. Meningkatnya kepuasan *stakeholder* terhadap pengelolaan aset negara dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
b. Meningkatnya manfaat ekonomi dan sosial dari asset.

Risiko

Resistensi K/L lain untuk mendukung penyusunan informasi mengenai aset sumber daya alam.

Unit Pengelola

a. *Initiative Champion*: Direktur Jenderal Kekayaan Negara
b. *Initiative Owner*: Direktur Jenderal Kekayaan Negara
c. Anggota Tim:

1. Seluruh Ses UE I
2. DJKN (Dir. BMN, Dir. PNKNL, Dir. PKNSI, Dir. Penilaian, Dir. Hukum dan Humas, Ses. DJKN,TPOKN, TPHK, LMAN)
3. SETJEN (Ka. Pusintek, Ka. Biro Madan, Ka. Biro Umum)
4. DJPB (Dir. SITP, Dir. SP)
5. DJPPR (Dir. PS)
6. DJA (Dir. SP, Dir. PNBP SDA-KND, Dir. PNBP K/L)
7. ITJEN (Inspektur IV)

16. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui Penggunaan Teknologi Digital (*Platform Pembayaran Pemerintah*) - Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

Tujuan Inisiatif	Penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran dengan penggunaan teknologi digital

Latar belakang

a. Administrasi pelaksanaan anggaran masih berdasar *hardcopy* sehingga membebani pejabat perbendaharaan di satker;
b. Satker sulit memenuhi norma waktu dan jadwal pembayaran;
c. Sistem informasi pelaksanaan anggaran masih terpisah dengan berbagai sistem elektronik pendukung..

Terobosan

a. Melaksanakan sertifikasi sistem elektronik dan dokumen elektronik yang dipergunakan dalam pelaksanaan anggaran;
b. Mewujudkan administrasi keuangan full elektronik, yang legal, dan aman;
c. menginterkoneksikan SAKTI dengan berbagai sistem pendukung sehingga jadwal pembayaran dapat dilakukan lebih akurat;
d. Membentuk unit pengelola untuk kanal elektronik yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan pengguna SAKTI;
e. Melakukan simplifikasi dan otomasi validasi terhadap pelaksanaan belanja di Satker;
f. Mewujudkan infrastruktur data analytic yang lebih akurat pada pelaksanaan anggaran

Output

a. Regulasi pelaksanaan anggaran secara digital
b. Interkoneksi/integrasi antar sistem dalam pelaksanaan anggaran
c. Unit pengelola pelaksanaan anggaran yang mengakomodasi transaksi *full* elektronik

Outcomes

a. Administrasi pelaksanaan anggaran secara digital, sehingga terjadi penurunan *clerical works* pada K/L/Satker;
b. Data pelaksanaan anggaran pada Kemenkeu lebih akurat dan detil sehingga *data analytic* dapat dijalankan oleh Kantor Pusat DJPb, KPPN, dan Kanwil DJPb;
c. Kepastian pembayaran belanja pemerintah melalui jadwal pembayaran;
d. Berkurangnya norma waktu pemrosesan belanja negara *(common expenses)*.

Pendukung Kesuksesan

a. Ditetapkannya payung hukum pelaksanaan anggaran berbasis digital;
b. Tersedianya *IT Infrastructure* yang memadai;
c. SAKTI diimplementasikan di seluruh K/L;
d. Dikembangkannya Platform Pembayaran Pemeritah dan unit pengelolanya;
e. Sertifikasi Sistem Elektronik pada Pelaksanaan Anggaran;
f. Implementasi *Digital Signature* untuk mendukung otomasi validasi.

Periode

2019 - 2023

Risiko

a. Kesiapan regulasi pelaksanaan anggaran dalam ekosistem digital;
b. Kesiapan sistem elektronik dan infrastruktur jaringan IT;
c. Ketidakpatuhan pengguna sistem sehingga jadwal pembayaran tidak berhasil.
d. Kesiapan user pengguna sistem elektronik

Key Milestones

1. Implementasi PPP Tahap I (2022-2023)
2. Persiapan dan Implementasi Piloting PPP Tahap II (2022-2023)
3. Persiapan dan Implementasi Piloting PPP Tahap III (2022- 2023)
4. Reviu Pelaksanaan Implementasi PPP (2022-2023)
5. Pelaksanaan change management and communication (2022-2023)
6. Implementasi tanda tangan elektornik tersertifikasi (Digital Signature) pada SAKTI dan Gaji Web (2022-2023)
7. Business Continuity Plan (BCP) untuk implementasi PPP (2022-2023)
8. Pembentukan unit pengelola platform (2022-2023)
9. Interkoneksi Kartu Kredit Pemerintah (2022-2023)

Unit Pengelola

Initiative Champion: Menteri & Wakil Menteri Keuangan
Initiative Owner: Direktur Jenderal Perbendaharaan
Anggota Tim:

1. Staf Ahli Bidang OBTI
2. Staf Ahli Bidang Pengeluaran
3. DJPb (Sekretaris Ditjen, Dir. SP, Dir. SITP, Dir. PA, Dir. PKN, Ka. Kanwil DJPb DKI Jakarta)
4. Setjen (Ka. Pusintek, Ka. Biro Hukum, Ka. Biro SDM, Ka. Biro Cankeu, Ka. Biro Organta, Ka. CTO)
5. Itjen (Ir III, Ir IV, Ir VII)
6. Pejabat setingkat Es 2 terkait pada BKF, DJPPR, DJA, DJPK, DJKN, Kemkominfo, BPPT, BSSN, BI, PLN, Himbara dan Telkom
7. EY

17. Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara - Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

Tujuan Inisiatif	Mewujudkan terintegrasinya informasi keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah serta Business Intelligence Pemerintah untuk mendukung pengambilan kebijakan fiskal yang komprehensif, serta meningkatkan sinergi keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Latar belakang

a. Hasil reviu BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal menyatakan perlunya pemerintah menyajikan informasi fiskal integrasi posisi fiskal nasional (gabungan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah), sehingga fungsi pemerintah secara keseluruhan dapat terlihat.
b. Rekomendasi DPR kepada pemerintah melalui UU P2 APBN 2013 agar pemerintah mengkonsolidasikan LKPP dan LKPD, serta menyusun Laporan Statistik Keuangan Pemerintah/Government Finance Statistics secara berkala.
c. Pemanfaatan data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang terkonsolidasi dan statistik keeuangan pemerintah dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal Nasional dan regional yang komprehensif.
d. Perlunya penyesuaian perkembangan sistem informasi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kebutuhan pengambilan kebijakan berbasis data, serta pemenuhan Renstra Kemenkeu 2020-2024 sehinga cakupan sistem informasi terintegrasi harus disesuaikan agar dapat memenuhi kebutuhan stakeholder.

Terobosan

a. Penyelarasan dan pembakuan struktur data keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam rangka sinergi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, sampai dengan pelaporan.
b. Tersedianya *one source data* (Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah) yang terkonsolidasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perumusan kebijakan fiskal tingkat nasional dan regional.
c. Penyusunan konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah melalui interkoneksi SPAN dan SIKD.
d. Sinergi pengelolaan keuangan dan pemanfaatan informasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Output

a. Produk Hukum SIKRI sebagai Platform SIKRI integrasi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
b. Data neraca keuangan pusat dan daerah untuk analisis fiskal
c. BAS Konsolidasian
d. Konsolidasi Data Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah
e. *Data Analytics* dan *Business Intelligence* Keuangan Pemerintah

Outcomes

a. Meningkatan sinergi pengelolaan keuangan melalui integrasi informasi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
b. Sinergi dukungan pengambilan kebijakan fiskal yang inklusif dan terkonsolidasi

Risiko

a. Terjadinya perubahan kebijakan dan/atau peraturan yang melandasi standardisasi pengelolaan keuangan daerah.
b. Variasi Bagan Akun Standar, kebijakan akuntansi, kualitas, format, dan kelengkapan data/informasi keuangan pemerintah daerah.
c. Belum tercapainya target pengembangan SIKD yang menyediakan data keuangan pemerintah daerah pada level transasksi dan level laporan keuangan secara lengkap, andal, dan tepat waktu.

Periode

2020-2023

Pendukung Kesuksesan

a. Koordinasi dan komitmen seluruh stakeholder internal dan eksternal Kementerian Keuangan untuk penyediaan data/informasi keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang andal, lengkap dan tepat waktu;
b. Tersedianya sistem informasi yang dapat menyediakan data keuangan Pemerintah Daerah pada level transaksi dan level laporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan integrasi informasi keuangan dan penyusunan laporan konsolidasian dan statistik keuangan Pemerintah secara, lengkap, andal dan tepat waktu.
c. Harmonisasi pengembangan *Data Analytics* dan *Business Intelligence* SIKRI dengan rencana pengembangan *Treasury Big Data* yang ke depannya.

Key Milestones

a. Pengusulan dan penetapan SIKRI sebagai platform integrasi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
b. Penyelarasan BAS Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah melalui BAS Konsolidasian.
c. Pengembangan SIKRI untuk konsolidasi informasi keuangan level laporan dan level transaksi dengan dukungan *data analytic* dan *business intelligence*.
d. Peningkatan kualitas sinergi pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan informasi keuangan pemerintah konsolidasian dan statistik keuangan pemerintah.

Unit Pengelola

a. *Initiative Champion*: Menteri dan Wakil Menteri Keuangan
b. *Initiative Owner*: Direktur Jenderal Perbendaharaan
c. Anggota Tim:
   1) Staf Ahli Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi
   2) DJPB (Dir. APK, Dir. SITP, Dir. SP, Dir PA, Dir PKN, Ses DJPb)
   3) DJPK (Dir. ESI)
   4) SETJEN (Kepala Pusintek,, Karo Hukum)
   5) BKF (Kepala PAPBN, Kepala PKEM)
   6) DJA (Dir. Penyusunan APBN, Dir Sistem Penganggaran)

18. Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Keuangan Negara – Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

Tujuan Inisiatif	Tersedianya kerangka kerja sebagai acuan (*guideline*) pengelolaan Risiko Keuangan Negara (RKN) yang terstruktur, antisipatif, efektif, komprehensif, dan terintegrasi.

Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
a. Jenis dan kompleksitas risiko yang dikelola sangat beragam, sehingga diperlukan suatu kerangka kerja (*framework*) sebagai panduan dan wujud akuntabilitas dalam pengelolaan risiko keuangan negara; b. Pengelolaan risiko keuangan negara perlu dilakukan secara lebih terstruktur dan terintegrasi, sehingga mitigasi risiko yang dilakukan lebih antisipatif (*pre-emptive*), efektif, dan komprehensif; c. Tindak lanjut rekomendasi BPK RI untuk menyusun kerangka kerja pengelolaan risiko Keuangan Negara; d. Kerangka kerja pengelolaan risiko keuangan negara perlu diinstitusionalkan dan diformalkan.	a. Peningkatan integrasi *framework* RKN dengan ALCO dan ERM Kemenkeu secara proporsional, sehingga masing-masing *framework* tetap efektif, saling memperkuat, namun tidak memunculkan duplikasi dalam prosesnya, terutama sinkronisasi ERM dan RKN dalam satu PMK; b. Penyusunan kajian *framework* RKN bersama ADB; c. Peningkatan kualitas analisis dan pelaporan RKN yang bersifat periodik, pre-emptive, terintegrasi dan holistik, termasuk menyediakan *early warning system* yang efektif; d. Penyusunan strategi pengelolaan RKN sebagai pedoman operasionalisasi pengelolaan RKN dan komunikasi kepada *stakeholders*, sekaligus upaya integrasi dengan dokumen perencanaan lain misal MTBEF, KEMPPKF, dan Strategi Pembiayaan; e. Pengembangan sistem aplikasi dan basis data pendukung pengelolaan RKN (antara lain: *dashboard* MR BUMN, *dashboard* monev penjaminan PEN, sistem monitoring penjaminan BUPI, sistem informasi penatausahaan tuntutan hukum, *risk register, early warning system*).	a. Legal basis kerangka kerja risiko keuangan negara; b. Legal basis strategi pengelolaan risiko keuangan negara; c. Laporan dan rekomendasi risiko secara *ad hoc* maupun periodik yang komprehensif dan terintegrasi, sekaligus berfungsi sebagai *early warning system*; d. Sistem aplikasi dan basis data pengelolaan RKN;	a. Risiko keuangan negara yang terkendali untuk mendukung kesinambungan fiskal; b. Peningkatan kepercayaan dari *stakeholders* terhadap pengelolaan RKN (peningkatan nilai Transparansi Fiskal).

Pendukung Kesuksesan	**Periode**	**Risiko**
a. *Framework* ERM dan ALCO Kemenkeu telah diterapkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan, dimana kedua hal tersebut memiliki kaitan erat dengan RKN; b. Terdapat *dedicated unit* pengelola risiko keuangan negara (Dit. PRKN, DJPPR); c. Secara umum pengelolaan RKN saat ini sudah sejalan dengan praktek di beberapa negara (a.l. UK, Australia, NZ, Brazil) serta rujukan internasional (WB, IMF, OECD); d. Tersedia TA dari ADB untuk penyusunan *framework* RKN.	2021 - 2022 **Key Milestones** a. Penyusunan legal basis untuk kerangka kerja risiko keuangan negara; b. Penyusunan Strategi Pengelolaan Risiko Keuangan Negara; c. Pengembangan sistem aplikasi dan basis data monitoring risiko keuangan negara dalam rangka mendukung implementasi pengelolaan risiko keuangan negara	a. Sinkronisasi antara ERM dan RKN berpotensi menimbulkan *redundancy* dan *over load* dari unit pemilik risiko dan/atau area lain yang terkait RKN; b. Target transisi ke integrasi yang holistik memerlukan *effort* dan sumber daya yang memadai **Unit Pengelola** a. *Initiative Champion:* Direktur Jenderal PPR b. *Initiative Owner:* Direktur Jenderal PPR c. Anggota Tim: 1. DJPPR (Direktur PRKN, Sekretaris Ditjen PPR, Direktur SPP); 2, SETJEN (Kepala Biro Cankeu. Kepala Biro Hukum); 3. ITJEN

19. Sustainable Development Goals Bond - Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

Tujuan Inisiatif	Penerbitan *Sustainable Development Goals Bond* (SDGs *Bond*)			
Latar Belakang	**Terobosan**	*Output*	***Outcomes***
a. Keberhasilan penerbitan *thematic bond* sebelumnya yaitu *Global Green Sukuk* dan perlunya perluasan cakupan *thematic* dengan menambahkan *social projects.* b. Perlunya penyelarasan pembiayaan APBN dengan pencapaian tujuan SDGs sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Presiden dalam Nawacita serta RPJMN 2020-2024. c. Terdapat potensi permintaan dari investor untuk penempatan dana di *thematic bond.* d. Perlunya memperkuat persepsi internasional terhadap komitmen Indonesia dalam pencapaian *sustainable goals.* e. Perlunya memperluas basis investor Surat Berharga Negara khususnya *socially responsible investors.*	a. Peningkatan kolaborasi dengan Bappenas dan K/L terkait dalam penentuan proyek SDGs dan *Annual Report SDGs Bonds.* b. Perluasan basis investor melalui pengembangan *framework* dan cakupan proyek *underlying* dengan penambahan *social project.* c. Peningkatan *awareness* K/L terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).	a. SDGs Bond/*Sukuk Framework* b. Transaksi SDGs *Bond*/Sukuk c. *Annual Report* SDGs *Bond*	a. Perluasan basis investor SBN. b. Diversifikasi instrumen pembiayaan APBN. c. Tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). d. Memperkuat persepsi international terhadap komitmen Indonesia dalam pencapaian SDGs.
	Periode	**Risiko**	
	2021 - 2022	a. Kurangnya *awareness* dan komitmen K/L untuk melakukan *budget tagging* dan kontribusi dalam penyusunan *Annual Report* terkait SDGs *bonds.* *b.* *External reviewer/* SPO (*Second Party Opinion*) memberikan rekomendasi/reviu yang tidak sesuai sehingga SDGs *Bonds* tidak dapat diterbitkan.	
Pendukung Kesuksesan	**Key Milestones**	**Unit Pengelola**	
a. RPJMN 2020-2024 dan dokumen *Roadmap of SDGs Indonesia: A Highlight.* b. Komitmen K/L untuk melakukan *budget tagging* proyek SDGs dan kontribusi K/L dalam penyusunan *Annual Report* terkait *SDGs bonds.*	a. Penyusunan *Annual Report SDGs Bonds* (2021-2022). b. Penerbitan SDGs *Bonds* tahun 2022.	*a.* *Initiative Champion:* Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). *b.* *Initiative Owner: :* Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. c. Anggota Tim: 1. DJPPR (Direktur Surat Utang Negara, Direktur Pembiayaan Syariah, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan); 2. DJA (Direktur Sistem Penganggaran); 3. DJPB (Direktur Pelaksanaan Anggaran); 4. BKF (Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral).	

20. Penguatan Regional Chief Economist dalam rangka Kesinambungan Fiskal Berbasis Kewilayahan- Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

Tujuan Inisiatif	Sinergitas Kemenkeu berbasis kewilayahan untuk mengoptimalkan peran *Regional Chief Economist*

Latar belakang

a. Diperlukan peningkatan kualitas kajian fiskal regional yang mampu memunculkan rekomendasi sebagai *feedback* bagi formulasi kebijakan pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan.
b. Diperlukan dukungan data dan informasi keuangan regional untuk peningkatan kualitas rekomendasi *Asset-Liability Committee (ALCO)*
c. Diperlukan peningkatan keselarasan kebijakan fiskal nasional dan regional, serta mengharmonisasikan pembangunan daerah dengan program prioritas nasional.
d. Diperlukan kontribusi aktif dan positif Kemenkeu dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Terobosan

a. Tersedianya regulasi dan pembentukan Tim Implementasi dan Kerangka Kerja Sinergi Kemenkeu Kewilayahan.
b. Implementasi penajaman analisis KFR.
c. Terselenggaranya Forum ALCO Regional untuk membahas pengelolaan keuangan dan perekonomian daerah serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran anggaran di tingkat regional.
d. Konsolidasi data dan informasi data keuangan regional dari instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah dan dari pemerintah daerah.
e. Harmonisasi strategi antar instansi Kementerian Keuangan Pusat dan Daerah.
f. Penyelenggaraan Capacity Building bagi SDM Keuangan di tingkat daerah terkait dengan analisis fiskal dan implementasi kebijakan fiskal

Output

a. Terbentuknya tim implementasi dan kerangka kerja sinergi Kemenkeu kewilayahan.
b. Terbentuknya standar kerangka kerja, asistensi, output, analisa (*business intelligent*), pelaporan, dan strategi komunikasi Kemenkeu Kewilayahan.
c. Rencana kerja dan pelaksanaan program penajaman penguatan RCE berbasis kewilayahan.
d. Sistem monitoring, dashboard, dan repositori informasi keuangan bersifat kewilayahan.

Outcomes

a. Penguatan eksistensi Kementerian Keuangan di daerah selaku pengelola kebijakan fiskal.
b. Terwujudnya konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang dapat mendukung kebutuhan analisis dan kajian fiskal
c. Terwujudnya manajemen pengelolaan kas yang lebih baik dengan semakin presisinya perencanaan kas pemerintah
d. Peningkatan kualitas kebijakan fiskal nasional dan regional

Pendukung Kesuksesan

a. Komitmen pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.
b. Sharing knowledge dari pelaksanaan penguatan RCE berbasis kewilayahan.
c. Sinergi antara Unit Eselon I (UE1) Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah (Pemda), dan pihak terkait lainnya.
d. Kompetensi analisis fiskal dan kualitas SDM Kemenkeu di tingkat daerah dalam memahami implementasi kebijakan fiskal secara komprehensif

Periode

1 Januari 2022 – 31 Desember 2022

Risiko

Kompleksitas koordinasi lintas UE1 Kementerian Keuangan, K/L. Pemda, dan pihak terkait lainnya.

Key Milestones

a. Penyiapan dasar hukum dan pembentukan Tim Implementasi dan Kerangka Kerja Sinergi Kemenkeu Kewilayahan dalam rangka penguatan RCE.
b. Pembentukan standar kerangka kerja, asistensi, output, analisa (*business intelligent*), pelaporan, dan strategi komunikasi penguatan RCE berbasis keilayahan.
c. Pelaksanaan *rollout* standardisasi program penguatan RCE berbasis kewilayahan.
d. Dashboard Informasi Keuangan berbasis Kewilayahan dalam rangka penguatan RCE.
e. Monitoring dan Evaluasi penguatan RCE berbasis kewilayahan.

Unit Pengelola

Initiative Champion: Wakil Menteri Keuangan

Initiative Owner: Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Kekayaan Negara

Anggota Tim: Sekretaris UE-1 terkait, Ka Kanwil daerah terkait (DJP, DJBC, DJPb, DJKN), BKF, DJPK, BPPK, DJPPR, DJA.

21. Sinergi Pemberdayaan UMKM- Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

Tujuan Inisiatif	Sinergi Kemenkeu berbasis kewilayahan dalam mendukung UMKM

Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
a. Arahan Presiden terkait perlunya program pemberdayaan UMKM yang sinergis agar terarah dan terkoordinasi. b. Diperlukan kontribusi aktif dan positif Kemenkeu dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah serta kesejahteraan masyarakat. c. Perlunya optimalisasi pemanfaatan data dalam mendukung UMKM.	a. Pemetaan potensi optimalisasi peran Kemenkeu dalam pemberdayaan UMKM. b. Harmonisasi strategi antar instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah. c. Kolaborasi dan sinkronisasi program pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan tiap UE-1. d. Konsolidasi data dan informasi pada instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah. e. Penguatan layanan yang mendorong pertumbuhan umkm	a. Peta proses bisnis Kemenkeu dalam mendukung UMKM. b. Regulasi tentang Harmonisasi Strategi Antar Instansi Vertikal Kemenkeu. c. Rencana kerja program pemberdayaan UMKM di lingkungan Kemenkeu. d. Kemudahan informasi layanan UMKM Kemenkeu Satu. e. Terciptanya platform pemasaran UMKM binaan Kemenkeu. f. Publikasi pelaksanaan program pemberdayaan UMKM binaan Kemenkeu. g. Terbentuknya *single database* UMKM sasaran pemberdayaan Kemenkeu.	a. Meningkatknya sinergitas layanan UMKM oleh Kemenkeu b. Meningkatnya nilai keekonomian UMKM yang diberdayakan oleh Kemenkeu c. Meningkatnya efektifitas penyaluran bantuan pemberdayaan UMKM oleh Kemenkeu

Pendukung Kesuksesan	**Key Milestones**	**Unit Pengelola**
a. Komitmen pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. b. Sinergi antara Unit Eselon I (UE1) Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah (Pemda), dan pihak terkait lainnya. c. Basis data UMKM yang handal. d. Optimlaisasi peran SMV **Periode** 2022 – 2023 **Risiko** Banyaknya faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan UMKM.	**2022 dan 2023** a. Penyusunan RKMK tentang Harmonisasi Strategi dan Proses Bisnis Pemberdayaan UMKM Antar Instansi Vertikal Kemenkeu (include kelembagaan) b. Terbentuknya Forum Bersama Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Pusat dan Wilayah c. Terbentuknya peta proses bisnis Kemenkeu dalam mendukung UMKM d. Terbentuknya rencana kerja program Sinergi pemberdayaan UMKM di lingkungan Kemenkeu. e. Piloting pelaksanaan program sinergi pemberdayaan UMKM Kemenkeu (Joint Analisis dan Joint Program Pemberdayaan UMKM) f. Optimalisasi platform pemasaran UMKM binaan Kemenkeu g. *Single database* UMKM sasaran pemberdayaan Kemenkeu (2022 dan 2023) h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi **2023** a. Pelaksanaan program sinergi pemberdayaan UMKM Kemenkeu	**a. Initiative Champion**: Wakil Menteri Keuangan **b. Initiative Owner**: Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Kekayaan Negara, Sekretariat Jenderal, BPPK, LNSW **c. Anggota Tim**: 1. Sahli OBTI, Sahli Penerimaan Negara, Sahli Pengawasan Pajak 2. Sekjen (Pusintek, CTO. TP Sumber Daya Aparatur) 3. DJP (Dit. Ekstensifikasi Perpajakan. Dit. P2 Humas, Ka Kanwil), 4. DJBC (Dit. Teknis Kepabeanan, Dit. Fasilitas Kepabeanan, Ka Kanwil), 5. DJPb (Dit. Sistem Perbendaharaan, Dit. SMI, Ka Kanwil), 6. DJKN (Dit. Lelang, TP, Ka Kanwil), 7. DJPK (Dit. Dana Transfer Khusus), 8. BPPK (PKN STAN, Pusdiklat, Balai Diklat), 9. LNSW (Direktorat Efisiensi Proses Bisnis) 10. BUMN Kemenkeu dan BLU Kemenkeu

22. Kerangka Kerja *Mainstreaming* Environmental, Social, and Governance dalam Pemberian Dukungan Pemerintah Proyek KPBU Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

Tujuan Inisiatif	*Mainstreaming* Enviromental, Social, and Governance (ESG) dalam Pemberian Dukungan Pemerintah Proyek KPBU		
Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
a. Kondisi pandemi dan ancaman perubahan iklim menyebabkan peningkatan *awareness* global untuk bergerak ke arah pembangunan yang lebih memperhatikan aspek lingkungan dan sosial; b. Pergeseran prioritas investor untuk menanamkan dananya ke dalam investasi yang lebih hijau; c. Kedudukan Indonesia sebagai Presidensi G20 yang mengusulkan agenda pembahasan pembangunan *sustainable infrastructure and social inclusivity* semakin mendorong Indonesia untuk memperhatikan aspek ESG dalam pengelolaan dukungan pemerintah untuk proyek yang melibatkan partisipasi swasta; d. Komitmen Indonesia untuk membatasi kenaikan suhu global rata-rata sebesar 1,5 derajat celcius	a. Peningkatan *awareness* PJPK dan stakeholder terkait terhadap implementasi aspek ESG dalam proyek yang melibatkan partisipasi swasta b. Peningkatan basis investor dan *financiers* dalam pembiayaan proyek KPBU	*Framework* ESG untuk pemberian dukungan pemerintah pada proyek KPBU	a. Peningkatan jumlah proyek KPBU yang rendah emisi dan inklusif b. Peningkatan kualitas belanja APBN c. Partisipasi dana-dana investor dan financiers yang semakin luas untuk mendukung pembiayaan inovatif
	Periode	**Risiko**	
	2022-2023	Resistensi dari pemilik proyek karena terdapat stigma: a. penerapan prinsip ESG berdampak pada peningkatan biaya b. *due diligence* yang memakan waktu yang lebih lama	
Pendukung Kesuksesan	**Key Milestones**	**Unit Pengelola**	
a. Sasaran Strategis Direktorat PDPPI berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Direktorat PDPPI Tahun 2020-2024 (dikonfirmasi) b. Komitmen PDPPI, PJPK dan *stakeholder* dalam mempertimbangkan aspek ESG dalam penyiapan proyek yang melibatkan partisipasi swasta	a. Penetapan ESG *Policy Statement* b. Penerbitan*Framework* ESG Dukungan Pemerintah bagi proyek KPBU Infrastruktur c. Implementasi ESG dalam pemberian Dukungan Pemerintah bagi proyek KPBU Infrastruktur	a. *Initiative Champion:* Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). b. *Initiative Owner:* Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). c. *Anggota Tim:* 1. DJPPR (Direktur PDPPI, Direktur PRKN, Direktur SPP) 2. BKF (Dir PKPPIM) 3. Direktur PPP- Bappenas 4. Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian LHK 5. Dirut SMVs (PT SMI, PT PII, PT IIF) 6. Unit terkait lainnya.	

23. Platform Media Analitik- Data Analitik Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	*Mendorong terciptanya Sistem Kehumasan Kementerian Keuangan yang kolaboratif dan modern melalui pemanfaatan data analitik*

Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
a. Dinamika lingkungan kehumasan yang memerlukan antisipasi dan respon yang cepat akurat b. Dinamika lingkungan kehumasan yang memerlukan antisipasi dan respon yang cepat akurat c. Belum adanya sistem integrasi dan kolaborasi fungsi kehumasan seluruh Unit Eselon I yang saling berinteraksi dan menjadi dalam satu database yang sama. d. Belum adanya sistem yang mampu menilai dan memberikan rekomendasi tingkat partisipasi masyarakat terkait suatu kebijakan yang diambil oleh Kementerian Keuangan. e. Perlu dukungan sistem untuk penguatan strategi komunikasi yang orkestratif (Kemenkeu-wide) berbasis informasi yang timely dan akurat	a. Pemanfaatan API Digivla untuk Modul Manajemen Isu dan Modul Profiling; b. Sistem kolaborasi fungsi kehumasan Kementerian Keuangan; c. Melakukan *benchmark best practice* industri *Public Relation.*	a. Metode pengumpulan berita online; b. Database berita online; c. Modul Manajemen Isu Pada Aplikasi Eksis; d. Modul profiling orang/stakeholder kehumasan Pada Aplikasi Eksis; e. Dashboard informasi terkait hasil pengolahan data dan informasi serta aktivitas kehumasan; f. Rekomendasi strategi komunikasi.	a. Sistem Informasi Kehumasan Kementerian Keuangan yang lebih efektif dan efisien; b. Meningkatnya kepercayaan publik kepada Kementerian Keuangan; c. Implementasi kebijakan fiskal yang lebih berdampak luas dan efektif.

Pendukung Kesuksesan	**Periode**	**Risiko**
a. Dukungan pimpinan; b. Dukungan *squad team* kehumasan; c. Operator Kanal Kemenkeu & insan kehumasan setiap UE1; d. Ketersediaan anggaran.	*2022* **Key Milestones** a. Pemahaman Proses Bisnis kehumasan mengenai media analitik; b. Penyiapan data untuk pengembangan platform model media analitik; c. Pengembangan model media analitik dan evaluasi.	a. Adanya Penyesuaian regulasi; b. Adanya Pembenahan Sumber Daya Manusia; c. Resistensi pemenuhan aliran data yang digunakan secara bersama-sama; d. Resistensi terhadap penerapan aplikasi tambahan. **Unit Pengelola** *a.Initiative Champion:* Sekretaris Jenderal *b.Initiative Owner:* Seluruh Pejabat Eselon I c.Anggota Tim: 1.SETJEN (Karo KLI, Pusintek); 2.ITJEN (IR VII, IBI); 3.BPPK (Kapus KU); 4. PMO UE I/Non;

24. Optimalisasi BMN Kemenkeu Versi 2 - Data Analitik Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Pemanfaatan data analitik dalam rangka optimalisasi BMN Kementerian Keuangan	
Latar belakang	**Terobosan**	**Output**
a. Adanya potensi optimalisasi BMN Kementerian Keuangan b. Terdapat ruang harmonisasi terkait implementasi aplikasi e-Sewa BMN c. Belum tersedia informasi yang memadai untuk menentukan rencana jenis sewa yang akan dipilih d. Belum tersedia informasi yang memadai untuk menentukan rencana usulan nilai sewa (Rupiah) yang akan diajukan	a. Pengembangan mesin crawling data Google dan Media Sosial b. Pemanfaatan data Rencana Pemanfaatan dari aplikasi e-RP4 c. Pemanfaatan data sewa BMN dari aplikasi e-Sewa BMN d. Pemanfaatan data nilai sewa BMN	Sistem rekomendasi optimalisasi BMN Kementerian Keuangan versi 2, visualisasi kondisi pemanfaatan BMN Kementerian Keuangan, peta lokasi BMN yang berpotensi dioptimalkan
		Outcomes
		Optimalisasi utilisasi BMN Kemenkeu
	Periode	
	2022	**Risiko**
		a. Ketersediaan data histori pemanfaatan yang tidak memadai b. Ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak c. Ketersediaan biaya untuk memanfaatkan data Google dan Media Sosial (Twitter) d. Kemampuan SDM terkait DA yang belum merata e. Pemanfaatan aplikasi e-Sewa BMN yang belum sesuai ekspektasi
Pendukung Kesuksesan	**Key Milestones**	**Unit Pengelola**
a. Komitmen internal Kemenkeu. b. *Change Management* dan Sosialisasi yang intensif ke UE I. c. Kualitas SDM terkait DA termasuk strategi regenerasi/suksesi. d. Data *awareness*.	a. Tool crawling data Google dan Media Sosial terkait penyelenggaraan event b. Visualiasasi tren penyelenggaraan event c. Model Rekomendasi Rencana Usulan Nilai Sewa	a. *Initiative Champion*: Sekretaris Jenderal b. *Initiative Owner*: Sekretaris Jenderal c. Anggota Tim: 1. SETJEN (Karo Madan, Ka. Pusintek, Chief CTO); 2. DJKN (Direktur Penilaian); 3. Seluruh Unit Pengelola Aset pada UE I/Non;

25. Pengembangan Dasbor *Profiling* Kemenkeu Untuk Meningkatkan Kapasitas Pengawasan Internal - Data Analitik Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Tersedianya perangkat pendukung kegiatan pengendalian dan pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangan yang berbasis risiko dalam rangka implementasi kerangka kerja integritas melalui kegiatan pencegahan, deteksi, respon, monitoring Kemenkeu dalam bentuk Dashboard Profiling.

Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
a. Perangkat-perangkat yang ada untuk mendukung implementasi Kerangka Kerja Integritas Kementerian Keuangan serta kegiatan pengawasan dan pengendalian Kementerian Keuangan melalui masih belum terintegrasi secara optimal. b. Penggunaan data analitik dalam membuat keputusan mengingat adanya peningkatan jumlah data yang signifikan di Kementerian Keuangan sebagai implementasi business process based on data driven.	Penggunaan data analytic untuk menentukan profil risiko pegawai dan unit yang berdasarkan dari data yang terintegrasi sebagai tulang punggung pelaksanaan Kerangka Kerja Integritas, pengendalian serta pengawasan di lingkungan Kemenkeu	a. Metode penentuan tingkat risiko pegawai serta unit kerja berdasarkan analytic-based-profiling b. Aplikasi yang mengintegrasikan data dan informasi serta *early warning system* untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan secara komprehensif	Optimalisasi penerapan kerangka kerja integritas oleh semua lini.

Pendukung Kesuksesan	**Periode**	**Risiko**
a. Dukungan pimpinan, dari level eksekutif hingga ke level manajerial b. Dukungan dari unit proses bisnis maupun unit pengawasan c. Kelengkapan dan kualitas data d. Akses terhadap data e. Tata Kelola dan keamanan data f. Teknologi yang mendukung g. Ketersediaan anggaran	2022-2023	a. Resistensi dari UE1, eksternal terkait dalam mengalirkan data dan/atau memberikan akses terhadap dashboard tertentu. b. Kesalahan pengambilan keputusan karena kualitas data yang rendah
	Key Milestones	**Unit Pengelola**
	a. Pemahaman proses bisnis dan identifikasi data b. Koordinasi kepada pihak terkait integrasi c. Data analytics d. Integrasi hasil DA e. Penyusunan kriteria penentuan tingkat risiko f. Pemanfaatan dan penggunaan Dashboard	Initiative Champion: Inspektorat Jenderal Initiative Owner: Inspektur Jenderal Anggota Tim: 1. Itjen (Inspektur Bidang Investigasi dan seluruh Inspektur serta Ses Itjen) 2. Seluruh unit eselon II pada UE-1 3. CIO, CDMO

26. Data Analitik Rekomendasi *Expert Locator*/Penyusun Aset Intelektual - Data Analitik Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Pemanfaatan data analytics untuk memberikan rekomendasi kepada pelaku manajemen pengetahuan dalam memilih pegawai dengan expertise tertentu, untuk memenuhi kebutuhan penyusunan aset intelektual pada *Knowledge Management System*

Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 226.011/2019 tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan b. Telah dilakukan pengembangan *Knowledge Management System* pada tahun 2020 berdasarkan peraturan manajemen pengetahuan c. Kebutuhan pemenuhan *helpdesk* permintaan pengetahuan yang masuk ke pelaku manajemen pengetahuan d. Kebutuhan *expert locator* pada upaya pemberian penugasan oleh pelaku manajemen pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan penyusunan aset	a. Pemanfaatan *data analytic* b. Penggunaan *machine learning* untuk menggantikan tugas penunjukan expertise c. Penggunaan *machine learning* untuk filtering peminatan pengetahuan dari permintaan pengguna	Tersedianya fitur "Rekomendasi *expert*" berisi data expertise (pegawai dengan keahlian tertentu) secara otomatis untuk mendukung pemberian tugas pelaku manajemen pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan penyusunan aset intelektual.	a. efisien dan tepat sasaran dalam menentukan *expertise* b. keterlibatan pengguna semakin tinggi karena kecepatan dan ketepatan pelayanan dalam pemilihan *expert* c. tumbuhnya budaya *sharing knowledge*

Periode	**Risiko**
2022	a. Infrasftruktur yang kurang memadai dalam *research, development, and deployment* mengingat DA membutuhkan spesifikasi resource yg tinggi b. Keterbatasan akses *data-lake* dalam hal *debugging* atau *updating* sistem

Pendukung Kesuksesan	**Key Milestones**	Unit Pengelola
a. Dukungan SDM yg cukup dan berkapasitas dalam mengeksplorasi dan research terkait perkembangan *Data Analytic* pada saat ini b. Manajemen waktu yang baik untuk research dan development c. Dukungan pimpinan dalam manajemen dan monitoring beban kerja pengembang *Data Analytic* d. Dukungan kebutuhan infrastruktur, baik *assessment*, server, maupun data center e. Dukungan kebutuhan data di lingkungan Kementerian Keuangan	a. Pemahaman bisnis dan eskplorasi data b. Penyiapan data untuk modeling c. Pengembangan model dan visualisasi *d. Deployment*	**Initiative Champion**: Kepala BPPK **Initiative Owner**: Kepala BPPK **Anggota Tim:** 1. BPPK (Sekretaris Badan, Para Kepala Pusdiklat) 2. Unit Eselon I/Non-eselon (Sekretaris)

27. Data Analitik Dana Desa - Data Analitik Tema Fiskal

Tujuan Inisiatif	Membetuk sistem semi-otomasi evaluasi program dana desa dengan memanfaatkan data administrasi dan data survey, serta metodologi yang telah dibangun.

Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
Kebijakan Dana Desa telah berjalan sejak 2015 dengan alokasi yang cenderung meningkat. Penelitian telah dibangun sejak tahun 2018 dan 2021 dengan memanfaatkan data besar dan komprehensif serta metodologi yang telah dibentuk Semi-otomasi diperlukan untuk memberikan informasi tepat waktu	a. Penggabungan Data Administratif dan Data Survey Terintegrasi b. Modelling Web Based Yang Mudah Digunakan c. Pengembangan dashboard continuity hasil riset dalam penggunaan bersama	a. Database Web Based Terintegrasi Data Administratif dan Survey Terkait Dana Desa b. Dashboard Evaluasi Dana Desa Semi-Automatic c. Peta Wilayah Output Dalam Perencanaan Dana Desa d. Rekomendasi Kebijakan	Kebijakan Dana Desa Berbasis Data, Lebih terarah, Implementasi TKDD Lebih Efektif.

Pendukung Kesuksesan	**Periode**	**Risiko**
a. Dukungan Pimpinan b. Ketersediaan Data (Administrasi dan Survey) c. Sumber Daya Manusia (Data Analyst dan Programmer) d. Ketersediaan Dana.	2022	Pemahaman dan awareness tim dan/atau klien dalam pembangunan aplikasi, Adanya isu kerahasiaan data, Konflik prioritas kegiatan dengan IS lainnya, Beban kerja yang tidak seimbang
	Key Milestones	**Unit Pengelola**
	a. Koordinasi Antar Stake Holder. b. Persiapan Database. c. Migrasi dan Integrasi Database Dan Code Berbasis Web. d. Pembentukan Sistem Evaluasi Dana Desa Semi Otomasi Pemanfaatan model evaluasi dana desa semi-otomasi	**Initiative Champion**: Badan Kebijakan Fiskal. Kriteria Menteri Keuangan dan/atau Wakil Menteri Keuangan sebagai Initiative Champion: bersifat lintas K/L dan/atau akan menjadi rujukan kebijakan nasional. **Initiative Owner**: Kepala Badan Kebijakan Fiskal. **Anggota Tim:** CTO, PKN STAN, DJPB, DJPK, dan Konsultan Bidang Teknologi.

28. Data Analitik Pengembangan Dasbor Makro Finansial - Data Analitik Tema Fiskal

Tujuan Inisiatif	Menyiapkan sistem peringatan dini bagi ekonomi makro dan/atau stabilitas sektor keuangan

Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
a. Integrasi sistem keuangan internasional membawa peluang dan tantangan bagi ekonomi Indonesia b. Krisis ekonomi atau keuangan di suatu negara dapat menjalar ke negara lain c. Kebijakan moneter the Fed perlu mendapatkan perhatian serius dan respons kebijakan yang tepat dari otoritas moneter dan fiskal di Indonesia d. Integrasi Finansial dan Rambatan yang Semakin Cepat. Beberapa isu makrofinansial muncul dalam *turnover* yang cepat	Integrasi data yang dibutuhkan dalam pengelolaan pemantauan makrofinansial	Tersedia dasbor makro finansial yang berisi alert atas kondisi ekonomi domestik dan global	a. Tersedianya deteksi dini yang dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan b. Peningkatan akurasi atas penyusunan rekomendasi makro finansial oleh analis c. Kecepatan pengambilan keputusan bagi pimpinan

Pendukung Kesuksesan	**Periode**	**Risiko**
a. Dukungan pimpinan b. Langganan Bloomberg maupun CEIC yang dapat dihubungkan dengan API Tableau c. Beberapa data lain terkait fintech belum tersedia dan perlu langganan Statista. d. Dukungan infrastruktur software Tableau Desktop. e. Workshop Sumber Daya Manusia BKF dalam melakukan olah data kuantitatif maupun visualisasi data.	2022	Ketidaktersediaan data, dukungan anggaran, software, maupun kapasitas SDM.
	Key Milestones	**Unit Pengelola**
	a. Workshop dasbor b. Penyusunan dasbor	**Initiative Champion**: Kepala Badan Kebijakan Fiskal **Initiative Owner**: Kepala Badan Kebijakan Fiskal **Anggota Tim:** BKF (Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Sekretaris BKF)

29. Peta Risiko Kepatuhan Wajib Pajak Terintegrasi Berdasarkan Empat Pilar Kepatuhan - Data Analitik Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Membentuk mesin risiko kepatuhan wajib pajak yang terintegrasi untuk seluruh proses bisnis perpjakan di DJP.

Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
a. Masih terpisahnya beberapa peta risiko pada masing-masing proses bisnis yang berbeda membuat gambaran profil risiko Wajib Pajak tidak komprehensif. b. Dengan diagregasikannya seluruh model risiko kepatuhan yang ada, diharapkan dapat membentuk suatu profil risiko yang utuh dari seluruh Wajib Pajak yang dapat digunakan oleh seluruh proses bisnis perpajakan DJP.	a. Integrasi mesin risiko CRM untuk menghasilkan CRM integrasi yang komprehensif untuk seluruh proses bisnis perpajakan. b. Pendekatan metode machine learning baru dalam mengestimasi risiko ketidakpatuhan inherent Wajib Pajak baik risiko yang bersifat umum (general risk) maupun risiko-risiko tertentu (specific risk).	Terbentuknya peta risiko kepatuhan Wajib Pajak secara **terintegrasi** berdasarkan 4 (empat) pilar kepatuhan, yaitu pendaftaran, pelaporan tepat waktu, pembayaran, dan pelaporan dengan benar sebagai acuan dalam pelaksanaan seluruh proses bisnis perpajakan terhadap Wajib Pajak.	Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak secara sustainable yang berdampak positif pada penerimaan pajak.

Pendukung Kesuksesan	**Periode**	**Risiko**
a. Dukungan dan komitmen pimpinan, pegawai, dan seluruh stakeholders. b. Momentum pembaruan sistem inti perpajakan c. Pembangunan dan peningkatan kapasitas SDM, basis data, serta infrastruktur TI yang andal	*2022*	a. Ketidaktersediaan data dari pihak terkait b. Ketidaksiapan infrastruktur TI dalam pengembangan data analytic c. Ketidaksiapan proses data analytics tool pada risk register dengan tingkat kesulitan tinggi
	Key Milestones	**Unit Pengelola**
	a. Penyusunan Risk Register b. Ekslporasi dan penyiapan data c. Pembentukan modelling d. Pengembangan User Interface e. Uji Coba f. Deployment	**Initiative Champion**: Direktur Jenderal Pajak **Initiative Owner**: Direktur Jenderal Pajak **Anggota Tim:** DJP (Dir DIP, Dir TIK, Dir TPB, Tim PSIAP)

30. Data Analitik Atas Seluruh Jenis Data Keuangan pada Aplikasi Profil WP Berbasis Web (Approweb) - Data Analitik Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dengan memanfaatkan *data analytics*.

Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
a. Kebutuhan akan *Data Analytics Tools* yang dapat menguji kepatuhan Wajib Pajak dengan pemanfaatan data internal dan eksternal khususnya Data Keuangan. b. Mendukung kelancaran pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela yang tercantum dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.	Adanya penyandingan data baru dalam bentuk *use-case* di *Data Analytics Tools* yang dapat digunakan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak *yang fokus ke Data Keuangan.*	Pengawasan Wajib Pajak berbasis web dari pemanfaatan seluruh jenis data keuangan yang belum dimanfaatkan di Approweb.	a. Optimalisasi penerimaan negara. b. Peningkatan kepatuhan wajib pajak. c. Partisipasi Aktif WP dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Pendukung Kesuksesan	**Periode**	**Risiko**
a. Dukungan dan komitmen pimpinan, pegawai, dan seluruh *stakeholders*. b. Pembangunan dan peningkatan kapasitas SDM, basis data, serta infrastruktur TI yang andal. c. Peningkatan kontribusi penerimaan dari WP dan partisipasi aktif WP dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS).	1 Januari s.d. 31 Desember 2022.	a. Ketersediaan data dari pihak eksternal (Lembaga Jasa Keuangan) dan data internal (SPT Tahunan PPh). b. Kesiapan infrastruktur TI dalam pengembangan *data analytics*.
	Key Milestones	**Unit Pengelola**
	a. Pemahaman proses bisnis dan data. b. Penyusunan desain dan *modelling* serta uji *script* pembentukan data. c. Pembentukan data di lingkungan *production*. d. Penjaminan mutu dan karantina data. e. *Deployment* hasil *data analytics* pada APPROWEB.	a. *Initiative Champion*: Direktur Jenderal Pajak. b. *Initiative Owner*: Direktur Jenderal Pajak. c. Anggota Tim: DJP (Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP), Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP), Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK))

31. Analitik Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Pajak dan Otomasi Distribusi Rencana Penerimaan Pajak - Data Analitik Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Membentuk prognosa penerimaan pajak dari analitik data berikut otomasi distribusi penerimaan pajak

Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
a. Sumber penerimaan pajak dapat digolongkan menjadi dua bagian utama yaitu penerimaan pajak yang bersifat rutin (voluntary payment) dan effort. Selain itu juga terdapat penerimaan yang bersifat determinant, dimana penerimaan yang targetnya ditentukan sendiri, yaitu Pajak Ditanggung Pemerintah, PPN atas BBM Subsidi dan PPh Migas. b. Panjangnya alur kerja distribusi penerimaan mengakibatkan cukup lamanya target penerimaan dapat didistribusikan. Selain itu terdapat kendala berupa belum standarnya usulan target penerimaan dari kantor wilayah. c. Oleh karena itu perlu dibuat analitik yang dapat mempermudah dan mempercepat proses distribusi berikut simulasi distribusinya	Digitalisasi dan otomasi pekerjaan	Aplikasi simulasi hasil analitik dan apliksai distribusi rencana penerimaan	Peningkatan keakuratan hasil pekerjaan dan efisiensi waktu kerja

Periode	**Risiko**
2022	a. Ketersediaan data pendukung dalam bentuk digital yang menyebabkan model tidak bisa dijalankan

Pendukung Kesuksesan	**Key Milestones**	**Unit Pengelola**
a. Dukungan dan komitmen pimpinan, pegawai, dan seluruh stakeholders. b. Momentum pembaruan sistem inti perpajakan c. Pembangunan dan peningkatan kapasitas SDM, basis data, serta infrastruktur TI yang andal	a. Bussiness understanding b. Pengumpulan data c. Pembangunan model prognosis d. Pembangunan simulasi distribusi e. Pembangunan aplikasi simulasi prognosis dan distribusi rencana penerimaan f. Deployment g. Evaluasi	**Initiative Champion**: Direktur Jenderal Pajak **Initiative Owner**: Direktur Jenderal Pajak **Anggota Tim:** Anggota Tim: DJP (Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP), Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK))

32. Manajemen Risiko Surat Keterangan Asal (SKA) dan Deklarasi Asal Barang (DAB) - Data Analitik Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Terciptanya sistem manajemen risiko yang mampu mendukung Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan penelitian atas Surat Keterangan Asal (SKA) dan Deklarasi Asal Barang (DAB) sehingga dapat mencegah penyalahgunaan tarif bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
1. Jumlah FTA yang terus bertambah dan memunculkan bentuk-bentuk ketentuan yang semakin beragam menjadi tantangan tersendiri bagi pejabat Bea dan Cukai. 2. Kesepakatan-kesepakatan antarnegara dalam FTA yang baru cenderung semakin *less restrictive* sehingga berpotensi merugikan negara apabila tidak diimplementasikan dengan benar. 3. Dibutuhkan adanya sistem manajemen risiko yang mampu mendukung Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan penelitian dan menetapkan putusan atas pemberian tarif preferensi	*Additional database* sebagai tambahan sumber informasi pembanding dalam rangka memvalidasi dan menilai risiko suatu SKA atau DAB yang mendukung pemanfaatan data internal DJBC dan data SKA *electronic form* **Periode** *2022*	a. Terbentuknya sistem validasi terhadap elemen-elemen risiko yang dapat terdeteksi sejak tahap pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor. b. Terbentuknya *alert system* atas setiap SKA dan DAB pada sistem komputerisasi pabean.	a. Pelaksanaan pengawasan yang lebih efektif dengan meningkatkan kualitas penetapan Pejabat Bea dan Cukai. b. Peningkatan kepatuhan pengguna jasa. c. Optimalisasi penerimaan negara.

Pendukung Kesuksesan	**Key Milestones**	**Risiko**
a. Komitmen dan dukungan pimpinan, pegawai, dan seluruh *stakeholder.* b. Sinergi antar-unit internal dan eksternal. c. Dukungan sumber daya yang memadai (SDM, anggaran, dan dukungan teknis). d. Basis data yang andal dan terintegrasi (data internal DJBC, data SKA *electronic form,* dan *additional database*). e. Pembobotan nilai risiko yang tepat dan terukur.	1. Mempersiapkan SDM yang kompeten dalam membangun *modelling* 2. Mengidentifikasi risiko melalui konsultasi dengan unit terkait dan merumuskan pembobotan nilai atas elemen risiko yang telah teridentifikasi 3. Menyusun design awal dari sistem validasi dan *alert system* 4. Mengumpulkan dan menyusun *additional database* yang akan digunakan sebagai tambahan sumber informasi pembanding. 5. Mengembangkan sistem, *modelling,* dan visualisasi. 6. *Piloting* 7. Internalisasi.	a. Sumber data tidak tersedia, tidak lengkap, dan tidak akurat. b. Pembobotan nilai risiko yang tidak tepat dan tidak terukur. c. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, maupun dukungan teknis berupa perangkat *hardware/software.* **Unit Pengelola** Initiative Champion: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Initiative Owner: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anggota Tim: 1. DJBC(Dir KSIKC, Dir IKC, Dir. Audit, Dir. Teknis Kepabeanan, Dir. Fasilitas Kepabeanan, Dir. Teknis dan Fasilitas Cukai, Dir. P2, Sekretaris DJBC) 2. LNSW (Sekretaris LNSW)

33. Smart PCC (Sistem Manajemen Analisis dan Risiko Targeting Post Clearance) - Data Analitik Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Mewujudkan pengawasan *post-clearance* kepabeanan dan cukai yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat Mendeteksi kebocoran penerimaan negara, Mengoptimalkan tambahan penerimaan negara (*Extra Effort*), Meningkatkan kepatuhan Pengguna Jasa

Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
a. Volume data dalam pengawasan *post clearance* sangat besar b. Terdapat keterbatasan Sumber daya (sumber daya manusia, waktu, teknologi, dan anggaran) sehingga pengawasan post clearance dilaksanakan berdasarkan manajemen risiko yang dalam pelaksanaannya belum didukung oleh *tools* penilaian risiko yang komprehensif dan terintegrasi. c. Diperlukan tools penilaian risiko yang komprehensif dan terintegrasi untuk penguatan kegiatan pengawasan *post*	Pengembangan SMART PCC melalui proses analitik dan ekonometrika yang dimanfaatkan dalam penilaian dan kuantifikasi risiko kepabeanan dan cukai, pemetaan entitas berdasarkan tingkat risiko kepatuhan dan kontribusi terhadap penerimaan negara, serta pemetaan komoditas (hs code) berdasarkan tingkat risiko pelanggaran dan dampak atas risiko.	Terbentuknya SMART PCC sebagai sistem analisis yang terintegrasi dan koprehensif.	a. Optimalisasi penerimaan negara. b. Pelaksanaan pengawasan yang lebih efektif. c. Pelaksanaan pengawasan yang lebih efisien. d. Pelaksanaan targeting pengawasan post clearance yang transparan. e. Peningkatan kepatuhan pengguna jasa

Pendukung Kesuksesan	**Periode**	**Risiko**
a. Pemahaman konsep inisiatif strategi dan dukungan unsur pimpinan b. Ketersediaan sumber daya (sumber daya manusia, anggaran dan dukungan teknis) c. Sinergi dari antar unit internal dan eksternal.	*2022*	a. Akurasi dan *completeness* data b. Kurangnya pemahaman dan dukungan unsur pimpinan c. Keterbatasan dukungan teknis berupa penyedian perangkat (hardware/software) dalam penyusunan inisiatif strategis ini

Key Milestones	**Unit Pengelola**
a. Melakukan evaluasi di lapangan (business understanding) dan eksplorasi data b. Mengidentifikasi data c. Memproses, ekstrak dan cleansing data d. Penyiapan SDM yang kompeten dalam membangun machine learning dan visualisasi data e. Menyusun modelling f. Mengembangkan visualisasi g. Melaksanakan deploy visualisasi pada sistem komputerisasi pabean.	Initiative Champion: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Initiative Owner: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anggota Tim: 1. DJBC (Dir Teknis Kepabeanan, Dir Fasilitas Kepabeanan, Dir. Teknis dan Fasilitas Cukai, Dir KIAL, Dir. P2, Sekretaris DJBC, 2. LNSW (Sekretaris LNSW)

34. Pengawasan Berbasis Data Analitik untuk Optimalisasi PNPB Minerba - Data Analitik Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Peningkatan kepatuhan wajib bayar dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dengan memanfaatkan *data analytics*.

Latar Belakang

a. Amanat Pasal 46 UU No 9 Tahun 2018 tentang PNBP, Menteri Keuangan diminta untuk melakukan pengawasan PNBP.
b. Kebutuhan akan *Data Analytics Tools* yang dapat menguji kepatuhan WB dengan pemanfaatan data internal dan eksternal.
c. Besarnya jumlah WB PNBP sehingga dibutuhkan suatu *tools* yang cepat dan massif, untuk dapat menemukan indikasi potensi kurang bayar PNBP.
d. Tata niaga sektor minerba sangat bervariasi sehingga dibutuhkan data analitikal berupa keterhubungan transaksi setiap entitas (spider web), untuk menguji kebenaran transaksi.

Pendukung Kesuksesan

a. Dukungan dan komitmen pimpinan, pegawai, dan seluruh *stakeholders*.
b. Pembangunan dan peningkatan kapasitas SDM, basis data, serta infrastruktur TI yang andal dan terintegrasi.

Terobosan

a. Terciptanya Peta Risiko Kepatuhan WB dan penyandingan data dalam bentuk *use-case* di *Data Analytics Tools* yang dapat digunakan dalam menguji kepatuhan WB.
b. Pemanfaatan data untuk kinerja ekspor, domestik, dan dampak kebijakan melalui optimalisasi *data analytics*, statistika dan teknologi informasi
c. *Analytics tools* pengawasan Komoditi Mineral dan Batubara.

Periode

2022

Key Milestones

2022:
1. Terbentuknya data yang valid PNBP sektor minerba
2. Tersedianya disain dan pembangunan model dan alat bantu analisis yang handal,
3. Pemanfaatan alat bantu analisis yang tepat guna.

Output

a. Terbentuknya profil WB PNBP sektor minerba
b. Tersedianya *data analytics* dalam rangka pengawasan PNBP untuk menguji kebenaran pembayaran kewajiban PNBP sektor minerba.
c. Tersedianya *dashboard* Relasi Data dan Entitas Pelaku Usaha dalam rangka mendeteksi indikasi potensi penerimaan negara dari sektor minerba.
d. Rekomendasi peningkatan kepatuhan wajib bayar dan optimalisasi penerimaan negara pada sektor minerba kepada pimpinan kementerian keuangan.

Outcomes

a. Optimalisasi penerimaan negara.
b. Peningkatan kepatuhan wajib bayar.

Risiko

a. Kesiapan kapasitas pengetahuan SDM dan infrastruktur TI dalam pembangunan *data analytics*.
b. Ketersediaan data dari K/L atau unit terkait
c. Ketersediaan anggaran dalam peralatan dan pelatihan

Unit Pengelola

a. *Initiative Champion:* Dirjen DJA dan Ka LNSW
b. *Initiative Owner:* Dirjen DJA dan Ka LNSW
c. Anggota :
1. DJA (Direktur PNBP SDA KND-, Direktur PNBP Kementerian Lembaga ,Tenaga Pengkaji PNBP)
2. LNSW (Direktur Penjaminan Mutu , Ditrektur Efisiensi Proses Bisnis, Direktur Teknologi Informasi)

35. Pengawasan PNBP Tematik K/L - Data Analitik Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Terciptanya basis data yang valid dan akurat dan metode analisis yang tepat untuk meningkatkan fungsi pengawasan tematik PNBP K/L

Latar belakang	**Terobosan**	**Output**
a. Adanya amanat UU No 9 Tahun 2018 tentang PNBP, terkait Pengawasan PNBP terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. b. Adanya kebutuhan data dan alat bantu analisis dalam mendukung pengawasan PNBP K/L.	a. Menggunakan data teknis dari K/L dan industri b. Menggunakan tools data analitik c. Menggunakan literatur terkini yang relevan dalam penyusunan basis data dan dashboard	a. Basis data tematik PNBP K/L yang valid dan akurat b. Dashboard pengawasan tematik PNBP K/L c. Rekomendasi perbaikan tata kelola PNBP K/L
		Outcomes
		a. Peningkatan fungsi pengawasan PNBP K/L b. Optimalisasi penerimaan negara. c. Peningkatan kepatuhan wajib bayar.
Pendukung Kesuksesan	**Periode**	**Risiko**
a. Dukungan dan komintmen pimpinan, pegawai dan seluruh pemangku kepentingan. b. Pembangungan dan peningkatan kapasitas SDM, basis data, serta infrastruktur TI yang handal dan terintegrasi.	*2022*	a. Kesiapan SDM dan infrastruktur TI. b. Ketersediaan data dari KL atau unit terkait. c. Ketersediaan anggaran untuk penyediaan pelatihan dan infrastruktur TI.
	Key Milestones	**Unit Pengelola**
	2022: a. Pemahaman/pemetaan probis (KL / Jenis PNBP tertentu) b. Pembentukan Data dukung pengawasan tematik PNBP K/L c. Disain, pembangunan dan ujicoba alat bantu analisis serta dashboard d. Pemanfaatan	a. Initiative Champion : Dirjen Anggaran b. Initiative Owner : Dirjen Anggaran c. Anggota Tim : 1. DJA (Direktorat PNBP KL, Direktorat Sistem Penganggaran) 2. SETJEN (Kapusintek) 3. KL terkait

36. Model Financial Advisor bagi Pemerintah Daerah berdasarkan Data Transaksi - Data Analitik Tema Belanja

Tujuan Inisiatif	Pemanfaatan *data analytics* dalam pengelolaan belanja negara yang berkualitas.

Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
a. Perlunya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pembangunan nasional. b. Pelunya informasi keuangan negara dan daerah yang akurat dan andal, termasuk untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian c. Perlunya standardisasi data keuangan daerah yang diterima Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk dapat dianalisis lebih lanjut dalam rangka mewujudkan data-driven culture.	a. Mengintegrasikan AIFA dengan aplikasi SIKD Core Versi 5. b. Menyempurnakan modul pada AIFA sesuai kebutuhan stakeholders.	a. Laporan konsolidasian tersedia lebih cepat, optimalisasi kas daerah, realokasi dan refocusing APBD b. Peningkatan partisipasi dan akses stakeholders kepada aplikasi AIFA c. Perbaikan model dan proses bisnis pada aplikasi AIFA.	a. Belanja pemda yang lebih optimal dan berkualitas. b. Data driven culture di level pemerintah pusat dan daerah.

Pendukung Kesuksesan	**Periode**	**Risiko**
a. Ketersediaan sistem informasi yang mendukung ketersediaan data. b. Kualitas SDM dalam melaksanakan data analytics belanja negara. c. Dukungan pimpinan dalam finalisasi AIFA	*2022*	a. Kualitas data yang tersedia b. Aplikasi pengelolaan keuangan di daerah yang beragam dan tidak bisa terkoneksi secara otomatis.
	Key Milestones	**Unit Pengelola**
	a. Koordinasi dengan TSIKD dan PABDIOTI b. Integrasi Dashboard AIFA dengan SIKD Core Versi 5 c. Sosilaisasi pemanfaatan AIFA, bagi pemda yang sudah bertransaksi. d. Identifikasi pemda anomaly. e. Evaluasi probis. f. Optimalisasi modul AIFA.	**Initiative Champion**: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan **Initiative Owner**: : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan **Anggota Tim:** DJPK (Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi, Sekretaris DJPK)

37. Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Data Analitik untuk Peningkatan Belanja Berkualitas - Data Analitik Tema Belanja

Tujuan Inisiatif	Pemanfaatan *data analytics* untuk meningkatkan sinergi belanja pemerintah pusat dan TKDD

Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
a. Belanja negara harus dipisahkan sesuai kewenangan (pusat dan daerah) b. Perlunya dihindari tumpang tindih pendanaan untuk output yang sama yang bersumber dari belanja negara dan belanja daerah c. Belum adanya tools yang dapat digunakan oleh DJA dan DJPK dalam menilai sinergi belanja pusat dan TKDD	a. Terciptanya data output yang dihasilkan belanja K/L (belanja pusat) dan belanja TKDD (DAK Fisik) untuk sektor yang sama	a. Peta data output yang dibiayai dari belanja pemerintah pusat dan DAK Fisik pada sektor yang sama b. Dashboard Pemantauan belanja KL dan TKDD (DAK Fisik) c. Rekomendasi penyempurnaan alokasi berdasarkan temuan	a. Peningkatan Efisiensi Alokasi Belanja Negara b. Penyempurnaan Proses Bisnis Sinergi alokasi Belanja KL dan TKDD c. Peningkatan Akurasi Alokasi APBN.

Pendukung Kesuksesan	**Periode**	**Risiko**
a. Ketersediaan sistem informasi yang mendukung ketersediaan data. b. Kualitas SDM dalam melaksanakan data analytics belanja negara. c. Tersedianya SLDK sebagai platform Pertukaran data antar unit eselon I	*2022*	a. Kualitas data yang tersedia b. Leveling data belanja pemerintah pusat dan DAK Fisik yang berbeda
	Key Milestones	**Unit Pengelola**
	a. Ketersediaan Data DAK Fisik dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran b. Penyelarasan referensi data belanja KL dan TKDD c. Kesepakatan Model Sinergi Belanja KL dan TKDD d. Pengembangan Model Sinergi dalam Dashboard data output pada level yang disepakati.	**Initiative Champion**: Dirjen Anggaran dan Dirjen Perimbangan Keuangan **Initiative Owner**: Dirjen Anggaran dan Dirjen Perimbangan Keuangan **Anggota Tim:** 1. DJA (Direktorat Abid Ekontim, Direktorat Abid PMK, Direktorat Abid Polhukhankam BABUN, Direktorat Sistem Penganggaran) 2. DJPK (Direktorat Transfer Khusus)

38. Analisis Trajektori Penarikan Pinjaman Pemerintah – Data Analitik Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

Tujuan Inisiatif	Menyusun rekomendasi alokasi penarikan pinjaman dan estimasi waktu penyelesaian proyek dengan cara menyusun benchmark berdasarkan pinjaman kegiatan yang telah diadakan sebelumnya.

Latar Belakang

a. Sebagian besar proyek didanai pinjaman luar negeri terlambat dengan nilai komitmen pinjaman belum ditarik yang tinggi. Keterlambatan berpotensi meningkatan biaya pinjaman seperti biaya komitmen dan biaya lain-lain untuk memperpanjang masa laku pinjaman.
b. Keterlambatan kegiatan dibiayai pinjaman luar negeri menyebabkan keterlambatan *delivery output* agar dapat dinikmati oleh masyarakat dan risiko keusangan teknologi. Dalam hal pinjaman luar negeri sebagai bagian dari *blended financing*, keterlambatan kegiatan dibiayai pinjaman luar negeri dapat menghambat proyek berkaitan lainnya.
c. *Overbudgeting* belanja didanai pinjaman luar negeri dalam postur APBN menimbulkan *opportunity cost* berupa alokasi *mandatory spending* yang dapat dihindarkan dan menjadi beban K/L yang melaksanakan *mandatory spending*.
d. Analisis yang dilakukan terhadap usulan perpanjangan perjanjian pinjaman dirasa belum memadai karena tingginya frekuensi perpanjangan perjanjian pinjaman ..
e. Join Monev pinjaman kegiatan yang berstatus *at risk* antara Kemenkeu dan Bappenas belum mampu memberikan *early warning* pada proyek berstatus *on schedule* yang berpotensi

Pendukung Kesuksesan

a. Dukungan pimpinan dan para pemangku kepentingan
b. Dukungan peraturan perundang-undangan dan pemilik data dalam pertukaran data yang dibutuhkan
c. Dukungan pemenuhan kompatibilitas aplikasi dan keamanan data agar dapat dihosting di Pusintek
d. Pengembangan aplikasi e-Financing DJPPR dan integrasi Modul Analisis Trajectory Penarikan Pinjaman Pemerintah

Terobosan

a. Penggunaan kriteria kuantitatif dalam menilai usulan alokasi penarikan pinjaman yang over optimistis dan over pesimistis berdasarkan *benchmark*.
b. Proyeksi biaya pinjaman berdasarkan usulan alokasi penarikan pinjaman oleh K/L secara otomatis.
c. Otomatisasi penyusunan *outlook* penarikan pinjaman kegiatan pada Tahun Anggaran Berjalan.
d. Otomatisasi perhitungan proyeksi biaya pinjaman berdasarkan usulan penarikan pinjaman kegiatan oleh Kementerian/Lembaga.
e. Akses hasil analisis dan rekomendasi melalui platform *website* berdasarkan privilege sesuai tugas dan fungsi pengguna.

Output

Modul Pengelolaan Portofolio Pinjaman

Outcomes

a. Pengalokasian penarikan pinjaman kegiatan dan *mandatory spending* yang lebih kredibel
b. Pengelolaan portofolio pinjaman yang lebih efisien
c. *Debt service* pinjaman kegiatan yang lebih efisien

Periode

2022

Risiko

a. Data uji yang dimiliki terbatas
b. Keamanan data

Key Milestones

a. Data Understanding
b. Data Preparation dan Pembuatan Model Prediksi
c. *Evaluation*
d. *Deployment* Modul Pengelolaan Portofolio Pinjaman Versi Website

Unit Pengelola

Initiative Champion: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Initiative Owner: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Anggota Tim:
1. DJPPR (Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen)
2. DJA (Direktur Sistem Penganggaran)
3. DJPb (Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktur Sistem Manajemen Investasi)
4. DJPK (Direktur Dana Transfer Khusus, Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi)

39. Analisis Kinerja Keuangan atas Penambahan PMN pada BUMN - Data Analitik Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

Tujuan Inisiatif	Mewujudkan indikator kinerja keuangan atas penambahan PMN pada BUMN.

Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
a. Selama tahun 2015-2020, Pemerintah telah memberikan tambahan PMN sebanyak 81 kali kepada BUMN dengan nilai sebesar 209,87 T. b. Untuk itu, perlu dilakukan pengukuran tingkat efektivitas penambahan PMN selama ini	a. Penyusunan metode penilaian menggunakan literatur terkini di bidang keuangan. b. Otomatisasi penilaian kinerja keuangan atas penambahan PMN pada BUMN.	a. Metode penilaian kinerja keuangan atas penambahan PMN pada BUMN. b. Kertas kerja *(spreadsheet)* penilaian kinerja keuangan atas penambahan PMN pada BUMN. c. Rekomendasi dari penilaian kinerja keuangan atas penambahan PMN pada BUMN.	a. Kebijakan investasi pemerintah yang lebih terukur dan selektif. b. Standardisasi penilaian kinerja keuangan atas penambahan PMN pada BUMN. c. Investasi pemerintah melalui penambahan PMN pada BUMN yang lebih efektif.

Pendukung Kesuksesan	**Periode**	**Risiko**
a. Dukungan dan komitmen pimpinan. b. Ketersediaan data/*tools* pendukung analisis. c. Kompetensi SDM dalam mengembangkan dan mengelola *tools*.	2022	a. Keterbatasan data yang dimiliki; b. Waktu pengerjaan dan sumber daya yang terbatas
	Key Milestones	**Unit Pengelola**
	a. Sintesis literatur terkini di bidang keuangan terkait penilaian investasi b. Pengumpulan data nilai PMN dan Laporan Kinerja Keuangan pada BUMN penerima PMN c. Pengolahan data nilai PMN dan Laporan Kinerja Keuangan pada BUMN penerima PMN d. Analisis data efektivitas PMN pada BUMN e. Rekomendasi dari penilaian kinerja keuangan atas penambahan PMN pada BUMN.	a. *Initiative Champion:* Dirjen KN b. *Initiative Owner:* Dirjen KN c. Anggota Tim: DJKN (Dir. KND)

40. Penyusunan Alat Bantu Penilaian Pemanfaatan Barang Milik Negara - Data Analitik Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

Tujuan Inisiatif	Mewujudkan Optimalisasi Pengelolan Kekayaan Negara melalui Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Metode Penilaian Sewa BMN Berbasis Data Analitik

Latar belakang	Terobosan	Output	Outcomes
Pemutakhiran penilaian memerlukan pembaruan metodologi, model, dan teknologi untuk menjamin akurasi nilai. Pengembangan daftar komponen penilaian untuk sewa BMN berupa ruang/kamar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penilaian namun tetap menyajikan nilai yang akurat dan andal, yang diperlukan dalam pengelolaan aset.	a. Otomatisasi Penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN berupa sewa ruang/kamar. b. Pemanfaatan data pembanding (benchmark) yang berasal dari *marketplace* dan pihak eksternal lainnya. c. Standardisasi metode penentuan penyesuaian/*adjustment*	1. Tersedianya Daftar Komponen Penilaian Sewa Ruang/Kamar secara otomasi berdasarkan pendekatan pasar. 2. Tersedianya aplikasi/*dashboard* Penilaian sewa ruang/kamar.	1. Tarif sewa BMN berupa ruang/kamar yang lebih mencerminkan nilai pasar dan kompetitif. 2. Optimalisasi PNBP berbasis data yang lebih akurat. 3. Efektivitas waktu penyelesaian Penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN berupa sewa ruang/kamar. 4. Penilaian yang modern, akuntabel, dan berbasis digital.

Pendukung Kesuksesan	Periode	Risiko
a. Dukungan dan komitmen pimpinan. b. Ketersediaan data pembanding (*benchmark*) sewa BMN berupa ruang/kamar melalui *marketplace,* survei, perusahaan penyewaan properti, dan pihak eksternal lainnya. c. Ketersediaan data/tools pendukung analisis. d. Kompetensi SDM dalam mengembangkan dan mengelola *tools.* e. Manajemen Perubahan mendukung transisi menuju Penilaian yang modern, akuntabel, dan berbasis digital.	2022 **Key Milestones** a. Tersedianya Buletin Teknis Penilaian sewa BMN berupa ruang/kamar. b. Tersedianya data sewa BMN berupa ruang/kamar dari *marketplace.* c. Terbentuknya model penilaian berbasis data analitik. d. Penyempurnaan regulasi di bidang Penilaian	a. Keterbatasan data yang dimiliki; b. Waktu pengerjaan dan sumber daya yang terbatas; c. *Hardware* dan *software* pendukung data analitik belum memadai; d. Adanya potensi resistensi otomatisasi Penilaian. **Unit Pengelola** a.*Initiative Champion:* Dirjen KN b.*Initiative Owner:* Dirjen KN c.Anggota Tim: 1. DJKN (Direktur Penilaian, Direktur PKNSI, Direktur BMN); 2. SETJEN (Kepala Biro Madan, Kepala Pusintek).

41. Pengembangan *Business Intelligence* Pengelolaan Likuiditas - Data Analitik Tema Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan

Tujuan Inisiatif	Penyediaan perangkat (sistem) yang memberikan fleksibilitas penyajiaan data realisasi maupun proyeksi dan menghasilkan proyeksi menggunakan pendekatan *Machine Learning* sehingga mampu memberikan input dalam pengambilan keputusan.

Latar belakang	**Terobosan**	**Output**	**Outcomes**
a. Penyajian data masih bersifat statis dan belum menjawab kebutuhan pengambilan keputusan; b. Penyusunan laporan dalam rangka mendukung pengambilan keputusan masih manual (memanfaatkan Microsoft Excel); c. Belum ada proyeksi yang disusun menggunakan pendekatan *Machine Learning* (ML).	a. Pembentukan Tim Bersama Dit. PKN dan Dit. SITP b. Pemanfaatan fungsi Machine Learning dalam penyusunan proyeksi c. Mengkonsolidasikan data proyeksi dan realisasi dalam satu data mart. d. Pemanfaatan fungsi statistik	a. Tersedianya aplikasi yang mengkonsolidasikan data realisasi dan proyeksi serta menyajikan data (laporan) dalam mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan likuiditas. b. Tersedianya *Machine Learning* dalam penyusunan proyeksi.	a. Keputusan operasional kas yang lebih efektif b. Kebijakan likuiditas yang lebih efisien c. Penguatan fungsi treasury di daerah

Pendukung Kesuksesan	**Periode**	**Risiko**
a. Pengembangan Web CPIN sebagai system penyampaian dan konsolidasi proyeksi yang disampaikan oleh Tim CPIN. b. Penyediaan data mart realisasi dan proyeksi sebagai data *feeder* yang akan digunakan dalam *Business Intelligence*. c. Pendanaan dan lelang pengadaan konsultan pengembangan. d. Keberhasilan *transfer knowledge* dari vendor ke pegawai Ditjen Perbendaharaan.	2022	a. Ketersediaan Data Proyeksi yang Di generate (Web CPIN) sebagai *feeder* data proyeksi b. Ketepatan waktu penetapan vendor c. Kesiapan dukungan SDM

Key Milestones	**Unit Pengelola**
a. Tahap persiapan pengembangan BI b. Tahap pengembangan Web CPIN c. Tahap pengembangan fungsi Learning Machine d. Tahap Pengembangan fungsi statistic e. Tahap pengembangan presentation layer f. Transfer knowledge	***Initiative Champion***: Direktur Jenderal Perbendaharaan ***Initiative Owner***: Direktur Jenderal Perbendaharaan **Anggota Tim:** DJPB (Sesditjen Perbendaharaan, Dir PKN, Dir SITP, Tim CPIN)

I. Penggunaan Piagam (*Charter*) IS Kementerian Keuangan

1. Piagam *(Charter)* dari masing-masing IS Kementerian Keuangan dijadikan acuan dalam implementasi IS Kementerian Keuangan.
2. Dengan diimplementasikannya 41 (empat puluh satu) IS Kementerian Keuangan tersebut diharapkan misi Kementerian Keuangan, yaitu: melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:
   a. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
   b. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
   c. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
   d. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
   e. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi dapat dicapai untuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang lebih baik serta Indonesia yang adil dan makmur.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 /KMK.01/2022
TENTANG
IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

20 (DUA PULUH) INISIATIF STRATEGIS PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KEMENTERIAN KEUANGAN YANG MULAI DIIMPLEMENTASIKAN SEJAK TAHUN 2017

A. Penjelasan Umum

1. Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, Kementerian Keuangan dituntut menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, untuk itu Kementerian Keuangan telah menetapkan *strategic outcome* Kementerian Keuangan yaitu "Terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan *sustainable*".
2. Dalam upaya mencapai *strategic outcomes* tersebut diperlukan langkah-langkah strategis yang diwujudkan dalam beberapa Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan.
3. Perumusan IS RBTK tersebut didasarkan pada analisa SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities,* and *threats*) untuk melihat dan mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Keuangan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.
4. Kriteria yang digunakan untuk merumuskan IS RBTK meliputi:
   a. berdampak langsung pada pencapaian *strategic outcomes* melalui optimalisasi peran Kementerian Keuangan;
   b. merupakan terobosan nasional dan memerlukan perhatian khusus Menteri Keuangan; dan
   c. memerlukan sinergi antar unit eselon I atau K/L *(Connecting the dots).*
5. *Strategic Outcomes* Kemenkeu pada prinsipnya terbagi dalam 3 (tiga) *outcomes* tematik yaitu tema penerimaan "Pendapatan negara yang optimal", tema perbendaharaan "Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel", dan tema penganggaran "Belanja Negara yang Efektif dan Efisien".
6. Untuk mewujudkan 3 (tiga) *outcomes* tematik tersebut, selain dilakukan melalui IS RBTK yang bersifat substantif juga didukung oleh IS RBTK tema sentral yang menjiwai, mensupport, dan menggerakkan pencapaian IS RBTK tema penerimaan, tema perbendaharaan, dan tema penganggaran dalam rangka pencapaian *Strategic Outcomes* Kementerian Keuangan.
7. Gambaran ringkas mengenai Peta Inisiatif-Inisiatif pada keempat tema tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

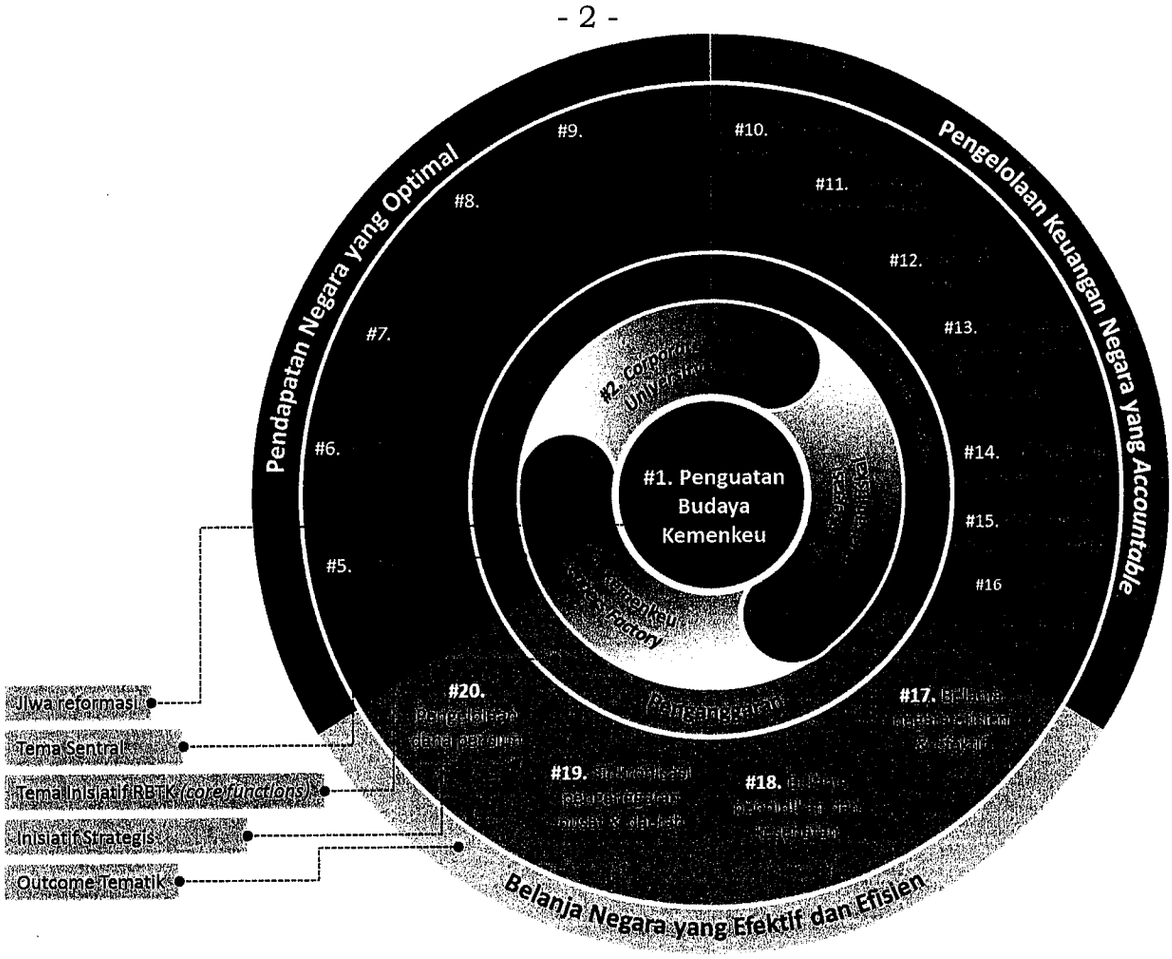

B. Tema Sentral

1. IS RBTK Tema Sentral ditujukan untuk mendukung pencapaian *outcome-outcome* pada tema penerimaan, tema penganggaran, dan tema perpajakan.
2. Tema Sentral akan menjiwai dan menjadi penggerak ketiga tema lainnya.
3. Adapun IS RBTK Tema Sentral terdiri atas 4 (empat) Inisiatif, sebagai berikut:
   a. Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan;
   b. Penyelarasan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Strategi Kemenkeu melalui *Corporate University*;
   c. Optimalisasi Kemenkeu *Leaders Factory* untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang kredibel; dan
   d. Integrasi Perumusan Kebijakan Fiskal.

C. Tema Penerimaan

1. IS RBTK Tema Penerimaan ditujukan untuk mencapai *outcome* "Pendapatan Negara yang Optimal" baik dari bidang Pajak, Kepabeanan, Cukai, maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak.
2. Adapun IS RBTK Tema Penerimaan terdiri atas 5 (lima) Inisiatif, sebagai berikut:
   a. Pengamanan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah;
   b. Modernisasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak;
   c. *Joint Program* Optimalisasi Penerimaan;
   d. Pembangunan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa Terintegrasi untuk Optimalisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai; dan
   e. Optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak.

D. Tema Perbendaharaan

1. IS RBTK Tema Perbendaharaan ditujukan untuk mencapai *outcome* "Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel" baik di bidang pengelolaan kas negara, pembiayaan, dan kekayaan negara.
2. Adapun IS RBTK Tema Penganggaran terdiri atas 7 (tujuh) Inisiatif, sebagai berikut:
   a. Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern, Efisien, dan Terintegrasi;
   b. Pengelolaan Likuiditas Keuangan Negara dengan Instrumen Keuangan Modern;
   c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dengan Pengembangan Jalur Distribusi Surat Berharga Negara Ritel secara *Online*;
   d. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan Penjaminan Obligasi;
   e. Pemberdayaan Aset untuk Mendorong Perekonomian Nasional;
   f. Optimalisasi Investasi Pemerintah untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan; dan
   g. Sinergi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara dan Implementasi Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara) (*Internal Control Over Financial Reporting* – ICOFR).

E. Tema Penganggaran

1. IS RBTK Tema Penganggaran ditujukan untuk mencapai *outcome* "Belanja Negara yang efektif dan efisien" baik pada belanja pemerintah pusat maupun pada belanja transfer ke daerah.
2. Adapun IS RBTK Tema Penganggaran terdiri atas 4 (empat) Inisiatif, sebagai berikut:
   a. Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Berkualitas melalui Efisiensi dan Efektifitas Belanja Negara;
   b. Perbaikan Kualitas Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Standar Kesehatan Masyarakat;
   c. Sinkronisasi Penganggaran Pusat dan Daerah; dan
   d. Optimalisasi kebijakan penganggaran terkait pengelolaan program pensiun.

F. Piagam (*Charter*) IS RBTK

Gambaran detil 20 (dua puluh) IS RBTK sebagaimana dimaksud pada huruf B sampai dengan huruf E tercantum pada masing-masing piagam (*charter)* IS RBTK sebagai berikut:

1. Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Mewujudkan perbaikan budaya organisasi Kementerian Keuangan guna mendorong reformasi birokrasi dan menjadi *branding* Kemenkeu secara nasional melalui pengelolaan APBN yang kredibel, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Latar belakang

a. Program budaya saat ini:
   1) Program budaya Kemenkeu sudah dimulai melalui KMK 127/KMK.01/2013 namun belum dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan;
   2) KMK 312/2011 tentang nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Perilaku Utama belum terinternalisasi dan terimplementasikan dengan baik;
   3) Implementasi pelestarian nilai-nilai Kemenkeu masih menghadapi tantangan;
b. Masih perlunya dorongan untuk perubahan mindset, pola kerja dan spirit dalam pelaksanaan tugas;
c. Adanya aturan yang mendukung perilaku inefisiensi keuangan negara.

Pendukung Kesuksesan

a. Dukungan pimpinan untuk:
   1) Memberikan contoh dan dorongan perbaikan budaya kepada pegawai
   2) Persetujuan penguatan UKI
b. Change Agent Kemenkeu
c. Program engagement untuk pegawai baru

Terobosan

a. Menetapkan kebijakan efisiensi birokasi sebagai trigger perubahan budaya.
b. Menetapkan budaya Kemenkeu serta menjadikan budaya Kemenkeu sebagai *branding* perubahan budaya di lingkungan Pemerintahan.
c. Budaya Kemenkeu mendorong kebijakan efisiensi belanja Negara dan sinergi nasional antar instansi pemerintah.

Milestones

a. 2017-2018: Revitalisasi Program Budaya Kemenkeu
   1. Penetapan kebijakan efisiensi birokrasi Kemenkeu.
   2. Diagnostik Budaya: *Assessment current culture*
   3. Penetapan program budaya baru Kemenkeu:
      a) *Leadership role model*
      b) *Rebranding* values Kementerian Keuangan
      c) Penguatan implementasi kode etik pegawai
      d) Internalisasi budaya dalam perilaku (stakeholder internal dan eksternal)
   4. Review oleh UKI atas pelaksanaan efisiensi birokrasi
   5. *Integrity Framework*

b. 2018: Living the values melalui:
   1. Implementasi *culture quality management*
   2. Implementasi kebijakan efisiensi belanja
   3. Sinergi dengan program reformasi birokrasi nasional

Outcomes

a. Meningkatnya Indeks Efisiensi Birokrasi
b. Meningkatnya Nilai Pembangunan Integritas (Indeks Persepsi Korupsi)
c. Terwujudnya inspirasi program budaya Kemenkeu untuk instansi pemerintah lainnya
d. Meningkatnya Indeks Persepsi Kesehatan Organisasi (MOFIN/ SFO)
e. Meningkatnya Indeks Persepsi Publik

Risiko

a. Potensi resistensi dari Pegawai
b. Tidak terjaganya kesinambungan program budaya

Unit Pengelola

a. *Initiative Champion*: Menkeu & Wamenkeu
b. *Initiative Owner*: Seluruh Pejabat Eselon I
c. Anggota Tim:
   1) Anggota Tim Pengelola CTO
   2) Biro Organta, Biro Hukum, Biro Cankeu, Biro SDM (Setjen)
   3) DJA
   4) Sekretariat Ditjen/Itjen/Badan Unit Eselon I cq UKI UE I

2. Penguatan SDM melalui Kementerian Keuangan *Corporate University* – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang mampu mencapai target kinerja organisasi melalui proses pembelajaran yang relevan, aplikatif, mudah diakses, dan berdampak nyata (*impactful*)

Latar belakang

a. Dalam rangka mendorong perubahan organisasi, diperlukan program pengembangan SDM yang mampu mampu mentransformasikan SDM sebagai agen perubahan.
b. Pengembangan SDM belum fokus terhadap pencapaian target kinerja organisasi sehingga diperlukan strategi pengembangan SDM berbasis perencanaan strategis organisasi.
c. Dalam rangka menyelaraskan pengembangan SDM dengan perencanaan strategis organisasi, diperlukan proses bisnis pengembangan SDM yang lebih aplikatif, relevan/adaptif, mudah diakses, dan berdampak tinggi melalui penerapan *CorpU*.

Pendukung Kesuksesan

a. Ketersediaan sumber daya untuk memperbaiki sistem pengembangan SDM termasuk infrastruktur teknologi dan informasi pendukung *Knowledge Management*.
b. Perubahan paradigma dalam manajemen SDM bahwa tanggung jawab pengembangan SDM tidak hanya menjadi tugas BPPK dan unit pengembangan SDM.
c. Dukungan pimpinan dalam struktur *governance* Kementerian Keuangan *Corporate University* dalam posisi *dean, champion, coordinator* SGO, dan SGO.
d. *Linkage* antara unit yang menjalankan fungsi *strategic human capital management* dengan unit yang menjalankan fungsi *strategic learning development*.

Terobosan

a. *Knowledge Management* (KM) untuk mengoptimalkan proses pembelajaran menggantikan metode pembelajaran klasikal.
b. Implementasi *Corporate University* sebagai model *high impact* learning sebagai dukungan strategi pencapaian kinerja Kemenkeu.
c. *Corporate University* merupakan *upgrading learning process yang* bertitik tolak pada peningkatan kompetensi SDM sebagai *enabler* pencapaian sasaran strategis Kemenkeu.
d. Kemenkeu *CorpU* merupakan bentuk *CorpU* yang pertama di sektor publik di Indonesia.

Milestones

a. Tahun 2017:
1) Melakukan perbaikan mekanisme Identifikasi Kebutuhan Diklat.
2) Menyusun *Instructional System Design* (ISD).
3) Menyempurnakan evaluasi pembelajaran.
4) Menyusun pola pembelajaran untuk *critical job*.
5) Membangun KMS dan infrastruktur lainnya.
6) Membentuk *Communities of Practice* (CoP).
7) Membangun *smart classroom*.

b. Tahun 2018:
1) Menerapkan struktur *governance* Kemenkeu *CorpU sebagai learning organization*
2) Menyelaraskan (terkait regulasi) peraturan SDM yang lain guna mendukung implementasi HCM melalui *Corpu*.
3) Menetapkan *Learning Quality System*.
4) Melakukan perbaikan dalam metode penyelenggaraan pembelajaran.
5) Menginisiasi *retire faculty program* dan *leader as teacher*.
6) Membangun *Learning Organization*.

Outcomes

	2017	2018
a. *Competency Gap Index* Pegawai Kementerian Keuangan	-	3 (skala 4)
b. Ketercapaian *target* Inisiatif Strategis seluruh tema.	100%	100%
c. Ketercapaian target kinerja seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu	100%	100%

Risiko

a. Resistensi perubahan kultur dalam proses pembelajaran.
b. Ketidakselarasan antara strategi pengembangan SDM dengan strategi pembelajaran.
c. Belum semua daerah memiliki infrastruktur penunjang KM yang memadai.
d. Mitigasi :
1) *Change management program;*
2) Mewujudkan *learning organization;*
3) Menyusun mekanisme dan strategi komunikasi antar unit terkait;
4) Pengadaan infrastruktur penunjang KM.

Unit Pengelola

a. Initiative Champion: BPPK
b. Initiative Owner : BPPK
c. Tim: Biro SDM, Unit Eselon I Kemenkeu

3. Optimalisasi Kemenkeu Leaders Factory untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang kredibel – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif	Mengoptimalkan peran SDM Kementerian Keuangan sebagai *Talent / Leaders* dalam bidang keuangan negara

Latar belakang	Terobosan	Outcomes
a. Komitmen Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam mewujudkan SDM Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan kompetitif sebagai pilar ke-2 Reformasi Birokrasi b. Kementerian Keuangan perlu lebih proaktif dalam mendukung pengelolaan keuangan Negara yang kredibel di K/L/D/I dengan mengoptimalkan peran SDM Kemenkeu yang kompeten dan berintegritas tinggi.	a. Mempersiapkan grand design dan infrastruktur *leaders factory* dan mengembangkan jabatan fungsional, program *tour of duty* lintas unit b. Menempatkan *Leader* Kementerian Keuangan yang kompeten dan kompetitif untuk mengisi jabatan di Kementerian Keuangan maupun di K/L/D/I lain	a. Distribusi *Leaders* lingkup internal Kemenkeu untuk mendukung Pengelolaan Keuangan Kemenkeu yang akuntabel — **2017** 100%, **2018**, **2019** b. Tingkat kepuasan *user* unit internal Kemenkeu — 2018: 3 (skala 5); 2019: 3,5 (skala 5) c. Distribusi *Leaders* lingkup eksternal Kemenkeu untuk mendukung Pengelolaan Keuangan Negara yang akuntabel — 2018: 100% d. Tingkat kepuasan *user* unit eksternal Kemenkeu — 2019: 3 (skala 5)
Pendukung Kesuksesan	**Milestones**	**Risiko**
a. Dukungan Regulator Nasional (KASN, MenPAN, BKN, LAN) b. Perbaikan kebijakan remunerasi untuk pegawai yang ditugaskan ke K/L/D/I lain. c. Ketersediaan jumlah *kader* yang berkualitas untuk memenuhi peluang dalam mengikuti seleksi terbuka jabatan strategis di K/L/D/I Lainnya d. Peningkatan teknologi Informasi HR yang terintegrasi (HRIS)	**a. 2017:** 1. Penyusunan *Grand Design Leaders Factory.* 2. Penyiapan Infrastruktur *Leaders Factory: Talent Management, Reward Management, Leadership Framework.* 3. Pelaksanaan Program mutasi *leaders* lintas unit Eselon I Kemenkeu. 4. Implementasi jabatan fungsional. **b. 2018:** 1. *Piloting Leaders Factory* Kemenkeu (eksternal) 2. Penetapan aturan *Leaders Factory* 3. Penyiapan Infrastruktur *Leadership and Culture Academy* 4. Pelaksanaan Program mutasi leaders lintas unit Eselon I Kemenkeu	a. Berkurangnya minat *Leader* apabila ditugaskan ke K/L/D/I lainnya karena perbedaan penghasilan b. Ketidaktersediaan formasi jabatan pada saat kader kembali ke Kemenkeu. c. Tidak tersedianya jabatan kosong pada K/L/D/I lainnya **Unit Pengelola** a. *Initiative Champion*: Sekretariat Jenderal b. *Initiative Owner* : Biro SDM c. Tim: 1) Biro SDM 3) Biro Cankeu 3) DJA 2) Biro Organta 4) BPPK 4) Bagian SDM dan Ortala Eselon I Kemenkeu

4. Perumusan Kebijakan Fiskal yang Terintegrasi – Tema Sentral

Tujuan Inisiatif: Menghasilkan rumusan kebijakan fiskal dan penganggaran yang optimal sebagai dasar penyusunan APBN yang berkelanjutan dan berdampak nyata dengan tetap menjaga iklim perekonomian yang kondusif

Latar belakang

a. Perumusan kebijakan fiskal tersebar di beberapa unit eselon I dan belum mempertimbangkan sinergi antar kebijakan
b. Protokol koordinasi penyusunan kebijakan fiskal antar unit eselon I belum konsisten
c. Kebutuhan peningkatan kualitas analisis dan evaluasi atas suatu kebijakan berdasarkan *knowledge*
d. Perumusan kebijakan fiskal dan penganggaran membutuhkan pemahaman yang terintegrasi.
e. Adanya keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya di dalam postur APBN (misal: besaran penerimaan negara dengan *mandatory spending*)
f. Peningkatan pendapatan negara tidak selalu dapat digunakan untuk menambah kapasitas fiskal
g. Adanya belanja wajib amanat konstitusi (20% untuk pendidikan, DAU, DBH, Dana Otsus; dana desa; 5% untuk dana kesehatan)
h. Kebutuhan penguatan Kementerian Keuangan sebagai *interface* dengan K/L dan DPR dalam rangka penyusunan kebijakan fiskal

Pendukung Kesuksesan

a. Akses data dan informasi pada sumber-sumber tertentu di UE.1 lain
b. *Knowledge management system* yang andal
c. Kolaborasi dengan UE.1 lain
d. kewenangan menyelenggarakan penelitian dengan melibatkan UE.1 terkait
e. Pengalaman *spending review* yang telah dilaksanakan DJA dan DJPB
f. Mekanisme *reward and punishment* bagi K/L/Pemda
g. Dukungan kelembagaan: organisasi, anggaran, SDM, dan infrastruktur

Terobosan

a. Sinergi penyusunan kebijakan fiskal dan penganggaran
   1) protokol yang kuat dalam penyusunan kebijakan fiskal
   2) dokumen KEM-PPKF menjadi acuan penyusunan pagu indikatif
   3) strategi peningkatan ruang fiskal pemerintah yang memadai untuk membiayai program prioritas di bidang infrastruktur
b. Sinergi pelaksanaan *spending review* (termasuk efektivitas program *mandatory spending*) serta evaluasi besaran proporsi *mandatory spending*
c. Peningkatan kapasitas SDM melalui mutasi antar UE1 dan *secondment program*

Milestones

a. 2017
   1) Sinergi penyusunan kebijakan fiskal dan penganggaran
      a) *Refinement* protokol mengenai tata kelola perumusan kebijakan (penyusunan SOP Link, KMK sinergi penyusunan APBN) : (1) Penataan mandat perumusan kebijakan (kejelasan mandat setiap UE.1); (2) Akses data (permintaan data reguler dan spesifik); (3) Perancangan *knowledge management system*
      b) Penyusunan KEM-PPKF yang kredibel menjadi acuan penyusunan APBN Penetapan kebijakan dan standar dokumen KEM-PPKF (Keputusan bersama antara BKF, DJA, dan Bappenas)
      c) Penyusunan *roadmap* kebijakan optimalisasi penerimaan negara (termasuk *tax expenditure analysis*)
      d) Sinergi Penyempurnaan kebijakan APBN: (1) Memperkuat *Medium Term Fiscal Framework* (MTFF) sebagai instrumen *aggregate control* untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah; (2) Penambahan sumber pendapatan atau pembiayaan yang baru; (3) Strategi peningkatan ruang fiskal pemerintah yang memadai untuk membiayai program prioritas di bidang infrastruktur; dan (4) Optimalisasi Peran Indonesia pada Kerja Sama Internasional melalui peningkatan strategi pembiayaan infrastruktur, pendanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, investasi di forum kerja sama internasional, dan pemanfaatan peluang pendanaan
   2) Implementasi National Integrated *Spending Review*
      a) Penetapan pedoman & metodologi *spending review*,
      b) *Piloting* pelaksanaan *Spending review* pemerintah yang terintegrasi atas pelaksanaan APBN di Kemenkeu: (1) Kajian terkait penggunaan dana pendidikan dan dana kesehatan (2) Kajian terkait subsidi
      c) Analisis dampak penganggaran terhadap pertumbuhan sektor sebagai bagian dari *national integrated spending review*
   3) Peningkatan kapasitas SDM melalui :
      a) mutasi pegawai antar UE.1,
      b) *Secondment program* BKF dengan UE1 lain
      c) *technical asisstance*
b. 2018
   1) Implementasi protokol tata kelola perumusan kebijakan
   2) Evaluasi bersama terkait kebijakan penerimaan negara
   3) Paket kebijakan penerimaan negara
   4) Penguatan KEM PPKF
   5) Utilisasi hasil *spending review* dan strategi peningkatan ruang fiskal dalam penyusunan APBN tahun 2019/2020.
   6) Pelaksanaan *spending review* secara nasional

Outcomes

a. Kebijakan fiskal yang optimal
   1) Menjaga *sustainability* pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kriteria pada tahun 2018, sbb:
      a) Pertumbuhan ekonomi 6,1%
      b) *Tax ratio* arti sempit 11,5%
      c) Anggaran infrastruktur Rp440 T
      d) *Primary balance* positif –Rp100 T
      e) Defisit APBN terhadap PDB 2,2%
      f) *Debt to GDP ratio* 28,4%
   2) Meningkatnya ruang fiskal pemerintah dengan indikator:
      a) *Growth* belanja investasi lebih besar dari belanja konsumsi
      b) Turunnya defisit anggaran pemerintah
      c) Efisiensi belanja melalui pengurangan belanja birokrasi (honor tim, perjadin, dll)
      d) Peningkatan anggaran pendapatan negara dan hibah yang tidak terikat dengan *mandatory spending*.
b. Target penerimaan negara yang kredibel: minimalisasi deviasi antara realisasi dengan potensi penerimaan

Risiko

a. Kemungkinan adanya proses birokrasi yang lebih kompleks
b. Kemungkinan adanya *competency gap* terkait perumusan kebijakan pada fase awal implementasi
c. Rekomendasi Kajian sangat terkait dengan unit kementerian/ lembaga lainnya (potensi resistensi dari K/L).
d. Memuat unsur-unsur politis dalam kebijakan fiskal pemerintah.

Unit Pengelola

a. *Initiative Champion*: Kepala Badan Kebijakan Fiskal
b. *Initiative Owner* : Sekretariat BKF
c. Tim:
   1) BKF (PKAPBN, PKEM, PKPN, PKRB,PKPPIM);
   2) DJP (Dit PP I, Dit PP II)
   3) DJBC (Dit PPS, Dit Fasilitas Kepabeanan, Dit Teknis Kepabeanan, Dit Cukai)
   4) DJA (Dit. PNBP)
   5) DJPB (Dit PA)
   6) DJPK (Dit DAPER
   7) Setjen (Biro SDM)

5. Pengamanan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Peningkatan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bendahara

Latar belakang

a. Kepatuhan perpajakan Bendahara belum optimal;
b. *Management* data keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah belum terintegrasi;
c. Redundansi penyampaian laporan dari Pemda ke Kemenkeu.
d. Pemahaman atas perilaku kepatuhan Bendahara belum optimal.
e. Pengawasan Kepatuhan Bendahara belum efektif.

Pendukung Kesuksesan

a. Pembenahan basis data bendahara.
b. Komitmen dan kerja sama intra-Kemenkeu, Kementerian /lembaga lain, dan Pemerintah Daerah terkait.

Terobosan

a. Penyempurnaan peraturan mekanisme pemungutan dan penyetoran pajak Bendahara;
b. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Data Keuangan (SIMDK) Pemerintah Pusat dan Daerah yang terintegrasi, komprehensif, dan end-to-end; dan
c. Sinergi pengawasan internal antara Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga (APIP K/L) dan Pemerintah Daerah untuk pengawasan penerimaan pajak atas belanja pemerintah.

Milestones

a. 2017
1. Penyempurnaan peraturan terkait Bendahara dan dasar hukum baru yang diperlukan;
2. Pembangunan SIMDK Pusat dan Daerah yang terintegrasi; dan
3. Pembentukan forum asistensi dan konsultasi pengawasan penerimaan negara.

b. 2018
1. Pembentukan basis data Bendahara dan Belanja yang terpusat;
2. Penetapan Instruksi Presiden terkait pengawasan penerimaan oleh APIP K/L dan Pemerintah Daerah (termasuk pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Bendahara Umum Negara);
3. Koordinasi pelaksanaan Inpres terkait pengawasan oleh APIP K/L; dan
4. Implementasi forum asistensi dan konsultasi pengawasan penerimaan negara.

c. 2019
Penyusunan modul *dashboard* penganggaran, realisasi, pelaporan dan penerimaan pajak terpadu.

d. 2020
1. Penyusunan mekanisme pemotongan pajak di depan atas belanja tertentu;
2. SIMDK Pusat dan Daerah terintegrasi; dan
3. *Prepopulated* SPT Bendahara via SIMDK.

Outcomes

a. Menurunnya *tax gap* atas belanja APBN; dan
b. Menurunnya *tax gap* atas belanja APBD

Risiko

a. Keterbatasan sumber daya; dan
b. Resistensi dari *stakeholders*

Unit Pengelola

a. *Initiative Champion*: Direktur Jenderal Pajak
b. *Initiative Owner* : Direktorat PKP, DJP; Pengkaji Bidang EIP, DJP
c. Tim:
1) Pusintek, Setjen
2) Dit. TIP dan Dit TTKI, DJP
3) Dit A1, A2, A3 dan Dit. SP, DJA
4) Dit. SP dan Dit. APK DJPB
5) Dit. EPIKD dan Dit. Daper, DJPK
6) Inspektorat I-VII, Itjen
7) PK-APBN dan PKEM, BKF

d. K/L terkait:
1) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2) Kementerian Dalam Negeri

6. Modernisasi Sistem Informasi DJP Untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif

a. Tersedianya Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan platform teknologi baru, yang mencakup keseluruhan fungsi inti administrasi perpajakan (*core tax system*) yang terintegrasi
b. Peningkatan jumlah layanan, keamanan, kehandalan, stabilitas dan kemudahan akses layanan elektronik DJP

Latar belakang

a. Telah tersedia berbagai layanan berbasis elektronik untuk memudahkan WP memenuhi kewajiban perpajakan
b. Pengguna *e-service* meningkat sehingga tuntutan kenyamanan, keamanan, stabilitas, dan kapasitas semakin tinggi
c. Perkembangan TIK menciptakan kesempatan baru dalam pemberian pelayanan kepada WP
d. Pola hubungan layanan DJP kepada WP bergeser dari interaksi *face to face* dan *paperbased* menjadi melalui *channel services* (online & mobile)
e. Kondisi Sistem Informasi DJP saat ini: Performa basis data belum optimal, sinkronisasi data yang rumit, penggunaan teknologi out of date ,belum mencakup keseluruhan *core business, decision support system* belum memadai untuk pelayanan dan pengawasan WP, dan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap sistem yang ada.
f. Inisiatif pengembangan TIK di DJP belum fokus kepada pengembangan core tax system
g. Pentingnya perbaikan *core tax system* terhadap upaya peningkatan kinerja penerimaan pajak

Pendukung Kesuksesan

a. Kemampuan adaptasi sistem terhadap kebijakan DJP secara cepat dan akurat
b. Ketersediaan anggaran
c. Penambahan kapasitas/kemampuan SDM
d. Ketersediaan perangkat yang sesuai, termasuk jaringan dan koneksi antar perangkat
e. Perubahan RUU KUP selesai di tahun 2017
f. Tersedianya aturan yang memayungi fleksibiltas pengadaan
g. Ketersediaan data pihak ketiga (eg. ILAP) yang berkualitas

Terobosan

a. Penambahan infrastruktur dan pembangunan core tax system secara selektif
b. Pengembangan multichannel e-services melalui Penggunaan Smartcard untuk kemudahan dan keamanan akses layanan DJP dan integrasi ke layanan publik lainnya, Layanan mandiri di tempat-tempat umum bagi WP melalui KiosK Pajak, Layanan e-service versi mobile dengan M-Pajak, Offline electronic form untuk e-filing dalam mengantisipasi permasalahan koneksi internet, TPT online (pelayanan dan pelaporan), *Taxpayer account,* Single Portal Internal (SSO Platform)
c. Kerjasama dengan perbankan melalui pembayaran pajak melalui kartu kredit

Milestones

2017
1. Pengembangan *multichannel e-services*;
2. Penyusunan AD core business process;
3. Pengembangan enabler integrated system;
4. Capacity building (SDM) terkait persiapan enable integrated system;
5. Pembayaran pajak dan penerimaan negara lainnya dengan kartu kredit ke rekening bendahara penerimaan; dan
6. Kajian pembayaran pajak dengan kartu kredit ke rekening kas negara pada bank persepsi

2018
1. Tersedianya *multichannel e-services*; dan
2. Kontrak pengadaan *integrated core tax system* (I).

2019
1. Kontrak pengadaan *integrated core tax system* (II).

2020
1. *Hardware Bidding;*
2. *Business Process Development* ; dan
3. *Information & Technology Development.*

2021
1. *User Acceptance Testing.*

2022
1. *Integrated Core Tax System Deployment.*

Outcomes

	2017	2018	2019
a. Kepuasan WP terhadap layanan (skala 5)	3	3,5	4
b. Peningkatan jumlah WP pengguna layanan	10%	10%	10%
c. Peningkatan kepatuhan formal WP pengguna layanan	10%	10%	10%
d. Penurunan *unplanned downtime*	sesuai standar Pusintek		
e. Kepuasan pengguna sistem *core tax* (skala 5)	3	3,5	4

Risiko

a. Kesulitan dalam prosedur pengadaan, waktu, dan biaya serta kegagalan proses lelang
b. Hasil audit terhadap investasi sistem yang sudah ada atau pengembangan sementara tidak mendukung
c. Perubahan peraturan yang menyebabkan perlunya perubahan sistem baik yang sudah terbangun maupun sedang dalam tahap pengembangan yang akan berdampak pada *milestone* dan biaya investasi

Unit Pengelola

a. *Initiative Champion*: Direktur Jenderal Pajak
b. *Initiative Owner* : Direktorat TTKI, DJP
c. Tim:
(1) Dit.TIP dan Dit. TPB, DJP; (2) Pusintek, Setjen (3) Dit. PKN, DJPB

7. Joint Program Optimalisasi Penerimaan – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Mengoptimalkan penerimaan negara dan penegakan hukum di bidang perpajakan dan kepabeanan dan/atau cukai

Latar belakang

a. Optimalisasi penerimaan menjadi kunci utama pemenuhan sumber anggaran dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional.
b. Terdapat irisan pekerjaan/proses bisnis antara DJP dengan DJBC dalam optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penerimaan yang terkait kegiatan impor/ekspor/cukai
c. Masih banyak potensi penerimaan yang hanya dapat digali secara optimal dengan sinergi antara DJP dengan DJBC (hasil joint audit DJP-DJBC tahun 2014 sebesar Rp 234 M dan Tahun 2015 sebesar Rp 576 M *, dan Tahun 2016 sebesar Rp 204 M **, dengan program ini kerja sama akan diperluas tidak sekedar joint audit menjadi joint operation.
d. Inisiasi kebijakan maupun penguatan implementasi program-program bersama (joint program) antara DJBC dan DJP diperlukan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan Negara

*) Tahun 2014 tiga Laporan Joint Audit (LJA), dan tahun 2015 sebanyak 15 LJA
**) s.d. bulan September tahun 2016 (sebelum implementasi Tax Amesty), 8 LJA

Pendukung Kesuksesan

a. Komitmen pimpinan DJBC dan DJP dalam mplementasi Joint Program
b. Penyelerasan peraturan terkait Joint Program
c. Alokasi Anggaran
d. SDM dedicated unit
e. Dukungan IT DJBC-DJP
f. Perkiraan Kebutuhan Anggaran: Rp 1,15 M

Terobosan

Joint Program Optimalisasi Penerimaan meliputi program:
a. Sinkronisasi regulasi terhadap irisan proses bisnis terkait kegiatan impor/ekspor/cukai (joint proses bisnis)
b. *Joint Data -Joint Analysis, dan Joint Operation*
(DJBC dan DJP memiliki data yang lebih komprehensif dari hulu-hilir atas bisnis proses kepabeanan dan cukai maupun perpajakan)
c. *Integrated Analysis System* DJBC dan DJP

Milestones

a. 2017: Penerapan program audit tematik
b. 2018
1) *Fully Dedicated* tim Joint Analysis
2) Pembuatan dan Implementasi Joint analysis *tools*
3) Kebijakan Penagihan Bersama: Sistem control (**regulasi**) utang, perpajakan dan pemblokiran bea dan cukai yang terintegrasi satu sama lain.
4) Penyusunan Konsep Awal Sistem control (**aplikasi**) utang, perpajakan dan pemblokiran bea dan cukai yang terintegrasi satu sama lain.
c. 2019
1) Konsep Paper sinkronisasi regulasi irisan proses bisnis terkait kegiatan di Tempat Penimbunan Berikat
2) Sinkronisasi regulasi tindak lanjut konsep paper irisan proses bisnis terkait kegiatan di Tempat Penimbunan Berikat
3) Pelaksanaan Penagihan Bersama (menyatukan pelaksanaan penyitaan bersama dan pelaksanaan *gijzeling*)
4) Penyusunan Aplikasi Sistem control (aplikasi) utang, perpajakan dan pemblokiran bea dan cukai yang terintegrasi satu sama lain.
d. 2020 : Implementasi Aplikasi Sistem control (aplikasi) utang, perpajakan dan pemblokiran bea dan cukai yang terintegrasi satu sama lain.

Outcomes

a. Tambahan penerimaan negara dari joint operation DJP dan DJBC:
1) Tahun 2017: Rp 750 M
2) Tahun 2018: Rp 1 T
3) Tahun 2019: Rp 1,5 T
b. Menurunnya persentase piutang macet

Risiko

a. ketentuan perpajakan terkait kerahasiaan data WP / auditee mitigasi
b. Dukungan Menteri Keuangan dan kesepakatan bersama DJBC - DJP

Unit Pengelola

a. *Initiative Champion*: Direktur Jenderal Bea dan Cukai
b. *Initiative Owner* : Dit. Audit Kepabeanan dan Cukai DJBC
c. Tim
1) Dit. Pemeriksaan dan Penagihan DJP
2) Dit. IKC DJBC
3) Dit. Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP
4) Tenaga Pengkaji Bidang PPHKC
5) Pusintek, Setjen
6) PKPN, BKF

8. Pembangunan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa Terintegrasi untuk optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Peningkatan kepatuhan pengguna jasa melalui pengawasan yang handal di bidang kepabeanan dan cukai untuk percepatan pelayanan, dan perluasan fasilitasi serta optimalisasi penerimaan

Latar belakang

a. DJBC belum memiliki basis data profil pengguna jasa yang merepresentasikan seluruh kegiatan pelayanan kepabeanan dan cukai
b. Dari tahun 2003 tidak ada penambahan pengguna jasa prioritas secara signifikan
c. Pelayanan dan pengawasan dikembangkan secara parsial dalam platform yang tidak selaras dalam manajemen risiko yang terintegrasi
d. Hit rate impor yang memberikan kontribusi tinggi terhadap penerimaan negara masih lebih rendah dibanding benchmark
e. Belum terdapat mekanisme monitoring yang berkelanjutan pengguna jasa prioritas di bidang kepabeanan dan cukai
f. Setiap unit manajemen risiko membutuhkan data yang tersebar di unit lain dan belum terintegrasi satu sama lain,

Pendukung Kesuksesan

a. Komitmen Pimpinan Unit
b. Sistem IT yang handal
c. Alokasi anggaran yang cukup untuk membangun sistem
d. SDM untuk mengoperasikan sistem dengan kemampuan analisis, teknis, dan administrasi
e. Peraturan baru untuk memformal-kan risk engine dan desain database
f. Kebutuhan Anggaran: Rp 2,2 M

Terobosan

a. Membangun sistem manajemen risiko operasional yang terintegrasi dan handal untuk menyeimbangkan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam mendukung perluasan fasilitasi dan optimalisasi penerimaan Negara, antara lain mencakup:
   1) Single identity DJP dan DJBC (integrasi identitas kepabeanan dan cukai dengan NPWP)
   2) Single profile pengguna jasa untuk pengembangan Indonesia Single Risk Management (ISRM)
b. Membangun sistem database yang terintegrasi sehingga dapat menjadi enabler seluruh proses bisnis kepabeanan dan cukai

Milestones

a. 2016:
   1) Framework/Desain Sistem Kepatuhan
   2) Penyelesaian regulasi tentang Pengguna Jasa Prioritas (MITA dan AEO)
   3) Integrasi NIK dengan NPWP
b. 2017:
   1) Finalisasi Ketentuan tentang Sistem Kepatuhan
   2) Pembuatan Risk Engine Pengguna Jasa Prioritas
   3) Piloting Risk Engine Pengguna Jasa Prioritas
   4) Desain sistem database yang terintegrasi
   5) Integrasi NPPBKC dengan NPWP
c. 2018:
   1) Finalisasi ketentuan tentang Sistem Kepatuhan
   2) Single Profile Pengguna Jasa
   3) Pembuatan Risk Engine Pengguna Jasa Reguler
   4) Piloting Risk Engine Pengguna Jasa Reguler
   5) Database yang terintegrasi
   6) Integrasi NPPBKC dengan NPWP
d. 2019
   1) Implementasi Sistem Manajemen Risiko Baru
   2) Pemanfaatan single profile untuk stakeholder eksternal DJBC

Outcomes

	2017	2018	2019
a. Meningkatnya jumlah pengguna jalur Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dan Authorized Economic Operator(AEO)	300 MITA 75 AEO	500 MITA 150 AEO	n/a
b. Menurunnya temuan audit (berdasarkan rata-rata data audit tahun 2014 dan 2015 ≈ Rp 7,49 M per perusahaan)	n/a	n/a	Kurang dari Rp. 1 M per perusahaan
c. Peningkatan hit-rate (tahun 2015 <25,21%)	n/a	n/a	≥25%

Risiko

a. Reaksi negatif pengguna jasa yang tidak memahami perubahan sistem pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai
b. Sistem IT yang tidak stabil

Mitigasi

a. Membangun *engagement* Pengguna Jasa terhadap sistem yang dibangun.
b. Sosialisasi kepada pengguna jasa tentang sistem pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang baru
c. Perencanaan sistem IT yang komprehensif

Unit Pengelola

a. Initiative Champion: Direktur Jenderal Kepabeanan dan Cukai
b. Initiative Owner : Dit. PPS, DJBC
c. Tim
   1) Dit. PPS, DJPC
   2) Dit. Penindakan dan Penyidikan, DJBC
   3) Dit. Teknis Kepabeanan dan Cukai
   4) Dit. Informasi Kepabeanan dan Cukai
   5) TP Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi
   6) Pusintek
   7) Dit. PKP, DJP

9. Optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Peningkatan PNBP melalui Penyederhanaan Penetapan Jenis dan Tarif, Pemberian Insentif Pengelola PNBP dan Pemetaan Potensi PNBP, Monev Minerba dan peningkatan efisiensi dan kualitas biaya operasi KKKS migas

Latar belakang

a. Banyaknya KL yang enggan melakukan evaluasi dan menggali potensi serta mengusulkan jenis dan tarif PNBP karena penetapan jenis dan tarif PNBP dengan PP membutuhkan proses yang panjang dan belum adanya insentif yang memadai untuk para pengelola PNBP, mengakibatkan hilangnya potensi PNBP.

b. Realisasi PNBP SDA non migas sektor mineral dan batubara selama tiga tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang ditetapkan (rata-rata 77,29%)

c. Terdapat kecenderungan pengembalian biaya operasi biaya melampaui pagu APBN/P setiap tahunnya. Setiap kenaikan US$1 milyar berdampak pada penurunan penerimaan migas Rp10 trilyun. Pengendalian biaya operasi diperlukan untuk menjaga penerimaan migas dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap investasi sektor hulu migas

Pendukung Kesuksesan

a. Kapasitas SDM yang memadai
b. Regulasi yang mendukung pelaksanaan terobosan
c. Dukungan pendanaan dan Infrastruktur
d. Koordinasi yg baik antar KL, unit dan sektor.

Terobosan

a. Optimalisasi PNBP K/L Lainnya:
1) Penyederhanaan mekanisme penetapan tarif PNBP K/L sesuai hasil pembahasan perubahan RUU PNBP;
2) Kajian Pemberian insentif kepada pengelola PNBP;
3) Pemetaan potensi PNBP.

b. Optimalisasi PNBP Migas (*cost recovery*)
Target biaya operasi migas dalam APBN/P menjadi acuan SKK Migas dan KKKS dalam menyusun *Work Program and Budget* (WP&B).

c. Optimalisasi PNBP SDA Non Migas (Minerba):
1) Penguatan monitoring dan evaluasi;
2) Interkoneksi sistem pembayaran PNBP melalui SIMPONI dengan sistem pemungutan PNBP Minerba melalui Minerba One Data Indonesia (MODI);
3) Penyelesaian Piutang Minerba.

d. Sinergi pengawasan penerimaan Negara antara Itjen Kemenkeu dengan APIP K/L

Milestones

a. 2016
1) Penyelesaian pemetaan potensi PNBP K/L serta PNBP SDA non migas sektor mineral dan batubara
2) Pagu *cost recovery* sebagai acuan SKK Migas dan KKKS dalam menyusun *Work Program and Budget* (WP&B).
3) Rekonsiliasi dan verifikasi data piutang PNBP SDA sektor Minerba
4) Penyederhanaan mekanisme penetapan tarif PNBP K/L sesuai hasil Pembahasan Perubahan RUU PNBP;

b. 2017
1) Intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP;
2) Penyelesaian aturan pemberian insentif kepada pengelola PNBP;
3) Interkoneksi sistem pembayaran PNBP melalui SIMPONI dengan sistem pemungutan PNBP SDA Non Migas sektor mineral dan batubara melalui Minerba One Data Indonesia (MODI);
4) Terimplementasinya pengendalian biaya operasi (*cost recovery*) migas;
5) Ditetapkannya dasar hukum penyelesaian piutang PNBP SDA sektor Minerba;
6) Membentuk forum asistensi dan konsultansi pengawasan penerimaan (termasuk PNBP);

c. 2018
1) Pemberian insentif pengelola PNBP;
2) Implementasi pengendalian cost recovery;
3) koordinasi pelaksanaan inpres pengawasan oleh APIP K/L.
4) Penetapan Inpres terkait pengawasan PNBP oleh APIP K/L (termasuk pengawasan pajak belanja pemerintah dan anggaran BUN) serta koordinasi pelaksanaan inpres pengawasan oleh APIP K/L.

Outcomes

a. Meningkatnya kontribusi PNBP tahun 2018:
1) 10 % dari target PNBP Lainnya (PNBP KL) dalam APBN Tahun 2017
2) 10 % dari target PNBP sektor Minerba dalam APBN Tahun 2017

b. Realisasi *Cost recovery* tidak melebihi dari yang ditargetkan

Risiko

a. Tidak disetujuinya aturan penyederhanaan pengelolaan PNBP dan pemberian insentif
b. Resistensi dari K/L dan pengusaha minerba
c. Ketidakpatuhan SKK Migas dan KKKS terhadap penetapan kesepakatan pagu *cost recovery*

Unit Pengelola

a. *Initiative Champion*: Direktur Jenderal Anggaran
b. *Initiative Owner* : Dit. PNBP, DJA
c. Tim
1) Dit PNBP, Dit. SP, DJA
2) Biro Hukum, Setjen
3) Itjen
4) PKPN, PKEM dan PKAPBN, BKF
5) Kemenkumham (Ditjen PP)
6) Setneg
7) Kementerian/Lembaga
8) SKK Migas, Komite Pengawas SKK Migas

10. Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern, Efisien, dan Terintegrasi – Tema Perbendaharaan

Tujuan Inisiatif	Membangun Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern dan Terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran, mempermudah pembayaran bagi wajib pajak/wajib bayar/ wajib setor, dan memperkuat akuntabilitas pelaporan

Latar belakang

a. FMIS yang dibangun, Sistem Perbendaharaan & Anggaran Negara (SPAN) telah mendukung transaksi belanja untuk 23.693 satker dan sistem penerimaan negara (MPNG2) telah mendukung 90.71% transaksi penerimaan
b. Penyerahan & verifikasi SPM dari satker masih bersifat tatap muka dan proses komitmen & pembayaran belanja rutin yg belum efisien
c. Basis data keuangan yang belum terhubung dengan K/L dan belum optimalnya pemanfaatan data terpusat SPAN
d. Pencatatan dan Pengelolaan Aset yang belum terintegrasi
e. Multi *sign-on* atas beberapa bentuk Penerimaan Negara
f. Beberapa kejadian *fraud & irregularities* oleh pengelola keuangan

Pendukung Kesuksesan

a. Dukungan Pimpinan untuk hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya
b. Pengembangan Sistem IT dengan mengadopsi teknologi terkini

Terobosan

a. *Streamlining* proses transaksi penerimaan negara dan transaksi belanja rutin & belanja bantuan
b. *Back office* K/L atas transaksi belanja pegawai dipusatkan di Kemenkeu
c. Pertukaran data dengan sistem dari pemangku kepentingan di luar Kemenkeu
d. Laporan Keuangan K/L berbasis akrual melalui sistem aplikasi terintegrasi
e. Pengelola keuangan BUN dan KL yang profesional dan bersertifikasi

Milestones

a. 2017:
   1) Simplifikasi proses bisnis pertanggungjawaban belanja (SPJ);
   2) Simplifikasi proses bisnis pertanggungjawaban keuangan Satker Piloting SAKTI
   3) Piloting SAKTI
   4) Roll out implementasi pembayaran gaji terpusat di Ditjen Perbendaharaan dan kajian *shared services*
   5) Integrasi RKA-KL ke dalam SAKTI
b. 2018
   1) Portal *Single sign-on* Penerimaan Negara
   2) Interkoneksi SPAN dengan sistem LKPP (data vendor)
   3) Integrasi Aplikasi KPJM ke dalam SAKTI
   4) Interkoneksi SIMAN dengan SAKTI
   5) Penerapan SAKTI ke seluruh Satker Kementerian Keuangan
   6) Interkoneksi SPAN dengan portal program K/L
   7) Penyiapan dan Penyempurnaan Sistem Pembayaran Gaji KPPN Terpusat
a. 2019
   1) Penyiapan dan Penyempurnaan Sistem Pembayaran Gaji KPPN Terpusat untuk TNI/POLRI
   2) Piloting SAKTI ke beberapa satker K/L lainnya
b. 2020 : Penyiapan dan Penyempurnaan Aplikasi Gaji Satker Terpusat (PNS) Lingkup Eselon I DJPb
c. 2021 : Penyiapan dan Penyempurnaan Aplikasi Gaji Satker Terpusat (PNS) Lingkup Kemenkeu dan Piloting satker K/L lainnya

Outcomes

a. Efisiensi dan Efektifitas proses pengadaan dan pembayaran Belanja Pemerintah
   2017 Tingkat Kepuasan Penerima belanja Bantuan (kepala sekolah & penyuluh) 3 dari skala 5
   2018 Meningkatnya penghematan Biaya Operasional Satker K/L untuk keperluan belanja rutin
b. Kemudahan pembayaran bagi wajib pajak/wajib setor/wajib bayar
   2017 100% penggunaan MPN G-2
   2018 Tingkat Kepuasan WP/WS/WB atas layanan MPN G2 3 dari skala 5
c. Ketersediaan informasi pada LKKL untuk akuntabilitas & pengambilan keputusan
   2017 Simplifikasi penyusunan LKKL satker piloting SAKTI (75%)
   2018 2018Peningkatan akurasi LKKL satker pengguna SAKTI (75%)

Risiko

a. Penyesuaian Perundang-undangan dan Peraturan
b. Pengunaan Teknologi berdampak terhadap SDM & Organisasi

Unit Pengelola

a. *Initiative champion: Direktur Jenderal Perbendaharaan*
b. *Initiative owner:* Dit. SITP, PA, SP, PKN, APK, DJPB
c. Tim:
   1) Kemenkeu (Pusintek; Setjen; DJP, DJPBC, DJA)
   2) LKPP

11. Pengelolaan Likuiditas Keuangan Negara Dengan Instrumen Keuangan Modern – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Terwujudnya pengelolaan likuiditas (*cash shortage*) jangka pendek yang terpadu dan mendorong terciptanya suku bunga pasar yang rendah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

Latar belakang

a. Masih terjadi *Cash Mismatch* dalam jangka pendek (kurang dari 3 bulan) yang seharusnya dapat ditutup dengan penerbitan SBN jangka pendek termasuk SPN dan/atau alternatif pembiayaan jangka pendek lainnya.
b. Pasar uang/ /pasar SBN jangka pendek yang tidak likuid sebagai satu faktor yang mempengaruhi tingginya suku bunga pasar yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
c. Kementerian Keuangan selaku BUN memiliki rekening pada BLU namun memiliki kendala regulasi untuk melakukan pinjaman siaga.
d. Adanya tekanan kebutuhan kas pada akhir tahun.

Pendukung Kesuksesan

a. Koordinasi yang harmonis antara DJPB, DJPPR dan Komite ALM terkait dengan analisa pasar, kebijakan penerbitan SPN/ SBN jangka pendek dan kartu kredit/pinjaman perbankan, serta peraturan-peraturan terkait.

Terobosan

a. Memformulasikan alternatif instrument pembiayaan baru yang lebih responsif melalui protokol pengelolaan kas
b. Membangun stategi pembiayaan utang dengan memperpendek durasi instrument utang untuk menurunkan cost of fund serta mendukung pendalaman pasar keuangan.

Milestones

a. 2016-2017
   1) Peningkatan size penerbitan SPN/SPNS khususnya tenor 3 bulan
   2) Pilot project penggunaan kartu kredit/pinjaman perbankan dalam dukungan belanja pemerintah
   3) Optimalisasi peran BLU & lembaga keuangan lainnya serta implementasi SBN terhadap dukungan likuiditas jangka pendek
b. 2018 - 2019
   1) Meluncurkan SOP Link dan Protokol cash mismatch BUN (termasuk langkah-langkah di akhir tahun)
   2) Penyusunan dan publikasi strategi pengelolaan kas.
   3) Pengembangan instrumen jangka pendek dalam rangka pembiayaan (SPN< 3bln,Repo, Credit line)
   4) Pengembangan instrumen jangka pendek dalam rangka investasi (Peningkatan Limit TDR, Term Deposit di BI, Reverse Repo) .
   5) Regulasi dan implementasi penggunaan kartu kredit/pinjaman perbankan dalam dukungan belanja pemerintah
   6) Penetapan cash buffer level dan opsi pemenuhan kas pada kuartal IV sebagai mitigasi tekanan kas akhir tahun.
   7) Peningkatan akurasi data Perencanaan Kas

Outcomes

	2017	2018	2019
a. Tersedianya pendanaan yang cukup untuk pembayaran beban APBN melalui berbagai opsi pembiayaan jangka pendek	-	100%	100%
b. Penurunan *cost of fund*			
c. *Money market* yang likuid			

Risiko

a. Instrumen pembiayaan jangka pendek kurang diminati pasar.
b. Risiko refinancing yang dapat mengancam kesinambungan fiscal.

Unit Pengelola

a. *Initiative champion:*
   1) Dirjen Perbendaharaan
   2) Dirjen PPR
b. *Initiative owner:*
   1) Direktur PKN - DJPB
   2) Direktur SPP-DJPPR
c. Tim:
   1) DJPB (Dit PA, Dit SP, Dit. SITP, Dit. PPK BLU)
   2) DJPPR (Dit SUN, Dit PS)
   3) BKF (PKEM)
   4) BI
   5) OJK

12. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dengan Pengembangan Jalur Distribusi SBN Ritel secara Online – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Mempermudah akses masyarakat untuk berinvestasi di SBN Ritel, memperluas basis investor domestik, dan mendukung terwujudnya keuangan inklusif

Latar belakang

Penjualan/distribusi SBN di pasar perdana selama ini dilakukan menggunakan agen dengan fakta sbb:

a. Rata rata pembelian per investor relatif tinggi, sehingga tidak mencerminkan sebagai instrument ritel
b. Sebaran investor SBN ritel terkonsentrasi di Indonesia Barat khususnya Jakarta
c. Agen penjual lebih memprioritaskan nasabah prioritas masing masing, sehingga upaya perluasan basis investor tidak terpenuhi
d. Agen penjual juga kurang mengakomodasi permintaan pembelian dari kantor cabang sehingga distribusi SBN ritel tidak merata

Pendukung Kesuksesan

a. Perancangan Proses Bisnis distribusi SBN Ritel
b. Anggaran dalam rangka perancangan sistem distribusi SBN Ritel
c. Adanya SDM/unit struktural yang didedikasikan untuk melaksanakan pengelolaan SBN Ritel secara on-line

Terobosan

a. Perancangan framework dan sistem distribusi SBN Ritel
b. Perluasan basis investor domestic *(market deepening)*
c. Pemerataan distribusi penjualan SBN Ritel

Milestones

a. 2017
   1) Penyelesaian Rancangan Peraturan Pendukung
   2) Perancangan Proses Bisnis Sistem SBN Ritel
   3) Pembangunan jalus distribusi SBN Ritel secara online
   4) Perancangan rencana kegiatan dalam rangka Public Outreach

b. 2018
   1) Uji coba
   2) Peluncuran *(Go Live)*

Outcomes

	2018	2019
Jumlah investor SBN ritel baru bertambah	6000	7000

Risiko

Kurangnya koordinasi dalam hal regulasi pendukung dan perancangan sistem informasi yang terintegrasi

Unit Pengelola

a. Initiative Champion: Dirjen PPR
b. Initiative Owner: Dit. SUN dan Dit. PS, DJPPR
c. Tim:
   1) DJPPR
   2) Pusintek
   3) PKSK, BKF

13. Penjaminan Obligasi Infrastruktur untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sehingga tercapai pemenuhan layanan publik yang baik dengan biaya yang efisien dan risiko fiskal yang minimal

Latar belakang

a. Berdasarkan RPJM 2015-2019 kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur diperkirakan Rp5.452 Triliun. Diperkirakan yang bersumber dari APBN dan APBD sebesar 22% atau Rp1.178 Triliun, dan berasal dari BUMN sebesar 6 % atau Rp350 Triliun.

b. Sebesar 72% atau Rp3.924 Triliun diharapkan dipenuhi dari swasta

c. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah mendorong pembiayaan dari sumber non APBN untuk pembiayaan infrastruktur terutama pembiayaan oleh badan usaha.

Pendukung Kesuksesan

a. Adanya Perpres dan Inpres untuk mensukseskan Proyek Strategis Nasional

b. Adanya PT PII sebagai BUMN yg tugas dan fungsi nya memberikan penjaminan untuk proyek infrastruktur

c. Terdapat instrumen pembiayaan untuk proyek :
   1) Project Financing Sukuk.
   2) WB dan ADB telah merapkan konsep *Performance Base Budgeting*
   3) Availibility Payment dalam KPBU

Terobosan

Memberikan penjaminan obligasi infrastruktur dari badan usaha yang berinisiatif membiayai proyek infrastruktur, untuk meningkatkan rating dan mengurangi *cost of fund* badan usaha

Milestones

a. 2016 – 2017
   1) Penyelesaian Skema Penjaminan Obligasi Infrastruktur (termasuk benchmark lembaga keuangan internasional)
   2) Perumusan kebijakan penjaminan obligasi infrstruktur

b. 2018
   Implementasi penjaminan obligasi infrastruktur

Outcomes

	2018	2019
Jumlah dan nilai proyek infrastruktur yang terealisasi dengan skema penjaminan obligasi infrastruktur	1 Proyek	2 Proyek

Risiko

a. Menambah alokasi dana kewajiban penjaminan Pemerintah

b. Risiko default BUMN selaku pihak Terjamin

Unit Pengelola

a. *Initiative Champion:* Dirjen PPR

b. *Initiative Owner:* Dit. SPP dan Dit. PRKN, DJPPR

c. Tim:
   1) DJPPR (Dit. SPP, PRKN, PDPPI)
   2) BKF (PKAPBN, PKEM, PKPPIM)

14. Pemberdayaan Aset untuk Mendorong Perekonomian Nasional – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Melakukan pemberdayaan aset untuk mendorong perekonomian nasional

Latar belakang

a. Pengelolaan aset yang ada saat ini belum dapat dilakukan secara optimal, dikarenakan:
   1) Belum dilakukan IP menyeluruh terhadap aset misalnya aset eks-BPPN, aset BMN *idle*.
   2) Terdapat aset yang secara fisik tidak berada di bawah penguasaan pengelola.
   3) Permasalahan aset-aset eks-BPPN yang sulit diselesaikan (misalnya barang jaminan diambil alih).
b. Adanya arahan Presiden untuk menyiapkan lahan guna mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN).
c. Belum optimalnya *database* portofolio aset.
d. Terdapat potensi pemanfaatan aset melalui skema KSPI.
e. Belum optimalnya penerimaan negara dari pengelolaan aset.
f. Belum adanya potret potensi fiskal SDA sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal terkait SDA

Pendukung Kesuksesan

a. Sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelesaian inisiatif, termasuk:
   1) Anggaran:
      a) Penilaian menyeluruh terhadap aset (tanah dan bangunan serta SDA prioritas mineral timah.
      b) Untuk infrastruktur penyelesaian pengembangan dan pemeliharaan SIMAN dan Modul KNL.
   2) SDM: Untuk penilaiandapat melibatkan kantor vertikal dan bekerja sama dengan P2PK.
b. Prasyarat yang dibutuhkan dari unit/inisiatif lain:
   1) *Database* nilai aset dan portofolio aset yang terbangun
   2) Penyelesaian status hukum (Dukungan untuk penyusunan RPP/PMK/Nota kesepemahaman sehingga bila HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah telah berakhir tetap dapat diurus oleh Kemenkeu, tidak ke pihak lain dan kerjasama dengan institusi terkait)

Terobosan

a. Kebijakan-kebijakan baru untuk mendorong *zero idle, cost saving,* PNBP dan ketahanan ekonomi melalui optimalisasi aset.
b. Integrasi perencanaan dan penganggaran aset.
c. Integrasi IT untuk pengelolaan aset.
d. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai operator pengelola barang.
e. Penilaian SDA dalam rangka penyusunan Neraca SDA dan laporan potensi fiskal SDA.

Milestones

a. 2017
   1) Inventarisasi dan penatausahaan aset negara.
   2) Penyusunan/simplifikasi peraturan terkait pengelolaan aset (pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan aset dan KSPI).
   3) Menyusun mekanisme dalam perencanaan aset sebagai bahan efisiensi penganggaran belanja modal.
   4) IT *based* dalam pengelolaan aset.
   5) Optimalisasi aset : dengan utilisasi aset *idle* dan penerapan strategi pengelolaan aset.
b. 2018
   1) Inventarisasi dan penilaian aset untuk tanah dan bangunan.
   2) Terbentuknya Laporan Potensi Fiskal SDA untuk akun TImah
   3) IT *based* dalam pengelolaan aset.
   4) Implementasi evaluasi portofolio aset.
   5) Optimalisasi aset : dengan utilisasi aset *idle* dan penerapan strategi pengelolaan aset.

Outcomes

	2017	2018
a. Optimalisasi Aset *Idle*	Utilisasi terhadap 70% *Cost saving* Rp 100M (subjek hasil inventarisasi)	Utilisasi terhadap 80% *Cost saving* s.d.Rp 200M (subjek hasil inventarisasi)
b. Terutilisasinya aset melalui pemanfaatan aset (sewa)	PNBP Rp 0,741 T	PNBP s.d. Rp 1,7 T
c. Kontribusi Lahan untuk pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional	22 ruas tol, 4 infrastruktur transportasi, 24 bendungan.	

Risiko

a. Banyaknya masalah hukum yang dihadapi dalam upaya memperjelas status hukum aset.
b. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dan BPN.

Unit Pengelola

a. *Initiative Champion:* Dirjen Kekayaan Negara
b. *Initiative Owner:*
c. Tim:
   1) DJKN (Dit. BMN, Dit. PNKNL, Dit. PKNSI, LMAN, Dit. Peniliain)
   2) BKF (PKPPIM, PKEM)

15. Optimalisasi Investasi Pemerintah Untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Mendorong Penyelarasan Pembiayaan Pembangunan Nasional Melalui Optimalisasi Investasi Pemerintah

Latar belakang

a. Tingginya *logistic cost* di Indonesia dibandingkan negara lain, yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
b. Adanya kebutuhan pendanaan yang besar untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
c. Adanya *financing gap* dalam pembangunan infrastruktur.
d. Belum optimalnya penerimaan negara dari portofolio investasi yang dimiliki pemerintah.
e. Belum optimalnya penilaian kinerja hasil investasi pemerintah pada KND.
f. BUMN mempunyai potensi untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

Pendukung Kesuksesan

Ketersediaan :
a. Regulasi
b. SDM
c. Anggaran
d. Sinergi
e. Teknologi Informasi
f. SOP *link*

Terobosan

a. Penyelerasan pembiayaan proyek melalui *leverage* BUMN dan manajemen portofolio investasi
b. Implementasi prinsip-prinsip investasi melalui Revisi PP 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
c. Transformasi PT SMI menjadi LPPI
d. Pembentukan *holding* BUMN

Milestones

a. 2017
1) Forum penyelarasan pembiayaan proyek (Kemenkeu, Kemeneg BUMN, Bappenas) untuk menetapkan kebijakan
2) Kajian optimalisasi potensi pendanaan pembangunan *leverage* BUMN dan manajemen portofolio investasi
3) Tersedianya infrastruktur *system* informasi untuk interkoneksi data dengan *stakeholder* terkait.
4) Draf Revisi PP Nomor 1 / 2008.
5) Kajian pembentukan lembaga pembiayaan infrastruktur (dalam jangka panjang: integrasi lembaga pembiayaan yang ada)
6) Terbentuknya holding BUMN
7) *Monitoring* terkait efektivitas investasi pemerintah.

b. 2018
1) Regulasi terkait dengan manajemen portofolio investasi telah ditetapkan.
2) Terbangunnya interkoneksi data antara Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.
3) Penyempurnaan Modul KND terkait integrasi fungsi perencanaan investasi, kinerja keuangan, analisis dan proyeksi, penatausahaan KND, serta penilaian kinerja hasil investasi pemerintah pada KND (aplikasi EWS Kinerja BUMN versi 3.0).
4) Mulai melaksanakan kegiatan *monitoring* terkait efektivitas pelaksanaan *holding* BUMN

Outcomes

a. Mengurangi *exposure* APBN untuk pembiayaan pembangunan
b. Meningkatnya penerimaan negara yang berasal dari portofolio investasi pemerintah

IKU
a. Persentase dukungan pemerintah terhadap pembiayaan pembangunan (ditargetkan menurun)
b. Peningkatkan Penerimaan Negara yang berasal dari investasi pemerintah sebesar Rp 1,6 T (Target 2017 untuk kinerja 2016: 716 M, Target 2018 untuk kinerja 2017: 906,8 M)

Risiko

a. Risiko politis apabila terdapat resistensi dari Menteri lain.
b. Risiko tidak tercapainya target

Unit Pengelola

a. *Initiative Champion*: Dirjen Kekayaan Negara
b. *Initiative Owner*: Dit. KND, DJKN
c. Tim:
1) Perwakilan DJPB
2) Perwakilan BKF (PKEM, PKAPBN)
3) Perwakilan DJPPR
4) Perwakilan DJA
5) Kementerian BUMN
6) Kementerian teknis pengelola BLU

16. Sinergi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran BUN dan Implementasi Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada LKPP (K/L dan BUN) (Internal Control Over Financial Reporting – ICOFR) – Tema Penerimaan

Tujuan Inisiatif	Implementasi dan penilaian terhadap pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan APIP K/L dan BUN untuk mendukung pencapaian opini WTP dari BPK atas seluruh LK Pemerintah.

Latar belakang

a. Temuan BPK RI pada LKPP 2015 dan Temuan BPK RI pada audit Kinerja ICOFR 2015 menyatakan belum ada dasar manajemen untuk menjamin adanya pengendalian intern yang memadai atas pelaporan keuangannya.
b. Pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan SAP belum memiliki dasar.
c. Pedoman penilaian terhadap pengendalian intern atas pelaporan keuangan baik instansi di lingkungan Kementerian Keuangan maupun K/L lain belum disusun.

Pendukung Kesuksesan

a. Komitmen dan dukungan dari Pimpinan Kemenkeu dan K/L lain
b. Komitmen dan dukungan Ditjen terkait
c. Dukungan APIP K/L

Terobosan

a. Menetapkan kebijakan implementasi ICOFR kepada K/L
b. Melaksanakan transfer of knowledge dan menyediakan asistensi dalam implementasi ICOFR

Milestones

a. 2016
1) Penetapan PMK mengenai ICOFR dan *public hearing* ke seluruh KL
2) Penyusunan petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan anggaran BUN;

b. 2017
1) Uji coba pelaksanaan Reviu ICOFR pada LKBUN, BA 15 dan LKPP (LK tahun 2016
2) Penyusunan *Risk Control Matrix (RCM)* LK BUN, LK BA 15 dan LKPP.
3) Sosialisasi PMK tentang Penerapan, Penilaian, dan Reviu ICOFR pada seluruh K/L
4) Penerapan dan penilaian ICOFR LK BUN, LK BA 15, dan LKPP (LK 2017) .
5) Asistensi penerapan, penilaian, dan reviu ICOFR pada Kemen PUPR, Kemensos, dan BPKP.
6) Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Anggaran BUN.
7) Asistensi dan konsultansi pengawasan pelaksanaan anggaran BA BUN kepada kementerian diluar Kementerian Keuangan.
8) Pengawasan bersama pelaksanaan anggaran BA BUN.

c. 2018
1) Pelaksanaan reviu ICOFR pada LKBUN, BA 15 dan LKPP (LK tahun 2017).
2) TOT penerapan, penilaian, dan reviu ICOFR untuk seluruh APIP K/L.
3) Asistensi penerapan, penilaian, dan reviu ICOFR pada seluruh K/L.
4) Uji coba pelaksanaan reviu ICOFR pada seluruh K/L

Outcomes

	2017	2018	2019
a. Opini BPK atas LKBUN dan LKPP	WTP	WTP	WTP
b. Opini BPK atas LK KemenPUPera dan Kemensos.	WTP	WTP	WTP

Risiko

a. Resistensi Manajemen maupun APIP K/L;
b. Irisan fungsi dengan BPKP
c. Kesulitan dalam memberikan pemahaman mengenai ICOFR kepada K/L baik pada sisi manajemen maupun APIP

Unit Pengelola

a. *Initiative Champion*: Inspektur Jenderal Kemenkeu
b. *Initiative Owner*: Inspektur III, Itjen
c. Tim:
1) DJPB (Dit. APK)
2) Seluruh Eselon I Kemenkeu
3) Seluruh APIP K/L
4) Seluruh penyusun LK pada K/L

17. Mewujudkan APBN Berkualitas melalui Efisiensi dan Efektifitas Belanja Negara – Tema Penganggaran

Tujuan Inisiatif	Terwujudnya efisiensi dan efektifitas belanja negara guna mendukung pengelolaan APBN yang berkualitas

Latar belakang

a. Melebarnya Defisit Anggaran Negara disertai dengan *trend* realisasi yang dibawah Pagu Belanja memberikan indikasi awal adanya kondisi *overbudget* pada beberapa aspek.
b. Sejalan dengan trend peningkatan belanja, alokasi belanja untuk birokasi terus meningkat.
c. Tekanan defisit anggaran baik yang diakibatkan dari tidak tercapainya target pendapatan negara maupun dengan terus meningkatnya kebutuhan belanja negara memerlukan upaya efisiensi atas belanja eksisting.

Pendukung Kesuksesan

a. PMK 71/2013 tentang Pedoman Penggunaan SB, SSB dan Indeksasi mengatur biaya pada setiap level
b. Inisiatif membentuk RPP Perjalanan Dinas yang mengatur mengenai perjalan dinas pusat dan daerah sedang dalam proses
c. Kontrol masyarakat atas anggaran sudah mulai meningkat
d. Instruksi Presiden untuk menyederhanakan pertanggungjawaban

Terobosan

a. Efisiensi
1) Kerangka analisis biaya:
   a) Kontrol atas input yang berkaitan dengan biaya birokrasi, termasuk tentang perjalanan dinas, honorarium tim, dan biaya rapat;
   b) Benchmarking Belanja K/L sebagai langkah *Mapping* potensi pemborosan belanja
   c) Penurunan biaya pendukung atas output serta penggunaan biaya standar
2) biaya birokrasi/aparatur:
   a) Penyederhanaan Satker Pengelola Anggaran
   b) Protokol koordinasi terkait proses reorganisasi & *rightsizing* dengan Kemenpan-RB

b. Efektifitas:
1) Mengalihkan belanja konsumtif ke belanja yang lebih produktif;
2) memperbaiki sistem penyaluran subsidi dan bantuan sosial;
3) Perumusan pagu: Peningkatan kualitas KPJM; Penajaman rumusan reviu *base line*; Penilaian proposal penambahan pagu;

Milestones

a. 2017
1) Kajian kebijakan alokasi belanja pusat dan daerah yang inefisien;
2) Penyusunan dan penelaahan KPJM;
3) Penyusunan database K/L yang terintegrasi serta mapping potensi inefisiensi belanja K/L;
4) Perumusan pagu memanfaatkan hasil Reviu *base line*, analisis KPJM, dan penilaian proposal penambahan pagu serta sinkronisasi alokasi DK/TP dengan transfer;
5) Penyederhanaan Satker Pengelola Anggaran;
6) Revisi peraturan Perjadin/honortim/biaya rapat yang berlaku;
7) Reviu penataan organisasi & *rightsizing* dengan Kemenpan-RB;
8) Penyusunan Benchmark Belanja K/L;
9) Piloting efisiensi dan efektivitas belanja Birokrasi BA 015 melalui penyusunan profil belanja Kemenkeu/ *Spending Review*.

b. 2018:
1) merumuskan sistem penyaluran subsidi dan bantuan sosial untuk menggunakan basis data terpadu TNP2K (tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan);
2) Mengalihkan belanja konsumsi ke belanja yang lebih produktif;
3) Integrasi Pengaturan Mengenai Pengelolaan Keuangan Negara;
4) Pembandingan biaya birokasi pada tiap level pemerintahan;
5) Standardisasi Biaya bersifat generik;
6) Sinkronisasi standar biaya kantor vertikal internal yang disusun Biro Cankeu dengan Standar Biaya yang disusun DJA.

Outcomes

	2017	2018
a. Berkurangnya belanja K/L dalam rangka penyelenggaraan birokasi pemerintahan dengan output yang sama (*strategic cost saving*)	5%	5%
b. Belanja K/L dan belanja subsidi yang tepat sasaran	n/a	100%

Risiko

a. Resistensi atas Kewenangan Pengaturan pengelolaan keuangan di daerah
b. Resistensi atas Penyederhaan satker terutama untuk Dekon dan TP
c. Mitigasi dengan:
1) Koordinasi intensif atas terobosan yang akan bersinggungan dengan pihak eksternal
2) Dukungan dari Kabinet guna mendorong belanja yang lebih efektif dan efisien

Unit Pengelola

a. *Initiative Champion*: Dirjen Anggaran
b. *Initative Owner*: Dit. Anggaran Bid PMK, DJA
c. Tim:
1) Internal: DJA, DJPK, DJPb, BKF (PKEM, PKAPBN), Itjen
2) Eksternal :K/L/Pemda, KemenPAN-RB (Kelembagaan)

18. Meningkatnya Kualitas SDM dan Standar Kesehatan Masyarakat melalui Perbaikan Kualitas Belanja Bidang Pendidikan dan Kesehatan – Tema Penganggaran

Tujuan Inisiatif	Terciptanya kebijakan perencanaan penganggaran pada bidang pendidikan dan kersehatan yang terpadu berdasarkan tools, arsitektur dan informasi kinerja anggaran dan Monev yang handal (*reliable*)

Latar belakang

a. Anggaran pendidikan dan kesehatan terus meningkat, sejalan dengan penerapan mandatory spending anggaran pendidikan 20% dan anggaran kesehatan 5%; dimana sebesar 64% anggaran pendidikan dan 21% anggaran kesehatan dialokasikan melalui mekanisme transfer ke daerah.
b. Kinerja anggaran yang belum optimal dalam mendukung peningkatan akses dan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan (baik sisi *supply* dan *demand*), karena:
   1) Belum terintegrasinya data anggaran dan kinerja ditingkat pusat dan daerah sampai dengan kabupaten/kota.
   2) Belum terdefinisikannya dengan baik target output dan *outcome* dari tingkat pusat dan daerah sampai dengan kab/kota;
   3) Belum terintegrasinya perencanaan dan monev ditingkat pusat dan daerah.

Pendukung Kesuksesan

a. SDM: dukungan penuh dari pimpinan unit eselon I selaku *dean*, pejabat yang menangani pengembangan SDM di unit selaku *coordinator skill group owner* (SGO), dan seluruh jajaran yang memiliki kompetensi teknis untuk berpartisipasi aktif melakukan *knowledge sharing* sebagai SGO.
b. Anggaran: Diperlukan untuk memperbaiki proses bisnis yang telah ada dan untuk mengembangkan infrastruktur terkait teknologi dan informasi.

Terobosan

a. Menyusun peta anggaran (*Budget Map*) dan capaian kinerja pada Menyusun peta anggaran (*Budget Map*) dan capaian kinerja pada bidang pendidikan dan kesehatan yang didukung dengan *dashboard* pengawasan
b. Meredesain arsitektur dan informasi anggaran bidang pendidikan dan kesehatan yang berfokus pada *outcomes*;
c. Mempertajam aspek monev kinerja anggaran bidang pendidikan dan kesehatan;
d. Menyajikan rekomendasi *spending policy* pada bidang pendidikan dan kesehatan pada *policy forum*;
e. Memastikan bekerjanya *task force* untuk mendukung implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di K/L dan daerah bidang pendidikan dan kesehatan dengan pola *project-based;*
f. Sinkronisasi terminologi *output/outcome* dalam dokumen penganggaran (Kemenkeu) dan perencanaan pembangunan nasional.

Milestones

a. 2017 :
   1) *Prototype* rumusan arsitektur dan informasi kinerja anggaran, tool monitoring dan evaluasi kinerja anggaran, dashboard dan *Budget Map* bidang pendidikan dan kesehatan;
   2) Sinkronisasi terminologi output/outcome dalam dokumen penganggaran (Kemenkeu) dan perencanaan pembangunan nasional;
   3) Arsitektur dan informasi kinerja anggaran 100%;
   4) Terintegrasinya data anggaran dan kinerja ditingkat pusat dan daerah sampai dengan kabupaten/kota;
   5) *Tools* monitoring dan evaluasi kinerja anggaran mencakup 70% satker input;
   6) Dashboard dan *Budget Map* 70% wilayah Indonesia;
   7) Bekerjanya task force untuk mendukung implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK).

b. 2018:
   1) rumusan arsitektur dan informasi kinerja anggaran, tool monitoring dan evaluasi kinerja anggaran, *dashboard* dan *Budget Map* bidang pendidikan dan kesehatan *fully running and published;*
   2) Komunikasi dan koordinasi penggunaan dan pemanfaatannya (*spending policy intervention*);
   3) Bekerjanya *task force* untuk mendukung implementasi PBK (lanjutan).

Outcomes

	2017	2018
a. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran untuk mewujudkan peningkatan akses dan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan pada pusat dan daerah, terutama dengan indikator proporsi anggaran untuk non-operasional/non aparatur.	5% (pagu Indikatif TA 2018)	5% (pagu Indikatif TA 2019)
b. Meningkatnya total anggaran bidang pendidikan dan anggaran bidang kesehatan pada daerah tertentu/ pinggiran	n/a	10%

Risiko

a. Cara pandang K/L hanya terfokus pada WTP tapi tidak/kurang menekankan ketercapaian outcomes dari kebijakan belanjanya;
b. Lemahnya komitmen bersama para *stakeholder* (atas keterbukaan informasi dan fokus orientasi pada kinerja anggaran) ;
c. Gesekan kewenangan antar stakeholder yang menghambat indikator keterpaduan arsitektur dan kinerja anggaran dan perbedaan *policy setting*;
d. Mitigasi dengan:
   1) Perubahan carapandang K/L untuk tidak hanya berfokus pada WTP tapi juga dengan menekankan ketercapaian outcomes dari kebijakan belanjanya;
   2) Meninggkatkan keterbukaan informasi;
   3) Miningkatkan kualitas koordinasi.

Unit Pengelola

a. *Initiative Champion:* Dirjen Anggaran
b. *Initative Owner:* Dit. PAPBN, DJA
c. Tim:
   1) DJA, DJPK, DJPb 2) PKEM, PKAPBN - BKF

19. Menghadirkan Pemerintah pada Seluruh Wilayah Indonesia melalui Sinkronisasi Penganggaran Pusat dan Daerah – Tema Penganggaran

Tujuan Inisiatif	Meningkatkan efektivitas TKDD dalam mendorong percepatan penyediaan layanan publik dasar yang berstandar nasional dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar daerah

Latar belakang

a. Arahan Presiden agar pendekatan penganggaran lebih fokus pada program/ kegiatan *(money follows program)* yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
b. Penganggaran program/kegiatan di daerah yang bersumber dari TKDD sering kali belum sinkron dengan penganggaran K/L di daerah, banyak daerah yang membiayai urusan pusat dan sebaliknya
c. Masih rendahnya kualitas belanja daerah yang terlihat dari:
   1) Ketimpangan antar daerah dan keterbatasan layanan publik dasar bagi masyarakat miskin.
   2) Kurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat usia produktif karena porsi belanja modal lebih kecil daripada belanja lainnya (rasio belanja modal APBD 2016 23,95%)
   3) Rasio SiLPA tahun sebelumnya terhadap total belanja daerah tahun 2015 sebesar 7,97%

Pendukung Kesuksesan

a. PMK 48/2016 mengenai pengelolaan TKDD.
b. PMK 112/2016 tentang Monev.
c. DAK berbasis proposal.
d. Telah dikembangkan *web based reporting system* .
e. DJPK sebagai penyelenggara SIKD nasional.
f. Kerjasama pelaksanaan *in-house training* antara DJPK dengan daerah.
g. DJPK sebagai pembina Jabatan Fungsional AKPD nasional.
h. DJPK berada dalam satu tema inisiatif strategis dengan DJA dan BKF.
i. Ketentuan 25% dari Dana Transfer Umum dalam APBN untuk belanja infrastruktur (belanja modal) dalam UU APBN 2017

Terobosan

a. Mengintegrasikan mekanisme perencanaan dan penganggaran belanja K/L dan transfer ke daerah dengan memperhatikan *money follows program.*
b. Menyusun rambu-rambu penggunaan dana *block grant.*
c. Pemanfaatan hasil monev transfer spesifik dalam kebijakan pemberian *reward and punishment.*

Milestones

a. 2017
   1) Revisi PMK 48/2016 pada bagian rambu-rambu penggunaan dana *block grant*
   2) Perumusan *reward and punishment* pelaksanaan aturan *block grand* dalam RUU HKPD dan UU APBN
b. 2018
   1) Sinkronisasi DAK berbasis proposal dengan program-program belanja K/L yang dihimpun dari Musrenbang
      a) Adanya kesepakatan para pihak (payung hukum)
      b) Penyusunan Aplikasi yang terintegrasi
      c) Tahapan Implementasi
   2) Penerapan *web based reporting system* dalam pelaporan Transfer Spesifik
   3) Pembangunan *Executive Information System* (EIS) SIKD.
   4) Pengembangan peran fungsional analis keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas kebijakan/penyusunan anggaran.

Outcomes	2018
a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	
1) Rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal	7,21%
2) Local Tax Ratio	2,2
b. Meningkatkan kesejahteraan & pemerataan kualitas layanan dasar public	
1) Indeks Pembangunan Manusia	70,37
2) Tingkat Pengangguran Terbuka	4,39 - 5,19%
3) Tingkat Kemiskinan	7,05%
c. Meningkatkan kesehatan fiskal	
1) Rasio Belanja Modal/Realisasi Total Belanja APBD :	
a) Rata-rata kab/kota	28%
b) Rata-rata provinsi	27%
2) Rasio belanja infrastruktur	23,11%
3) Rasio SiLPA terhadap belanja	7,00%

Risiko

a. Ketidaksepahaman antar K/L serta Bappenas terhadap perencanaan dan penganggaran TKDD.
b. Ketidaksiapan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan TKDD yang ditetapkan pemerintah pusat
c. Rencana mitigasi:
   1) Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi dengan K/L dan Bappenas dalam perencanaan dan penganggaran TKDD
   2) Peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah dalam pelaksanaan belanja daerah.

Unit Pengelola

a. *Initiative Champion:* Dirjen Permbangan Keuangan
b. *Initiative Owner:* Dit. Daper, DJPK
c. Tim:
   1) DJPK : Dit. Daper, Dit. PTNDP, Dit. EPIKD, Dit. PKKD
   2) DJA: Dit. PAPBN, Dit. Anggaran Bidang Ekontim, Dit Anggaran Bidang PMK, Dit Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA-BUN
   3) BKF : PK APBN, PKEM

20. Optimalisasi kebijakan penganggaran terkait pengelolaan program pensiun – Tema Penganggaran

Tujuan Inisiatif	Program pensiun dan THT yang lebih efektif dan efisien

Latar belakang

a. Potensi beban APBN yang tinggi dari skema pensiun yang *existing* (*pay as you go*):
   1) Adanya keterbatasan anggaran
   2) Data menunjukkan belanja pensiun semakin meningkat dari tahun ke tahun
   3) Pengelolaan iuran pensiun yang belum optimal
b. Berdasarkan perhitungan terakhir tagihan unfunded THT mencapai Rp29 triliun
c. UU ASN mengindikasikan perlunya reformasi di bidang pengelolaan program pensiun PNS
d. Amanat UU 12 Tahun 1980 yang memberikan ruang adanya overlapping pemberian pensiun. Beberapa orang mendapatkan pensiun dari jabatan berbeda.
e. Meningkatnya life *expectancy* masyarakat Indonesia.

Pendukung Kesuksesan

a. RPP turunan UU ASN pengelolaan program pensiun;
b. Kesepahaman antara Kementerian Keuangan , Bappenas, Men-PAN RB, BKN dan KASN terkait skema pengelolaan pensiun.

Terobosan

a. Pengelolaan Program Pensiun PNS dengan skema yang mendukung *fiscal sustainability*;
b. Adanya kebijakan terkait lembaga pengelola, lembaga pendukung dan infrastruktur terkait pengelolaan skema pensiun yang baru (lembaga BUMN di bawah Kementerian Keuangan);
c. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan yang memayungi program pensiun PNS yang baru.

Milestones

Skema dana pensiun yang komprehensif
a. 2017: Kajian mengenai perubahan skema pensiun PNS yang sesuai dan mendukung keberlangsungan fiskal
b. 2018
   1) Penentuan skema pensiun yang akan dilaksanakan
   2) Penyusunan regulasi skema pensiun dan JHT yang baru
   3) Penyiapan regulasi kelembagaan penyelenggara program pensiun dan JHT yang baru
c. 2019
   1) Penetapan regulasi skema pensiun dan JHT yang baru
   2) Penetapan regulasi kelembagaan penyelenggara program pensiun dan JHT yang baru
d. 2020
   1) Implementasi penuh skema pensiun dan JHT yang baru
   2) Operasional lembaga penyelenggara program pensiun dan JHT yang baru

Outcomes

	2018	2019	2020
▪ Perbaikan dasar hukum pengelolaan program pensiun PNS yang			
▪ Perbaikan lembaga penyelenggara program pensiun Pegawai Negeri			1,3 T
▪ Peningkatan hasil investasi akumulasi iuran pensiun	8,6 T	9T	

Risiko

a. Tingginya resistensi dari lembaga penyalur dana pensiun saat ini (PT Taspen)
b. Adanya resistensi dari pejabat/pegawai yang telah menikmati manfaat pensiun lebih dari satu jabatan

Unit Pengelola

Initiative Champion: Direktur Jenderal Anggaran, Sahli Kebijakan Regulasi Pasar Modal & Keuangan
Initative Owner: Dit. HPP, DJA
Tim: DJA, DJPB, BKF

G. Penggunaan Piagam (*Charter*) IS RBTK

1. Piagam (*Charter*) dari masing-masing IS RBTK tersebut di atas merupakan acuan dalam implementasi IS RBTK, baik pada Tema Penerimaan, Tema Penganggaran, Tema Perbendaharaan, dan Tema Sentral.
2. Dengan diimplementasikannya 20 IS RBTK tersebut diharapkan *strategic outcome* Kemenkeu yaitu "Terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan *sustainable*" dapat dicapai untuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang lebih baik serta Indonesia yang adil dan makmur.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88/KMK.01/2022
TENTANG
IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

7 (TUJUH) IS RBTK PENDUKUNG 87 (DELAPAN PULUH TUJUH) IS RBTK SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/KMK.01/2014

Dalam rangka mendukung implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014, ditetapkan 7 (tujuh) IS RBTK Pendukung dalam Tema Penganggaran dan Tema Kepabeanan dan Cukai, yaitu:

A. Tema Penganggaran

1. Reformulasi Kebijakan Pengalokasian Transfer Ke Daerah;
2. Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*Tax Ratio*);
3. Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
4. Peningkatan Efektivitas Monitoring Dan Evaluasi Transfer Ke Daerah Yang Penggunaannya Sudah Ditentukan; dan
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah.

B. Tema Kepabeanan dan Cukai

1. Pusat Logistik Berikat Sebagai Alternatif Solusi Logistik Nasional; dan
2. Revitalisasi Fungsi Pengawasan Laut.

C. Piagam (*Charter*) IS RBTK

Gambaran detail 7 (tujuh) IS RBTK sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dan huruf B tercantum pada masing-masing piagam (*charter*) IS RBTK sebagai berikut:

1. Reformulasi Kebijakan Pengalokasian Transfer ke Daerah - Tema Penganggaran

Tujuan :	Terwujudnya peningkatan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui reformulasi kebijakan DAU, DAK fisik dan dana desa

Latar belakang

a. Perhitungan DAU dengan formula AD + CF dianggap kurang merata dikarenakan:
   1) kurang adil bagi Pemda dengan belanja pegawai sedikit dan kurang mendukung kebijakan yang mengurangi proporsi belanja pegawai di Pemda,
   2) kurang dipergunakan untuk belanja modal.
b. Perlu dilakukan reformulasi penghitungan DAU dengan menurunkan porsi AD yang pada akhirnya menurunkan Indeks Williamson
c. Pengalokasian DAK berdasarkan kriteria umum, khusus, dan teknis belum optimal dalam menyelaraskan kebutuhan daerah dengan prioritas nasional, dalam mengukur Indikasi Kebutuhan Dana DAK sesuai dengan kebutuhan riil di daerah, dan dalam mensinkronisasikan perencanaan. pembangunan antar wilayah.
d. Penyaluran Dana Desa sebelumnya dilakukan dalam 3 tahap (kecuali tahap I) tidak mempersyaratkan tertentu dianggap tidak efektif dan efisien sehingga menyebabkan dana desa tidak produktif dan menjadi penambah dana *idle* di daerah

Faktor keberhasilan

a. Tersedianya data yang akurat dan dapat diakses
b. Koordinasi antara Kemenkeu, K/L yang terkait dan Pemda berjalan dengan baik
c. Tersedianya dukungan anggaran untuk penyelesaian inisiatif
d. Komitmen yang lebih kuat dari Pimpinan K/L dan Pemda untuk mensinergikan implementasi inisiatif

Perubahan dalam model operasional

a. DAU: Reformulasi DAU dengan menghilangkan AD dan menerapkan konsep Celah Fiskal
b. DAK: Pengalokasian DAK Fisik tidak lagi berdasarkan pada formula berupa kriteria umum, khusus, dan teknis, tetapi berdasarkan pada usulan daerah
c. Dana Desa: Mengubah pentahapan penyaluran, mempercepat penyaluran dan menetapkan persyaratan kinerja penyaluran

***Outcome* utama**

a. DAU
   1) Pembatasan porsi alokasi dasar
   2) Revisi UU 33/2004 dengan meniadakan alokasi dasar
   3) menghitung reformulasi DAU berdasarkan UU HKPD
b. DAK
   1) Ketentuan terkait DAK Fisik berbasis usulan daerah
   2) Roadmap DAK jangka menengah
   3) Aplikasi proposal berbasis web
   4) Aplikasi Laporan berbasis web
c. Dana Desa
   1) Tersusunnya peraturan yang mendukung perubahan tahapan dan besaran
   2) Besaran alokasi Dana Desa sesuai *roadmap*
   3) Penyaluran Dana Desa berbasis kinerja
   4) Penguatan monitoring dan evaluasi Dana Desa
   5) Pemberian insentif bagi Desa berkinerja baik dalam mengelola Dana Desa

Ringkasan tindakan yang diajukan

a. DAU
   1) Melakukan pembatasan porsi alokasi dasar dan mengevaluasi bobot variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal
   2) Merevisi UU No 33 tahun 2004 dengan meniadakan alokasi dasar
b. DAK
   1) Menyusun Roadmap DAK Fisik untuk jangka menengah
   2) Menyusun peraturan yang mendukung pengalokasian DAK Fisik berbasis usulan daerah
   3) Implementasi alokasi DAK Fisik berdasarkan bidang/subbidang/sub jenis sesuai dengan prioritas nasional dan usulan daerah
   4) Membangun aplikasi secara online untuk mendukung penyampaian usulan DAK Fisik
c. Dana Desa
   1) Menyusun perubahan regulasi perubahan kebijakan dalam bentuk PP dan PMK
   2) Melakukan sosialisasi, evaluasi dan monitoring kebijakan
   3) Menyalurkan dana desa berdasarkan kinerja dengan penerapan reward dan punishment terkait penyaluran dan penggunaan dana desa di kabupaten/kota/desa.

Dampak dan IKU

a. DAU WI

2016	2017
0.74	0.73

2018	2019
0.73	0.72

b. DAK Fisik
Persentase Pemda yang menyampaikan usulan DAK Fisik secara *online*

2017	2018	2019
25%	90%	100%

c. Dana Desa
Persentase Desa yang mendapatkan *reward* (berkinerja baik)

2018	2019
5%	10%

Unit Pengelola

a. Initiative champion: Dirjen Perimbangan Keuangan
b. Initiative owner: Direktur Dana Perimbangan
c. Tim: Direktur Dana Perimbangan

2. Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*Tax Ratio*) - Tema Penganggaran

Tujuan	Mendukung peningkatan rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*Tax and Levy Ratio*)

Latar belakang

a. *Tax Ratio* relatif masih rendah yaitu sekitar 1,8. Hal ini menyebabkan pajak daerah dipungut jauh dibawah potensi sebenarnya.
b. Hal tersebut disebabkan oleh basis pajak yang masih rendah dan upaya optimalisasi pemungutan masih terbatas

Faktor keberhasilan

a. Tersedianya Model Monev dan Model Perhitungan Potensi Pajak Daerah
b. Tersedianya Anggaran Bimtek dan komitmen *Funds sharing* dari Pemda
c. Terselesaikannya revisi UU 28/2009

Perubahan dalam model operasional

a. Pelaksanaan evaluasi Raperda dan monev pungutan PDRD;
b. Pengembangan model analisis penghitungan potensi pajak daerah;
c. Variabel potensi pajak daerah sebagai bagian dari kapasitas daerah dalam rangka kebijakan HKPD
d. Pelaksanaan Bimtek Optimalisasi dan Modernisasi Pajak Daerah

Ringkasan tindakan yang diajukan

a. Membuat Model Evaluasi dan Monev
b. Menyusun Model Perhitungan Potensi Pajak Daerah
c. Penetapan variabel potensi pajak daerah sebagai bagian dari kapasitas daerah dalam rangka kebijakan HKPD

***Outcome* utama**

a. Penetapan variabel perhitungan potensi Pajak Daerah
b. Pengembangan model dan kajian potensi PAD
c. Pengembangan dan pelaksanaan Bimtek Pajak Daerah
d. Modernisasi Pajak Daerah

Dampak dan IKU

	2017	2018	2019	2020
Tax Ratio	2,1	2.2	2.3	2.5

Struktur tata kelola

Initiative champion	Unit Ditjen
▪ Dirjen Perimbangan Keuangan	DJPK

Initiative owner	Unit Ditjen
▪ Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah	DJPK

Tim	Unit Ditjen
▪ DJPK- (Dit.PKKD), Kemendagri	DJPK

3. Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) - Tema Penganggaran

Tujuan : Mengoptimalkan pemanfaatan SIKD sebagai *one source* data keuangan daerah di level Nasional guna mendukung proses pengambilan kebijakan Pemerintah yang lebih baik

Latar belakang

a. Belum terintegrasinya data keuangan daerah
Data keuangan daerah tersebar (*scattered*) di beberapa instansi /unit sehingga menghambat proses penyajian data dan informasi untuk kebutuhan pimpinan dan *stakeholder* lain.
b. Adanya redundansi penyampaian data
1) Penyampaian data keuangan daerah oleh Pemda ke Pusat dilakukan beberapa kali untuk instansi/unit yang berbeda.
2) Pengumpulan data untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi dilakukan berulang kali oleh unit yang berbeda.
c. Penyajian data dan informasi belum didukung dengan mekanisme dan prosedur yang memadai
1) Data disajikan dari berbagai sumber sehingga terdapat kemungkinan adanya perbedaan data
2) Diperlukan mekanisme dan prosedur kerja guna menjaga *data integrity*

Faktor keberhasilan

a. Komitmen dan dukungan pimpinan untuk mengoptimalkan pemanfaatan SIKD;
b. Tersedianya dukungan sumber daya (SDM, infrastruktur, dan pendanaan) untuk peningkatan pemanfaatan SIKD;
c. Komitmen seluruh Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data ke SIKD secara lengkap dan tepat waktu;
d. Komitmen dan kerjasama yang baik dengan *stakeholder*.

Perubahan dalam model operasional

a. Mendesain pemanfaaatan SIKD untuk mewujudkan:
b. Integrasi data keuangan daerah ke SIKD
c. Sinkronisasi data dan informasi untuk menjaga *data integrity*
d. Otomatisasi penyediaan layanan data untuk kebutuhan level eksekutif dan *stakeholder* sesuai dengan kesepakatan

Ringkasan tindakan yang diajukan

a. Menyusun dan mengimplementasikan pembakuan dan standar teknis penyelenggaraan SIKD yang meliputi pembakuan pengkodean Pemda, pembakuan Bagan Akun Standar (BAS) SIKD, pembakuan data, pembakuan prosedur, pembakuan infrastruktur pendukung, pembakuan pertukaran data, pembakuan penyajian informasi, dan pembakuan arsip SIKD
b. Pengembangan aplikasi untuk mengintegrasikan aplikasi SIKD Nasional dengan aplikasi SIKD Daerah dengan menerapkan ketentuan pembakuan SIKD (agen SIKD)
1) Pembangunan *Executive Information System* (EIS) SIKD
2) Menyusun dan mengimplementasikan SOP Penyampaian data dan informasi dan SOP Penyajian dan Pemanfaatan Informasi
3) Menyusun dan mengimplementasikan modul layanan data untuk kebutuhan konsolidasi
4) Pembangunan sistem monitoring tren keuangan daerah
5) Menyusun dan mengimplementasikan interkoneksi SIKD dengan Bank Indonesia (BI)
6) Menyusun dan mengimplementasikan interkoneksi SIKD dengan *dashboard* Kepresidenan
7) Menyusun dan mengimplementasikan modul layanan data untuk kebutuhan GFS
8) Menyusun dan mengembangkan *private cloud* dan *cloud computing* SIKD untuk mendukung penyediaan layanan SIKD

Outcome utama

a. Implementasi pembakuan dan standar teknis penyelenggaraan SIKD
b. Koordinasi, kerjasama, dan pembinaan dengan Pemda dan Instansi terkait
c. Implementasi model penyajian informasi dari SIKD untuk level DJPK
d. Implementasi modul konsolidasi
e. Implementasi model penyajian informasi dari SIKD untuk Menteri Keuangan
f. Pengembangan monitoring tren keuangan daerah
g. Implementasi modul interkoneksi dengan sistem BI
h. Implementasi interkoneksi SIKD dengan dashboard kepresidenan
i. Implementasi modul layanan data ke GFS
j. Pengembangan *private cloud* dan *cloud computing* untuk mendukung penyediaan layanan SIKD

Dampak dan IKU

	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pemda yang menggunakan SIKD		25%	50%	75%	100%
Data Keuangan Pemda telah dimapping dalam GFS				75%	100%

Unit Pengelola

a. Initiative champion: Dirjen Perimbangan Keuangan
b. Initiative owner: Direktur EPIKD
c. Tim: Perwakilan dari seluruh unit eselon II di DJPK

4. Peningkatan Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan - Tema Penganggaran

Tujuan	Meningkatan kualitas penyusunan kebijakan di bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Latar belakang

a. Selama ini pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan transfer ke daerah dirasakan masih kurang efektif, karena:
   1) Masih dilaksanakan secara parsial;
   2) Belum menggunakan metodologi yang memadai;
   3) Belum mampu mendorong daerah untuk melaksanakan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran;
   4) Belum sepenuhnya memanfaatkan IT.

b. Pasal 132 ayat (2) PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN:"*bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerapan dan penggunaan dana transfer ke daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan*".

c. Perlu disusun sebuah metodologi monitoring dan evaluasi yang memadai dan komprehensif, yaitu memiliki target atau rencana jangka panjang yang jelas, serta dilaksanakan secara terpadu.

Faktor keberhasilan

a. Adanya pedoman /metodologi monitoring dan evaluasi yang memadai dan komprehensif;
b. Adanya komitmen *stakeholder* ;
c. Adanya forum koordinasi secara berkala;
d. Adanya pelaksana monitoring dan evaluasi yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai
e. Pemanfaatan IT menuju *e-reporting* dan *e-monev;*
f. Adanya *database* yang kuat dan dapat diandalkan.
g. Penggunaan laporan hasil monev sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan anggaran kedepan.

Perubahan dalam model operasional

a. Metodologi monitoring dan evaluasi atas penggunaan transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan:
   1) keterpaduan pelaksanaan monev,
   2) tahapan pelaksanaan yang baku,
   3) pengukuran indikator yang jelas,
   4) memiliki target atau rencana jangka panjang yang jelas,
   5) berbasis hasil.

b. Pemanfaatan IT menuju *e-reporting* dan *e-monev;*
   1) Pengembangan pelaporan penggunaan anggaran berbasis web
   2) Penguatan *database*
   3) Monitoring dan evaluasi secara *web* (*e-monev*)

Ringkasan tindakan yang diajukan

a. Penyusunan metodologi monitoring dan evaluasi;
b. Penyusunan payung hukum (PMK);
c. *Capacity building*;
d. *Piloting* dan pelaksanaan monev;
e. Pengembangan menjadi *e-Monev;*

***Outcome* utama**

a. Tahun 2016 : penyelesaian metodologi dan payung hukum, *piloting* pelaksanaan monev;
b. Tahun 2017: pengembangan pelaporan berbasis web secara bertahap, piloting lanjutan pelaksanaan monev;
c. Tahun 2018: sebagian besar pemda menyampaikan laporan melalui sistem berbasis web;
d. Tahun 2019 : seluruh pemda menyampaikan laporan melalui sistem berbasis web;
e. Tahun 2020: pelaksanaan *e-monev.*

Dampak dan IKU

Persentase Pemda yang melakukan pelaporan berbasis web

2017	2018	2019
50%	75%	100%

Persentase pemda yang dilakukan *e-monev*

2020
50%

Unit Pengelola

a. Initiative champion: Dirjen Perimbangan Keuangan
b. Initiative owner: Direktur EPIKD
c. Tim:
   1) Dit. EPIKD
   2) Dit. Daper
   3) Dit. PKD

5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah - Tema Penganggaran

Tujuan	Mendorong peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas HKPD dan pencapaian prioritas nasional

Latar belakang

a. Masih terdapat pemerintah daerah yang memperoleh opini selain WTP dari BPK atas LKPD-nya. Pada tahun 2014, daerah dengan opini WTP (231), WDP (191), Tidak Wajar (12), Tidak menyatakan pendapat (2).
b. Masih terdapat pemerintah daerah yang mengesahkan APBD lewat waktu, tahun 2016 sebanyak 101 daerah, daerah yang menetapkan APBD tepat waktu (441 daerah), daerah yang terlambat menyampaikan APBD ke DJPK sebanyak 14 daerah.
c. APBD masih didominasi oleh belanja pegawai dengan total belanja (2012=44,1%, 2013=41,9%, 2014=40%, 2016=38,5

Faktor keberhasilan

a. Tersedianya standar pelaksanaan kerjasama peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
b. Tersedianya dukungan kerjasama baik dari DJPK maupun Pemerintah Daerah.
c. Komitmen pemerintah daerah untuk penyelenggaraan kerjasama.

Perubahan dalam model operasional

a. Penyelenggaraan kerjasama peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dengan dukungan pendanaan dari APBN dan APBD (*cost sharing).*
b. Optimalisasi kemampuan narasumber dan materi pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah

Ringkasan tindakan yang diajukan

a. Kerjasama peningkatan kapasitas PKD bagi aparatur pengelola keuangan daerah pada level teknis dan level kebijakan di seluruh SKPD.
b. Memberdayakan aparatur pemda yang merupakan alumni ToT sebagai narasumber pada kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
c. Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana APBD untuk meningkatkan kapasitas aparaturnya.
d. Meningkatkan kemampuan narasumber dan materi pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah

***Outcome* utama**

a. Pelatihan aparatur pengelola keuangan daerah pada level teknis dan level kebijakan di seluruh SKPD
b. Mempertajam substansi peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah
c. Menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada daerah berkapasitas rendah

Dampak dan IKU

a. Persentase penambahan jumlah pemda dengan LK WTP

b. 2017	2018	2019
2,5%	3,5%	4,5%

IKU
Persentase pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan *In house Training (IHT) sebesar 50% untuk 2016 dan 50% untuk tahun 2017 dari total jumlah daerah*

Unit Pengelola

a. Initiative champion:
   1) Dirjen Perimbangan Keuangan
   2) Kepala Daerah
b. Initiative owner:
   1) Direktur PKD
   2) Ka. Badiklat/ Ka. SKPD
c. Tim:
   1) Dit. PKD

6. Pusat Logistik Berikat sebagai Alternatif Solusi Logistik Nasional – Tema Kepabeanan dan Cukai

Tujuan	Tersedianya pusat logistik untuk memenuhi kebutuhan industri yang tepat sasaran, memberikan akses pemenuhan bahan baku impor dan akses ekspor pada IKM, dan menjadi hub logistic di asia pasifik pada tahun 2018.

Latar belakang

a. Banyaknya barang impor yang merupakan kebutuhan industri di dalam negeri yang di timbun di Singapura dan Malaysia.
b. Biaya logistik yang tinggi karena adanya biaya tambahan berupa penimbunan di Singapore atau Malaysia dan inefisiensi biaya pengangkutan.
c. Peluang pengembangan *existing business model* (bursa komoditas dan VMI) melalui pemberian fasilitas/relaksasi aturan kepabeanan.
d. *Dwelling time* di pelabuhan yang tinggi dibandingkan *Dwelling time* negara tetangga.
e. Akses Impor Bahan Baku dan Ekspor barang Jadi Bagi Industri Kecil dan Menengah Masih Terbatas.

Faktor keberhasilan

a. Komitmen yang tinggi dari pimpinan.
b. Sinergi yang baik antara DJBC dengan instansi pemerintah lainnya.
c. Sinergi yang baik antara DJBC dengan pelaku industri.
d. Dukungan dan pemahaman internal DJBC yang baik.
e. Penyediaan SDM (Agen-agen Fasilitas) dalam jumlah dan kapasitas yang memadai.

Prinsip Design Utama

a. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal :
   1) Insentif fiskal
      - Penangguhan Bea Masuk, Pembebasan Cukai, Tidak dipungut PDRI
      - Tidak dipungut PPN atas penyerahan dari PLB ke TLDDP
   2) Insentif non fiskal :
      - Belum diberlakukan pemenuhan ketentuan pembatasan dibidang impor saat masuk PLB
      - Relaksasi dan fleksibilitas pemasukan dan pengeluaran barang, kepemilikan barang, masa penimbunan, kegiatan yang dilakukan di dalam PLB, nilai pabean dalam rangka perhitungan BM
b. Manajemen risiko dalam pelayanan/pengawasan (*self managed bonded*), dengan :
   1) Memberikan izin kepada perusahaan yang premium (modern, luas, memiliki SPI handal, memiliki IT Inventory dan memasang CCTV yang dapat diakses DJBC dan DJP).
   2) Pengawasan dengan analisa terhadap IT Inventory/CCTV/data pendukung lain (*Desk audit*), pemeriksaan sewaktu-waktu, audit reguler, dan monitoring/evaluasi secara periodik.
c. Pemberian asistensi kepada perusahaan melalui agen fasilitas (*Compliance assistance*).
d. Segmentasi penerima fasilitas untuk membantu pertumbuhan industri :
   1) Dukungan terhadap industri agar tepat sasaran
   2) Ramah kepada Iindustri Kecil dan Menengah (*SME friendly*)

Rangkuman tindakan utama yang diajukan

a. 2015: Identifikasi masalah logistik nasional terkait dengan PLB:
   1. *Public hearing* dan diskusi dengan asosiasi.
   2. Perumusan konstruksi masalah.
b. 2015: Penyusunan dan penetapan peraturan terkait pemberian insentif fiskal dan non fiskal terkait manajemen risiko di PLB:
   1. Peraturan Pemerintah terkait PLB.
   2. Peraturan Menteri Keuangan terkait PLB.
   3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terkait PLB.
c. 2016: Pembangunan aplikasi terkait Pusat Logistik Berikat dan pengembangannya
   1. Aplikasi layanan dokumen pemberitahuan pabean (BC 1.6 dan BC 2.8).
   2. Aplikasi rekomendasi fasilitas yang tepat (*Go-Fast*).
d. 2016: Peresmian (*Launching*) PLB oleh Presiden RI
e. 2017: Promosi dan Sosialisasi terkait PLB.
f. 2018: Evaluasi Kebijakan PLB.

Hasil utama

a. 2015: Penetapan Aturan terkait PLB (PP, PMK, Perdirjen)
b. 2016: Implementasi aplikasi PLB (BC 1.6, BC 2.8, Go Fast); Peluncuran PLB oleh Presiden;Fasilitas PLB di 30 lokasi
c. 2017: Perluasan fasilitas PLB (70 lokasi)
d. 2018: Perluasan fasilitas PLB (100 lokasi)

Dampak dan IKU

	2017	2018
a. Indeks Kepuasan Layanan Pengguna Fasilitas PLB	3,8	4,2
b. Dwelling Time Barang Yang Dikeluarkan Dengan Tujuan PLB (hari)	2,5	2

Struktur tata kelola

a. Initiative champion: Direktur Fasilitas Kepabeanan
b. Initiative owner: Kasubdit TPB
c. Team:
   1) Kepala Seksi TPB Lainnya
   2) Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Audit II
   3) Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai
   4) Kepala Seksi Otomasi Impor
   5) Kepala Seksi Peraturan Kepabeanan

7. Revitalisasi Fungsi Pengawasan Laut – Tema Kepabeanan dan Cukai

Tujuan Inisiatif	Penguatan fungsi pengawasan laut DJBC dalam rangka menanggulangi penyelundupan impor/ekspor dan barang illegal/ yang dibatasi lainnya serta meminimalisir potensi kebocoran penerimaan negara

Latar belakang

Pengawasan laut sebagai bagian dari pengawasan DJBC masih perlu dioptimalkan:

- Tingginya tingkat kerawanan penyelundupan barang impor dan ekspor serta barang illegal/batasan lainnya seiring tingginya arus lalu lintas laut Indonesia.
- Jumlah penindakan laut yang dilakukan masih jauh di bawah angka potensi kerawanan pelanggaran yang terjadi.
- Organisasi, sarana pendukung, dan SDM belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan laut

Pendukung Kesuksesan

- Komitmen pimpinan Kemenkeu dan DJBC dalam membangun kapasitas pengawasan laut DJBC
- Dukungan anggaran
- Dukungan K/L terkait

Terobosan

a. Penyempurnaan aturan terkait patroli laut yang *end-to-end*
   1) Identifikasi aturan terkait patroli laut
   2) Kajian/benchmarking standar patroli laut
   3) Penyusunan aturan terkait patroli laut

b. Pembentukan *dedicated maritime unit* , infrastruktur, dan sarana operasi
   1) Kajian penataan organisasi
   2) Relokasi armada & penyiapan *dedicated maritime unit*, infrastruktur, dan sarop
   3) Operasionalisasi *dedicated maritime unit*, infrastruktur, dan sarop

c. Pengembangan manajemen SDM pengawasan laut
   1) Penyusunan blueprint manajemen SDM Pengawasan Laut
   2) Penetapan standarisasi terkait keselamatan kerja, penghargaan, serta norma dan standar Pelaut DJBC.

Milestones

a. 2017:
   1) Penyusunan regulasi terkait patroli laut DJBC
   2) Penyempurnaan kajian terkait *dedicated maritime unit*, infrastruktur, dan sarops
   3) Penetapan perencanaan manajemen SDM Pengawasan Laut

b. 2018:
   1) Penetapan KMK dan Perdirjen patroli laut yang end to end
   2) Penetapan *blueprint* manajemen SDM Pengawasan Laut
   3) *Dedicated maritime unit*, infrastruktur, dan sarops siap beroperasi

Outcomes

	'17	'18	'19	'20
a. Peningkatan rasio aktivitas/ *coverage*	n.a.	0.50	0.60	0.70
b. Ratio *hit rate* penindakan laut	n.a.	0.05	0.07	0.1
c. Rasio Insiden karena *human error*	n.a.	0	0	0
d. Indeks Mofin di Pangkalan	72	75	80	85

Risiko

a. Potensi terjadinya insiden diplomatic akibat tindakan hot pursuit tidak sesuai ketentuan internasional yang berlaku
b. Kebijakan penerimaan PNS oleh Menpan tidak sejalan dengan rencana pemenuhan kebutuhan SDM

Mitigasi

a. Bilateral meeting dan patroli bersama antar negara tetangga, dan revisi ketentuan terkait patroli
b. Pembentukan *Marine Customs Training Center*

Unit Pengelola

a. Initiative Champion: Direktur Jenderal BC
b. Initiative Owner: Direktur P2
c. Anggota Tim DJBC:
   1) Kasubdit Patroli Laut
   2) Kasubdit Sarana Operasi
   3) Kasubdit Peraturan
   4) Kasubdit PSMT
   5) Kabag OTL
   6) Kabag Administrasi Kepeg
   7) Kabag Pengembangan Kepeg
   8) Biro Organta Setjen
   9) Biro SDM Setjen
   10) BPPK

D. Penggunaan Piagam (*Charter*) IS RBTK

Piagam *(Charter)* dari masing-masing IS RBTK dijadikan acuan dalam implementasi IS RBTK, baik pada Tema Penganggaran maupun pada Tema Kepabeanan dan Cukai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001